

TUGAS AKHIR

**STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH DALAM UPAYA MENGURANGI
TIMBULAN SAMPAH DI KAWASAN PERKOTAAN PADALARANG-
NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**



Disusun Oleh :

Dinda Nur Fauziyyah

213060013

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PASUNDAN

BANDUNG

2025

**STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH DALAM UPAYA MENGURANGI
TIMBULAN SAMPAH DI KAWASAN PERKOTAAN PADALARANG-
NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

TUGAS AKHIR

Karya Tulis Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota
Dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota



Disusun Oleh :
Dinda Nur Fauziyyah
213060013

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2025**

**PERNYATAAN ORIGINALITAS DAN TIDAK MELAKUKAN
PLAGIARISME TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dinda Nur Fauziyyah

NPM : 213060013

Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas : Teknik

Dengan ini menyatakan bahwa judul Tugas Akhir **“Strategi Pengelolaan Sampah dalam Upaya Mengurangi Timbulan Sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah Kabupaten Bandung Barat”** benar bebas dari plagiat. Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan waktu yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 26 September 2025

Yang Menyatakan,



(Dinda Nur Fauziyyah)

HALAMAN PENGESAHAN I

STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH DALAM UPAYA MENGURANGI TIMBULAN SAMPAH DI KAWASAN PERKOTAAN PADALARANG- NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

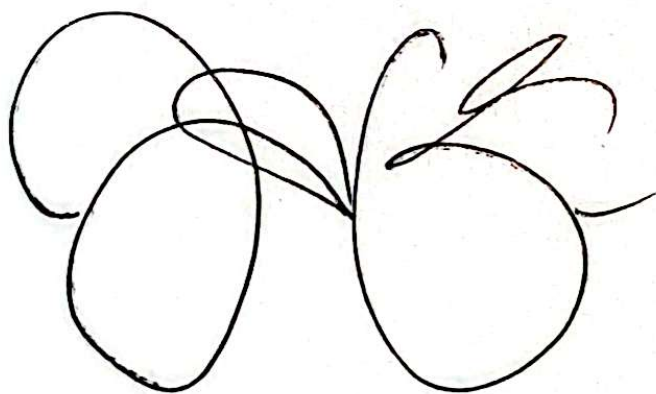
Tugas Akhir

Nama : Dinda Nur Fauziyyah

NPM : 213060013

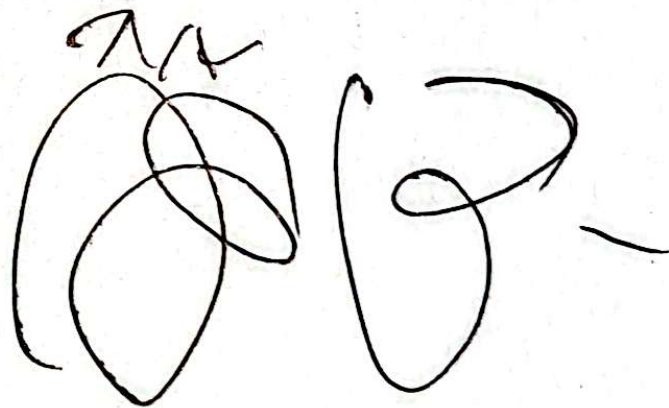
Menyetujui,

Pembimbing Utama



(Dr. Ir. H. Budi H. Pirngadi, M.T.)

Co-Pembimbing



(Meyliana Lisanti, ST., M.Si.)

Mengetahui,

Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota



(Deden Syarifudin, S.T., M.T.)

HALAMAN PENGESAHAN II

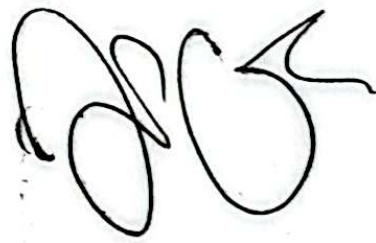
STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH DALAM UPAYA MENGURANGI TIMBULAN SAMPAH DI KAWASAN PERKOTAAN PADALARANG- NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Oleh.

Dinda Nur Fauziyyah

213060013

Menyetujui,

- | | | | |
|------------------|--------------------------------------|---|---|
| 1. Pembimbing I | : Dr. Ir. H. Budi H. Pirngadi, M.T. |  |) |
| 2. Pembimbing II | : Meyliana Lisanti, S.T. M.Si. | (|) |
| 3. Penguji I | : Furi Sari Nurwulandari, S.T., M.T. |  |) |
| 4. Penguji II | : Apriadi Budi Raharja, S.T., M.Si. |  |) |
| 5. Ketua Sidang | : Dr. Ir. H. Budi H. Pirngadi, M.T. |  |) |

Mengetahui,

Koordinator TA dan Sidang



(Furi Sari Nurwulandari, S.T., M.T.)

Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota



(Deden Syarifudin, S.T., M.T.)

**STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH DALAM UPAYA MENGURANGI
TIMBULAN SAMPAH DI KAWASAN PERKOTAAN PADALARANG-
NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**



Dinda Nur Fauziyyah

NPM: 213060013

Mengetahui, dan Menyetujui:

Pembimbing I

Dr. Ir. H. Budi H. Pirngadi, M.T.

Pembimbing II

Meyliana Lisanti, S.T., M.Si.

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Pasundan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Nur Fauziyyah
NRP : 213060013
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas : Teknik
Jenis Karya : Tugas Akhir

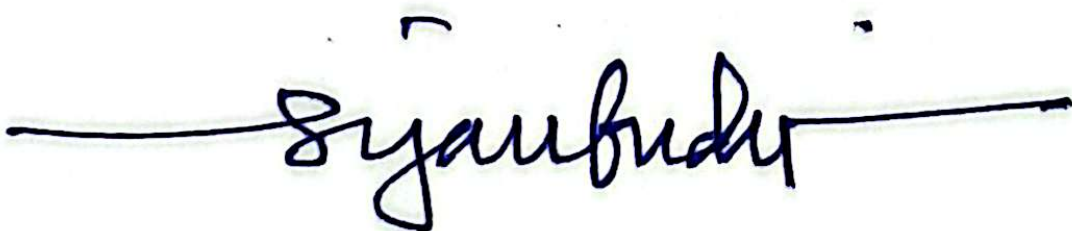
Demi pertimbangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pasundan Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atau karya ilmiah saya yang berjudul: "STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH DALAM UPAYA MENGURANGI TIMBULAN SAMPAH DI KAWASAN PERKOTAAN PADALARANG-NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan *Non Exclusive Royalty Free Right* atau hak bebas *royalty non exclusive* ini, Universitas Pasundan berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bandung, 26 September 2025

**Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota**

Yang Menyatakan,



(Deden Syarifudin, S.T., M.T.)



(Dinda Nur Fauziyyah)

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'Ala yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya. Shalawat serta salam senantiasa dipanjatkan kepada panutan tercinta Rasulullah Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Ucapan syukur tiada henti kepada Allah Subhanahu Wa Ta'Ala yang telah memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan judul **“Strategi Pengelolaan Sampah dalam Upaya Mengurangi Timbulan Sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah Kabupaten Bandung Barat”** yang merupakan laporan yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis banyak sekali memperoleh bantuan. Oleh karena itu, tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat, yaitu diantaranya:

1. Bapak Dr. Ir. H. Budi Heri Pirngadi, M.T. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun laporan tugas akhir hingga dapat menyelesaikan laporan ini.
2. Ibu Meyliana Lisanti, S.T., M.Si. selaku Dosen Co Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun laporan tugas akhir hingga dapat menyelesaikan laporan ini.
3. Bapak Deden Syarifudin, S.T., M.T. selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Pasundan.
4. Bapak Apriadi Budi Raharja, S.T., M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Pasundan.
5. Ibu Furi Sari Nurwulandari, S.T., MT. selaku Koordinator KP/TA Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Pasundan.
6. Kepada Papah dan Mamah, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua tercinta yang telah mendidik, memotivasi, dan memberikan dukungan dan doa yang selalu mengiringi setiap langkah sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini.

7. Kepada kakak dan adik penulis, Dini Fajriawati, Dina Purnamasari dan Dinanda Fitriana, yang selalu menjadi tempat pulang saat penulis merasa jenuh dan penyemangat dalam menghadapi masa-masa sulit.
8. Kepada Nazwa, Zahra, Lisa, Asya, Deasy sahabat yang telah menjadi tempat berbagi suka dan duka dan menemani di setiap proses perkuliahan hingga detik ini, terima kasih atas *supportnya* hingga akhirnya bisa menyelesaikan perkuliahan ini bersama.
9. Kepada Boynextdoor dan NCT, terima kasih telah menjadi penghibur dan sumber semangat melalui karya-karyanya dalam setiap proses perkuliahan hingga detik ini dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini.
10. Kepada teman-teman di angkatan Fostisfolis 21, terima kasih atas momen-momen selama perkuliahan.

Bandung, 26 September 2025



Dinda Nur Fauziyyah

ABSTRAK

STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH DALAM UPAYA MENGURANGI TIMBULAN SAMPAH DI KAWASAN PERKOTAAN PADALARANG- NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Oleh :

Dinda Nur Fauziyyah, 213060013

Kabupaten Bandung Barat menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah, seperti keterbatasan sarana prasarana, belum adanya TPST, serta pembatasan ritase ke TPA Sarimukti yang sudah *overload*. Peningkatan jumlah penduduk di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah, meliputi Kecamatan Ngamprah dan Kecamatan Padalarang yang merupakan kawasan strategis, turut menambah *volume* timbunan sampah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan analisis SWOT yang dikuantitatifkan melalui matriks IFAS dan EFAS untuk merumuskan strategi pengelolaan berdasarkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman) berdasarkan aspek teknis operasional dan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan internal, terutama pada keterbatasan sarana prasarana, menjadi hambatan utama. Strategi yang tepat adalah pendekatan *Weakness–Opportunities* (WO), dengan fokus pada kolaborasi, peningkatan sumber daya manusia, dan edukasi regulasi yang mendukung target pengurangan 30% dan penanganan 70% dalam upaya mengurangi timbunan sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah.

Kata kunci : Analisis SWOT, Strategi Pengelolaan Sampah, Kawasan Perkotaan, Timbunan Sampah

ABSTRACT

STRATEGY OF WASTE MANAGEMENT IN EFFORTS TO REDUCE WASTE GENERATION IN THE URBAN AREA OF PADALARANG- NGAMPRAH, WEST BANDUNG REGENCY

Author :

Dinda Nur Fauziyyah, 213060013

West Bandung Regency faces serious challenges in waste management, such as limited infrastructure, the absence of an Intermediate Waste Treatment Facility (TPST), and restricted waste transport (ritase) to the overloaded Sarimukti landfill. The increasing population in the urban areas of West Bandung, including Ngamprah and Padalarang Districts which both are strategic development zones, has further contributed to rising waste generation. This study adopts a descriptive quantitative approach using SWOT analysis, quantified through IFAS and EFAS matrices, to formulate management strategies based on internal factors (strengths and weaknesses) and external factors (opportunities and threats), particularly in operational and institutional aspects. The findings reveal that internal weaknesses, especially in infrastructure limitations, are the main obstacles. The appropriate strategy is the Weakness–Opportunities (WO) approach, focusing on collaboration, capacity building, and regulatory education to support the national targets of 30% waste reduction and 70% waste handling, in an effort to reduce the overall waste volume.

Keywords: SWOT Analysis, Waste Management Strategy, Urban Area, Waste Generation.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan	7
1.3.2 Sasaran.....	7
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	8
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah Eksternal	8
1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah Penelitian	8
1.4.3 Ruang Lingkup Materi.....	11
1.5 Kerangka Berpikir	13
1.6 Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN TEORI.....	15
2.1 Tinjauan Teori.....	15
2.1.1 Pengertian Sampah	15
2.1.2 Timbunan Sampah	16
2.1.3 Pengelolaan Sampah.....	16
2.1.4 Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan.....	18
2.1.5 SWOT (<i>Strengths, Weakness, Opportunity, Threat</i>)	19
2.2 Tinjauan Kebijakan.....	20
2.2.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	20

2.2.2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.....	22
2.2.3 Peraturan Pemerintah Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	22
2.2.4 Peraturan Pemerintah Nomor No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	23
2.2.5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2019-2025.....	23
2.2.6 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah	24
2.2.7 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029	25
2.3 Kerangka Teori	26
2.4 Studi Terdahulu.....	27
2.5 Variabel Penelitian.....	41
BAB III METODOLOGI	43
3.1 Metode Penelitian	43
3.1.1 Metode Pendekatan.....	43
3.1.2 Metode Pengumpulan Data.....	43
3.1.3 Metode Analisis	48
3.2 Matriks Analisis.....	62
3.3 Kerangka Analisis.....	64
3.4 Time Schedule	65
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	67
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bandung Barat	67
4.1.1 Gambaran Umum Kebijakan	67
4.1.2 Administrasi Kabupaten Bandung Barat	71

4.1.3 Kondisi Persampahan Kabupaten Bandung Barat.....	72
4.2 Gambaran Umum Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah.....	81
4.2.1 Gambaran Umum Kebijakan.....	81
4.2.2 Administrasi Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah.....	82
4.2.3 Kondisi Persampahan Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah.....	85
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN	106
5.1 Faktor-Faktor Internal dan Eksternal Pengelolaan Persampahan dalam Aspek Teknis Operasional dan Kelembagaan di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah	106
5.1.1 Faktor Internal	106
5.1.2 Faktor Eksternal.....	110
5.2 Strategi Dalam Pengelolaan Persampahan di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah	116
5.2.1 Strategi Pengelolaan Sampah dalam Matriks <i>Internal Factor Analysis Summary</i> (IFAS)	122
5.2.2 Strategi Pengelolaan Sampah dalam Matriks <i>Eksternal Factor Analysis Summary</i> (EFAS)	124
5.2.3 Analisis SWOT	126
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	147
6.1 Kesimpulan.....	147
6.2 Rekomendasi	148
6.3 Saran	148
DAFTAR PUSTAKA.....	150
LAMPIRAN.....	152

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah di Provinsi Jawa Barat.....	4
Tabel I. 2 Luas Ruang Lingkup Wilayah Penelitian	9
Tabel II. 1 Studi Terdahulu.....	27
Tabel II. 2 Variabel Penelitian Studi Terdahulu	41
Tabel II. 3 Variabel Penelitian	42
Tabel III. 1 Teknik Observasi.....	44
Tabel III. 2 Wawancara	45
Tabel III. 3 Penilaian Bobot dan Rating.....	47
Tabel III. 4 Kebutuhan Data Sekunder.....	47
Tabel III. 5 Matriks Internal Factor Analysis Summary (IFAS)	57
Tabel III. 6 Matriks Eksternal Factor Analysis Summary (EFAS).....	57
Tabel III. 7 Matriks Analisis SWOT	59
Tabel III. 8 Justifikasi Penentuan Lokasi Penambahan Fasilitas Prasarana Persampahan	60
Tabel III. 9 Matriks Analisis.....	62
Tabel III. 10 Time Schedule Tugas Akhir	65
Tabel III. 11 Tabel perbandingan alokasi anggaran pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024	71
Tabel III. 12 Kondisi Penduduk Kabupaten Bandung Barat.....	72
Tabel IV. 1 Sumber Sampah Kabupaten Bandung Barat	73
Tabel IV. 2 Daftar Nama TPS di Kabupaten Bandung Barat	74
Tabel IV. 3 Area Pelayanan UPT Persampahan di Kabupaten Bandung Barat.....	76
Tabel IV. 4 Sumber Sampah Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah	85
Tabel IV. 5 Bank Sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah	85
Tabel IV. 6 TPS di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah.....	89
Tabel IV. 7 TPS3R di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah.....	91
Tabel IV. 8 Pegiat Maggot di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah	94
Tabel IV. 9 Jumlah Armada Pengangkut Kabupaten Bandung Barat.....	97
Tabel IV. 10 Persentase Sampah Berhasil Terkelola	98

Tabel IV. 11 Faktor Internal dan Faktor Eksternal	116
Tabel V. 1 Timbulan Sampah Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah.....	107
Tabel V. 2 Timbulan Sampah Kabupaten Bandung Barat 10 Tahun Terakhir.....	110
Tabel V. 3 Penilaian Bobot Faktor	118
Tabel V. 4 Tabel Penilaian Rating Faktor	121
Tabel V. 5 Matriks Internal Factor Analysis Summary (IFAS) Pengelolaan Persampahan Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah.....	122
Tabel V. 6 Matriks Eksternal Factor Analysis Summary (EFAS) Pengelolaan Persampahan Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah.....	124
Tabel V. 7 Matriks SWOT Pengelolaan Sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang- Ngamprah.....	126
Tabel V. 8 Indikator & Parameter Penambahan TPS 3R Skala Kelurahan	130
Tabel V. 9 Kebutuhan TPS 3R di Kecamatan Padalarang Tahun 2025	130
Tabel V. 10 Kebutuhan TPS 3R di Kecamatan Ngamprah Tahun 2025.....	131
Tabel V. 11 Indikator & Parameter Penambahan TPST Skala Kecamatan	132
Tabel V. 12 Kebutuhan TPST Berdasarkan Jumlah Penduduk, Timbulan Sampah, dan Standar SNI di Kecamatan Ngamprah dan Kecamatan Padalarang Tahun 2025	133
Tabel V. 13 Indikator dan Parameter Penambahan Bank Sampah di Kelurahan	134
Tabel V. 14 Kebutuhan Bank Sampah Berdasarkan Jumlah Penduduk, Timbulan Sampah, dan Standar SNI di Kecamatan Padalarang Tahun 2025.....	135
Tabel V. 15 Kebutuhan Bank Sampah Berdasarkan Jumlah Penduduk, Timbulan Sampah, dan Standar SNI di Kecamatan Ngamprah Tahun 2025.....	137
Tabel V. 16 Kondisi Eksisting Fasilitas Pengelolaan Persampahan di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah.....	138
Tabel V. 17 Kebutuhan Luasan Lahan.....	139
Tabel V. 18 Strategi Pengelolaan Sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang- Ngamprah.....	144

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Peta Administrasi Kabupaten Bandung Barat.....	10
Gambar I. 2 Kerangka Berpikir.....	13
Gambar II. 1 Kerangka Teori	26
Gambar III. 1 Posisi Kuadran SWOT	58
Gambar III. 2 Kerangka Analisis	64
Gambar IV. 1 Peta Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan Kabupaten Bandung Barat 2024	68
Gambar IV. 2 Diagram Komposisi Sampah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024	73
Gambar IV. 3 Alur Pengelolaan Sampah Kabupaten Bandung Barat	78
Gambar IV. 4 Skema Pengelolaan Persampahan Berdasarkan Jakstranas	78
Gambar IV. 5 Struktur Kelembagaan Pengelolaan Sampah Kabupaten Bandung Barat	79
Gambar IV. 6 Struktur Kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup	80
Gambar IV. 7 Peta Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah.....	84
Gambar IV. 8 Kondisi Eksisting Bank Sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah.....	87
Gambar IV. 9 Peta Bank Sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah	88
Gambar IV. 10 Kondisi Eksisting TPS di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah.....	89
Gambar IV. 11 Peta TPS di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah.....	90
Gambar IV. 12 Kondisi Eksisting TPS3R di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah.....	92
Gambar IV. 13 Peta TPS3R di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah	93
Gambar IV. 14 Kondisi Eksisting Pegiat Maggot di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah.....	95
Gambar IV. 15 Peta Pegiat Maggot di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah	96

Gambar IV. 16 Armada Pengangkutan Sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang- Ngamprah.....	97
Gambar IV. 17 Skema Pengelolaan Rumah Tangga Eksisting di Perkotaan Padalarang-Ngamprah.....	98
Gambar IV. 18 Skema Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Ideal di Perkotaan Padalarang-Ngamprah.....	99
Gambar IV. 19 Skema Pengelolaan Sampah Industri Ideal Perkotaan Padalarang- Ngamprah.....	100
Gambar IV. 20 Skema Pengelolaan Sampah Industri di Eksisting Perkotaan Bandung Barat.....	101
Gambar IV. 21 Struktur Kelembagaan Kecamatan	105
Gambar V. 1 Kuadran SWOT	129
Gambar V. 2 Strategi Pengelolaan Sampah Kawasan Perkotaan Padalarang- Ngamprah.....	146

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Infrastruktur pengelolaan sampah adalah elemen kunci dalam sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2020 mengenai Pengelolaan Sampah, infrastruktur ini melibatkan beberapa aktivitas seperti pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir sampah. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan cara yang aman dan ramah lingkungan. Namun, masih banyak wilayah menghadapi keterbatasan dalam jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS), kapasitas pengangkutan, dan kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang *overload*, sehingga berdampak pada kesehatan dan lingkungan (Rachman, 2024).

Sampah adalah hasil buangan dari kegiatan manusia yang tidak memiliki nilai ekonomi dan perlu dikelola dengan baik untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan (Haerani & Sasongko, 2019). Sampah termasuk semua jenis limbah yang dihasilkan oleh manusia dan hewan dalam bentuk padat, lumpur, cair, atau gas yang dibuang karena sudah tidak diperlukan atau diinginkan. Walaupun dianggap tidak berguna, beberapa bahan ini masih kadang dapat didaur ulang dan digunakan kembali sebagai bahan baku (Bastiaans, 1984).

Strategi pengelolaan sampah dilihat dari beberapa perspektif utama yang saling berkaitan, yaitu aspek teknis operasional, kelembagaan, serta upaya pengurangan dan penanganan sampah. Semua aspek ini perlu berfungsi secara harmonis untuk mewujudkan sistem pengelolaan limbah yang berkelanjutan dan efektif (Ervani et al., 2021). Aspek teknis operasional mencakup kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Proses-proses ini memerlukan perencanaan yang cermat dan pelaksanaan yang sesuai dengan standar, sebagaimana diatur dalam standar SNI 19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan, yang menekankan pentingnya pilah sampah dari sumber demi

efisiensi proses berikutnya (Saha et al., 2023). Masalah utama dalam bidang ini biasanya berhubungan dengan ketersediaan infrastruktur, teknologi yang tepat, dan pelaksanaan yang maksimal. Tantangan utama dalam aspek ini seringkali berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur, teknologi yang memadai, serta operasionalisasi yang optimal. Sementara itu, aspek kelembagaan merujuk pada peran serta koordinasi antar lembaga pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah (Anggraini, 2011). Kerjasama antara berbagai pihak ini sangat krusial untuk merancang strategi yang berdaya guna, melaksanakan program-program, dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kurangnya koordinasi atau kapasitas kelembagaan dapat menghambat upaya pengelolaan sampah (Siregar, 2022). Adapun strategi pengurangan dan penanganan, seperti pengurangan volume sampah melalui prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), melakukan pengelolaan sampah secara efisien dan efektif, menciptakan infrastruktur yang diperlukan untuk pengelolaan sampah, meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam upaya tersebut, dan mengikuti peraturan yang ada terkait pengelolaan sampah (Ranno Marlany Rachman, 2024). Hal ini memerlukan kolaborasi serta keterlibatan aktif dari semua pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu daerah yang menghadapi masalah serius dalam pengelolaan sampah. Tantangan ini berpusat pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, yang berada di Kecamatan Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Fasilitas ini berfungsi sebagai pengelola sampah regional yang menerima sampah dari seluruh kawasan Bandung Raya, termasuk Kota Bandung dan Cimahi, Kabupaten Bandung, serta Kabupaten Bandung Barat itu sendiri. Mengacu pada informasi yang disampaikan dalam Rapat Lanjutan Pengelolaan Sampah Bandung Raya pada 7 Oktober 2024, volume sampah di TPA Sarimukti telah mencapai 1.240,56% dari kapasitas yang seharusnya. Selain itu, Kabupaten Bandung Barat juga menghadapi pembatasan jumlah ritase atau volume pengiriman sampah yang dapat dilakukan ke Tempat Pembuangan Akhir hingga tercapai 17 ritase/hari di akhir November (Dodit Adrian Pancapana, dikutip dalam IDN Times Jabar, 2024).

Infrastruktur dasar pengelolaan sampah memiliki peran yang sangat penting dalam strategi pengelolaan sampah, khususnya dalam penanganan dan pengurangan sampah langsung dari sumbernya. Namun, infrastruktur dasar seperti TPS3R, Bank Sampah, dan lainnya yang telah tersedia di Kabupaten Bandung Barat belum berjalan optimal. Hal tersebut terjadi karena sarana yang kurang memadai, minimnya tenaga kerja yang terlatih, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Infrastruktur pengelolaan sampah perlu berperan dalam mengurangi volume sampah dari sumber melalui pemilahan dan pendaur ulang sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir. Saat ini, sebagian besar sampah yang dihasilkan oleh warga Kabupaten Bandung Barat masih dibuang ke TPA Sarimukti. Namun, situasi di TPA Sarimukti sangat memprihatinkan. Koordinator Pengelola TPA Sarimukti, Zidni Ilman, menyatakan bahwa dari empat zona yang tersedia, hanya satu zona yang berstatus aktif, dan kondisinya sudah *overload* (Tribun Jabar, 2025).

Sebelumnya, Kabupaten Bandung Barat pernah memiliki rencana untuk membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah (Media Indonesia, 2023). TPST sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam strategi pengelolaan sampah, khususnya dalam penanganan dan pengurangan sampah langsung dari sumbernya. TPST tidak hanya berfungsi sebagai tempat akhir pengolahan sampah, tetapi juga menjadi titik penting dalam menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Namun, rencana tersebut dibatalkan karena penolakan dari masyarakat setempat. Penolakan ini utamanya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai teknis operasional TPST kepada warga, serta kendala dalam anggaran untuk pengadaan lahan dikarenakan bantuan keuangan hanya untuk pembangunan fisik (DPUTR Kabupaten Bandung Barat, 2024).

Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat yang cukup signifikan, yang berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) diperkirakan mencapai 1.859.600 orang pada tahun 2023 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, 2024), ada kekhawatiran bahwa hal ini akan berdampak langsung terhadap peningkatan volume sampah. Dampak ini terutama akan dirasakan di area perkotaan seperti Kecamatan Ngamprah dan Padalarang, yang

merupakan pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Provinsi Jawa Barat menghasilkan sekitar 6,6 juta ton sampah setiap tahunnya. Secara rinci, jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat diperkirakan akan memproduksi sampah dalam jumlah yang signifikan setiap harinya, yaitu sekitar 753,68 ton, pada tahun 2024 (SIPSN KLHK, 2024). Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, diperkirakan volume sampah akan meningkat pula. Provinsi Jawa Barat adalah provinsi penghasil sampah terbesar di Indonesia memiliki variasi besar antara kabupaten/kota dalam hal timbulan sampah. Berdasarkan data kinerja pengelolaan sampah di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, terlihat bahwa sebagian besar wilayah telah memiliki capaian pengelolaan sampah yang relatif tinggi. Namun, Kabupaten Bandung Barat menunjukkan capaian pengelolaan sampah yang masih berada pada kategori rendah, yaitu 25,29% dari total timbulan sampah tahunan yang berhasil terkelola. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan pengelolaan sampah, khususnya di kawasan perkotaan Padalarang–Ngamprah yang mengalami pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang pesat, namun belum diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang memadai. Informasi lebih lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel I. 1 Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah di Provinsi Jawa Barat

Kabupaten /Kota	Pengurangan Sampah Tahunan (ton/tahun)	% Pengurangan Sampah	Penanganan Sampah Tahunan (ton/tahun)	% Penanganan Sampah	Sampah Terkelola Tahunan (ton/tahun)	% Sampah Terkelola
Kab. Ciamis	73.346,06	40,11	77.615,79	42,44	150.961,85	82,55
Kab. Majalengka	0,00	0,00	47.085,00	13,75	47.085,00	13,75
Kab. Sumedang	9.106,60	5,17	51.983,30	29,53	61.089,90	34,70
Kab. Indramayu	34.491,48	8,31	224.453,11	54,11	258.944,59	62,42
Kab. Purwakarta	2.555,00	1,67	21.503,37	14,08	24.058,37	15,76
Kab. Karawang	2.985,70	0,77	141.439,54	36,32	144.425,24	37,08
Kab. Bekasi	1.831,74	0,30	306.662,04	49,91	308.493,78	50,21
Kab. Bandung Barat	10.540,75	3,83	59.025,37	21,46	69.566,12	25,29

Kabupaten /Kota	Pengurangan Sampah Tahunan (ton/tahun)	% Pengurangan Sampah	Penanganan Sampah Tahunan (ton/tahun)	% Penanganan Sampah	Sampah Terkelola Tahunan (ton/tahun)	% Sampah Terkelola
Kab. Pangandaran	336,17	0,52	30.371,47	46,73	30.707,63	47,25
Kota Bogor	69.044,83	25,04	190.954,12	69,26	259.998,95	94,30
Kota Bandung	116.347,47	21,30	393.534,13	72,06	509.881,60	93,36
Kota Cirebon	8.715,52	11,04	58.615,91	74,23	67.331,42	85,26
Kota Bekasi	40.659,61	6,30	422.755,56	65,50	463.415,18	71,80
Kota Depok	65.565,10	13,18	286.694,00	57,62	352.259,09	70,80
Kota Tasikmalaya	21.451,20	17,55	83.904,00	68,64	105.355,20	86,19
Kota Banjar	7.522,11	23,63	22.036,35	69,24	29.558,45	92,87
Kab. Bogor	8.561,79	0,83	274.226,21	26,70	282.788,00	27,54
Kab. Bandung	726,72	0,16	119.355,00	25,80	120.081,72	25,96
Kab. Cianjur	174.325,88	36,70	146.270,83	30,79	320.596,71	67,49
Kab. Garut	44.262,79	10,81	89.946,95	21,97	134.209,74	32,78
Kab. Kuningan	9.129,57	4,17	96.725,00	44,21	105.854,57	48,38
Kab. Cirebon	11.311,21	2,43	158.684,26	34,11	169.995,47	36,54
Kab. Tasikmalaya	152,34	0,06	20.075,00	7,80	20.227,34	7,86
Kab. Subang	0,00	0,00	151.475,00	62,89	151.475,00	62,89
Kota Sukabumi	17.508,46	26,01	49.275,00	73,21	66.783,46	99,22
Kota Cimahi	17.592,85	20,94	62.402,22	74,27	79.995,08	95,20
Kota Sukabumi	73,526.07	19.74	152,570.00	40.96	226,096.07	60.70

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Tahun 2024

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas) menargetkan pengelolaan sampah 100% secara tepat dan benar pada tahun 2025. Pengelolaan ini dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pengurangan dan penanganan. Pendekatan pengurangan mencakup upaya untuk membatasi timbulan sampah, memanfaatkan kembali, dan mendaur ulang. Sementara itu, pendekatan penanganan melibatkan proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. (Pemerintah Indonesia, 2017).

Oleh karena itu, diperlukan identifikasi yang lebih mendalam terkait faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengelolaan sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah, serta pendekatan analisis yang mampu menggambarkan situasi secara menyeluruh. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) untuk menganalisis kondisi pengelolaan sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah. Pendekatan ini dipilih karena dapat membantu mengidentifikasi potensi dan masalah dari sistem pengelolaan sampah yang sudah berjalan, sekaligus melihat peluang yang bisa dimanfaatkan dan tantangan yang perlu diwaspadai. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi yang tepat guna dalam mengurangi timbunan sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian, perumusan masalah memiliki peran penting sebagai dasar dalam menentukan arah dan fokus penelitian. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini bersumber dari fenomena persampahan di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah yang semakin berkembang dan menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Fenomena ini menimbulkan berbagai pertanyaan yang perlu dianalisis lebih lanjut guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam serta menemukan solusi yang tepat.

1. Zona pembuangan sampah di TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, kini berstatus *overload* akibat kapasitas yang telah melebihi batas maksimal. Saat ini, hanya satu zona yang masih beroperasi untuk menampung sampah yang dikirim dari wilayah Bandung Raya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan operasional, sehingga diperlukan langkah strategis untuk mengatasi penumpukan sampah yang terus berlangsung (Ilman, 2025).
2. Belum tersedianya TPST di Kabupaten Bandung Barat. Terdapat rencana pembangunan TPST perkecamatan di Kecamatan Ngamprah namun ditolak warga karena kurangnya sosialisasi terkait teknisnya, serta kendala dalam anggaran untuk pengadaan lahan dikarenakan bantuan keuangan hanya untuk pembangunan fisik (DPUTR Kabupaten Bandung Barat, 2024). Di

sisi lain, beberapa daerah di Kabupaten Bandung Barat memiliki fasilitas TPS3R. Namun, masih terbatas dan belum tersebar merata di setiap kecamatan (SIPSN, 2024).

3. Timbulan sampah merupakan salah satu permasalahan utama di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah, khususnya di Kecamatan Padalarang dan Kecamatan Ngamprah yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Jumlah produksi sampah di Kecamatan Padalarang termasuk tertinggi kedua di Bandung Barat, dengan timbulan sampah mencapai lebih dari 7 ton/hari. Namun, sarana pengelolaan sampah masih terbatas sehingga banyak sampah yang tidak tertangani secara optimal dan menyebabkan penumpukan di TPS maupun timbunan liar di lingkungan sekitar (Pradana, 2025)

Berdasarkan hal tersebut munculah pertanyaan terkait pengelolaan sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah, antara lain sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor internal dan eksternal pengelolaan persampahan dalam aspek teknis operasional dan kelembagaan persampahan di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah?
2. Bagaimana strategi dalam pengelolaan persampahan di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah untuk dapat mencapai target yang sudah ditentukan?

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu teridentifikasinya strategi pengelolaan sampah dalam upaya mencegah timbulan sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah.

1.3.2 Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai untuk mendukung tercapainya tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya faktor-faktor internal dan eksternal pengelolaan persampahan dalam aspek teknis operasional dan kelembagaan di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah.
2. Teridentifikasinya strategi dalam pengelolaan persampahan di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah untuk dapat mencapai target yang sudah ditentukan.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian meliputi ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Ruang lingkup wilayah menjelaskan terkait lokasi kajian dalam penelitian dan ruang lingkup materi menjelaskan terkait batasan lingkup materi dalam penelitian.

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah Eksternal

Kabupaten Bandung Barat terletak pada 06° 41' - 07° 19' Lintang Selatan dan 107° 22' - 108° 05' Bujur Timur dan memiliki luas sebesar 130.577,40 Ha. Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 16 kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 165 desa. Secara administratif Kabupaten Bandung Barat mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Kabupaten Cianjur.
- Sebelah Utara : Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.
- Sebelah Timur : Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah Penelitian

Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PKL menurut PERDA Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 ini berada di Kecamatan Ngamprah dan Kecamatan Padalarang. Selain itu, dua kecamatan ini termasuk ke dalam KSK Perkotaan Padalarang yaitu kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Kecamatan Ngamprah adalah ibu kota Kabupaten Bandung Barat yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Bandung

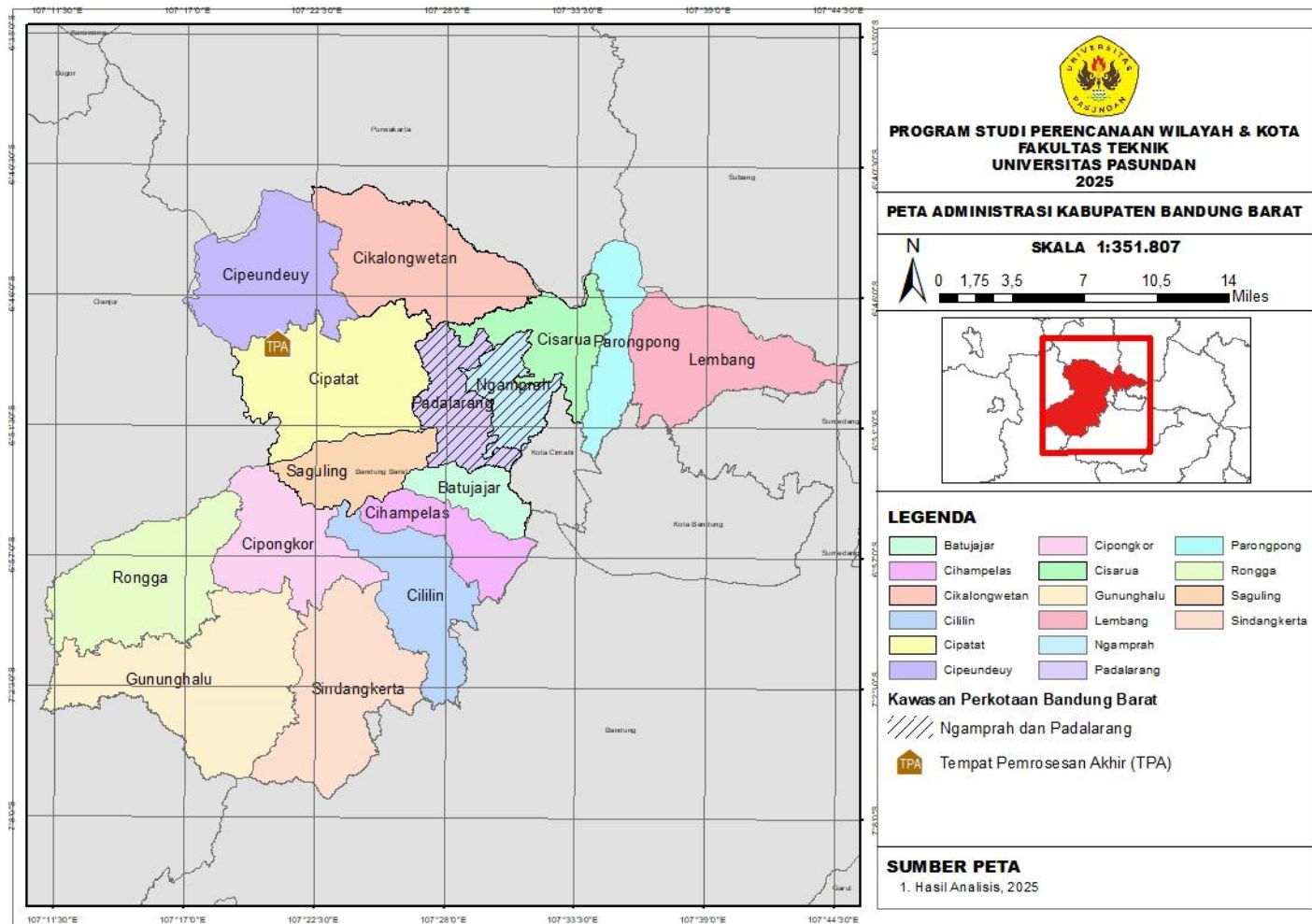
Barat. Wilayahnya terbagi menjadi 11 desa. Sedangkan Kecamatan Padalarang terbagi menjadi 10 desa dan pusat pemerintahannya berada di Desa Jayamekar. Kecamatan ini berjarak sekitar 7,3 kilometer dari ibu kota kabupaten Bandung Barat ke arah barat. Dengan luas wilayah mencapai 87,28 km² dari 1287,41 km² total luas Kabupaten Bandung Barat, wilayah kajian ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Cikalongwetan
- Sebelah Timur : Kecamatan Cisarua dan Kota Cimahi
- Sebelah Selatan : Kecamatan Batujajar
- Sebelah Barat : Kecamatan Cipatat dan Kecamatan Saguling

Tabel I. 2 Luas Ruang Lingkup Wilayah Penelitian

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Timbulan Sampah (ton/hari)
Padalarang	178.903	51,40	3.480	74,99
Laksanamekar	19.347	4,71	4.320	9,67
Cimerang	5.021	5,12	926	2,51
Cipeundeuy	14.014	5,04	2.626	7,01
Kertajaya	21.003	4,39	4.519	10,50
Jayamekar	19.875	5,77	3.254	9,94
Padalarang	36.443	5,11	6.736	18,22
Kertamulya	27.933	2,48	10.639	13,97
Ciburuy	21.312	5,66	3.557	10,66
Tagogapu	11.736	5,79	1.915	5,87
Campakamekar	15.315	7,80	1.855	7,66
Ngamprah	169.910	35,99	4.721	76,54
Cimareme	10.562	2,24	4.715	5,28
Gadobangkong	18.581	1,49	12.470	9,29
Tanimulya	39.369	2,3	17.117	19,68
Pakuhaji	9.880	3,17	3.117	4,94
Cilame	41.479	6,69	6.200	20,74
Margajaya	19.611	1,24	15.815	9,81
Mekarsari	17.182	1,97	8.722	8,59
Ngamprah	8.557	1,52	5.630	4,28
Sukatani	8.088	4,63	1.747	4,04
Cimanggu	7.736	6,12	1.264	3,87
Bojongkoneng	5.956	4,62	1.289	2,98

Sumber : Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2024



Gambar I. 1 Peta Administrasi Kabupaten Bandung Barat

1.4.3 Ruang Lingkup Materi

1. Teridentifikasinya faktor-faktor internal dan eksternal pengelolaan persampahan dalam aspek teknis operasional dan kelembagaan di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah

Menganalisis faktor internal dan faktor eksternal mengenai pengelolaan persampahan berdasarkan aspek teknis pengelolaan persampahan di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah antara lain yaitu :

a. Aspek teknik operasional

- Sumber sampah
- Timbulan sampah
- Komposisi dan karakteristik sampah
- Pemilahan sampah (sarana pemilahan sampah)
- Pengumpulan sampah (metode pengumpulan baik komunal maupun individual, sarana yang digunakan (TPS, TPS 3R dan/atau alat pengumpul untuk sampah terpilah), jumlah sarana pengumpulan)
- Pengangkutan sampah (jumlah truk)
- Pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, daur ulang energi)
- Pemrosesan akhir sampah (lokasi, luas, fasilitas TPA, kondisi operasional).

b. Aspek kelembagaan

- Bentuk lembaga atau organisasi yang mengelola sampah
- Tata cara penyelenggaraan pengelolaan, internal (dilingkungan Dinas) atau eksternal (antar instansi dan atau dengan pihak masyarakat)
- SDM, meliputi jumlah SDM yang terlibat dalam pengelolaan sampah (staf dan petugas lapangan).
- Tercukupinya dana untuk pengelolaan sampah.

Analisis dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara, dan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, serta laporan-laporan operasional lain yang ada.

2. Teridentifikasinya strategi dalam pengelolaan persampahan di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah untuk dapat mencapai target yang sudah ditentukan

- Matriks Internal *Factor Analysis Summary* (IFAS) dan Matriks Eksternal *Factor Analysis Summary* (EFAS) yang terdiri dari faktor internal (kekuatan dan kelemahan), serta faktor eksternal (peluang dan ancaman) berdasarkan aspek teknik operasional dan aspek kelembagaan pengelolaan persampahan yang diperoleh dari survey lapangan serta wawancara mendalam dengan para ahli, kemudian diperkuat dengan mempelajari beberapa referensi yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan.
- Analisis SWOT, data diolah dengan menggunakan matrik SWOT dalam pengelolaan persampahan, sehingga diperoleh empat skenario strategi pengelolaan persampahan di Kabupaten Bandung Barat, yaitu :
 1. Strategi *Strength-Opportunity* (SO)
 2. Strategi *Weakness-Opportunity* (WO)
 3. Strategi *Strength-Threats* (ST)
 4. Strategi *Weakness-Threats* (WT).

1.5 Kerangka Berpikir

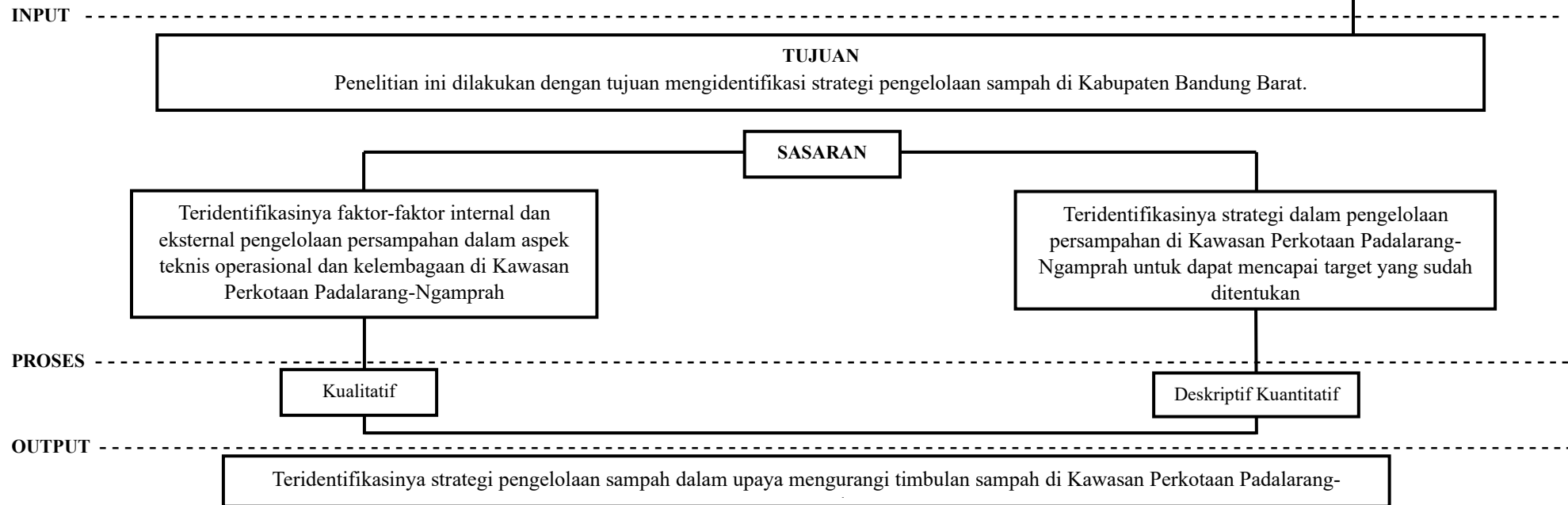
LATAR BELAKANG

TPA Sarimukti akan beroperasi hingga tahun 2025/2026. Di sisi lain, TPA Regional Legok Nangka baru akan beroperasi pada tahun 2029/2030. Kekosongan waktu tersebut menuntut adanya solusi alternatif untuk mencegah timbunan sampah. Dikarenakan jumlah ritase yang dibatasi, serta belum terdapatnya TPST sebagai solusi lokal dalam menangani sampah secara mandiri.

Diperlukan identifikasi yang lebih mendalam terkait faktor internal dan eksternal pada pengelolaan persampahan di Kabupaten Bandung Barat. Faktor-faktor ini untuk menentukan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada pengelolaan persampahan. Dengan memahami kondisi eksisting pengelolaan persampahan serta faktor internal dan eksternal yang ada, diharapkan dapat ditemukan strategi tepat guna dalam pengelolaan persampahan di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah.

RUMUSAN MASALAH

1. Zona pembuangan sampah di TPA Sarimukti berstatus *overload*. Saat ini, hanya satu zona yang masih beroperasi untuk menampung sampah yang dikirim dari wilayah Bandung Raya (Zidni Ilman, 2025).
2. Belum terdapatnya TPST, rencana pembangunan TPST ditolak warga karena kurangnya sosialisasi terkait teknisnya, serta kendala dalam anggaran dalam pengadaan lahan (DPUTR KBB, 2024).
3. Jumlah produksi sampah di Kecamatan Padalarang dan Kecamatan Ngamprah termasuk tertinggi kedua dan ketiga di Kabupaten Bandung Barat, dengan timbunan sampah mencapai lebih dari 7 ton/hari. Namun, sarana pengelolaan sampah masih terbatas sehingga banyak sampah yang tidak tertangani secara optimal dan menyebabkan penumpukan di TPS maupun timbunan liar di lingkungan sekitar (Jabarekspres, 2025).



Gambar I. 2 Kerangka Berpikir

1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab dimana pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang mempunyai pokok bahasan dengan urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Sasaran, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian mengenai teori-teori, kebijakan dan studi yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kajian serta pembahasan.

BAB III METODOLOGI

Berisi uraian mengenai metodologi dan rencana kerja pada kajian penelitian tersebut.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Berisi uraian mengenai gambaran umum kebijakan, gambaran umum wilayah dan gambaran umum lokasi di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berisi uraian mengenai penjabaran hasil penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis berdasarkan kondisi lapangan terkait pengelolaan sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi uraian mengenai ringkasan dan rekomendasi dari penelitian yang telah dilakukan di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pengertian Sampah

Sampah dapat didefinisikan sebagai material sisa yang tidak diinginkan setelah selesainya suatu proses (Suryati, 2014). Definisi ini menunjukkan bahwa status suatu material sebagai limbah bersifat relatif dan bergantung pada sejauh mana material tersebut masih memiliki nilai guna atau dianggap dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sujarwo dkk. (2014) menekankan bahwa sampah adalah produk kegiatan manusia yang berbentuk padat, baik organik maupun anorganik, dan dianggap tidak dapat dimanfaatkan serta dibuang ke lingkungan.

Jenis sampah diklasifikasi menjadi 2 (dua) yaitu sampah organik (dapat diurai/*degradable*) dan sampah anorganik (tidak dapat diurai/*undegradable*) (Akhmad Affandi, 2010) :

1) Sampah Organik

Sampah organik merupakan jenis sampah yang terdiri dari materi yang mampu terurai secara alami oleh mikroorganisme, seperti sisa makanan, daun, dan kotoran hewan. seperti limbah makanan, daun-daun, dan kotoran hewan. Sampah ini berasal dari makhluk hidup atau bersifat biologis, sehingga dalam kondisi yang sesuai, bisa terurai dan kembali ke ekosistem tanpa memberikan dampak buruk bagi lingkungan (Sujarwo et al., 2014). Selain itu, sampah organik sering kali disebut sebagai sampah basah karena umumnya mengandung banyak air, yang dapat mempercepat proses penguraian jika dibiarkan terbuka (Hamna, 2024). Sampah ini juga memiliki potensi untuk diolah menjadi kompos atau pupuk, yang turut mendukung siklus alami serta mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir (Sekarsari et al., 2020).

2) Sampah Anorganik

Sampah anorganik merupakan jenis sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang dibuat oleh manusia seperti plastik, logam, dan kaca yang sulit

untuk terurai secara alami. Sampah ini umumnya tidak dapat hancur dalam waktu cepat dan memerlukan teknik pengolahan khusus karena karakteristiknya yang tahan lama dan sulit diurai secara alami (Oktaviani et al., 2024). Sampah anorganik sering kali tidak dianggap memiliki nilai ekonomi oleh pemiliknya setelah digunakan dan biasanya langsung dibuang. Jika tidak dikelola dengan baik, jenis sampah ini bisa menyebabkan masalah bagi lingkungan, termasuk pencemaran tanah dan air. Salah satu cara untuk mengurangi dampak negatif dari sampah anorganik adalah melalui daur ulang (Sari, 2023).

2.1.2 Timbulan Sampah

Timbulan sampah adalah jumlah sampah yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas masyarakat dalam jangka waktu tertentu dan diukur dengan satuan berat (kilogram) atau volume (liter) (Fitra et al., 2023). Timbulan sampah menjadi salah satu ukuran penting dalam merencanakan pengelolaan limbah, termasuk penentuan infrastruktur yang diperlukan, seperti alat transportasi dan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Beraneka ragam kegiatan masyarakat, misalnya di kawasan perkotaan, rumah tangga, dan fasilitas umum, memberikan kontribusi pada peningkatan timbulan sampah (Rachman & Safira, 2020). Ini memerlukan pendekatan pengelolaan yang efisien, seperti pemilahan sampah, pengomposan, daur ulang, dan metode pengolahan lainnya, untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran (Kassawe & Getahun, 2025).

2.1.3 Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Tujuan pengolahan sampah yaitu mengubah sampah menjadi bahan bernilai ekonomis dengan pengolahan sampah supaya dapat menjadi material berdampak positif untuk lingkungan hidup (Bank Sampah Jakarta, 2013).

Pengelolaan sampah digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- 1) Pengelolaan sampah berasal dari rumah tangga dan sampah sejenis berasal dari sampah rumah tangga; dan
- 2) Pengelolaan sampah tertentu.

Pengelolaan sampah spesifik merupakan tanggung jawab pihak pemerintah, sedangkan pengelolaan sampah berasal dari rumah tangga dan sampah yang sama jenisnya berasal dari sampah rumah tangga berupa pengurangan sampah dan penanganan sampah, pengurangan sampah berupa: pembatasan timbulan material sampah, pendauran ulang material sampah, dan pemanfaatan kembali material sampah (Hendra Fridolin Ananda Sudater Siagian, 2022).

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam teknis operasional penanganan persampahan di antaranya:

1. Kapasitas peralatan yang belum memadai;
2. Pemeliharaan alat yang kurang baik;
3. Lemahnya tenaga pelaksana khususnya tenaga harian lepas;
4. Terbatasnya metode operasional yang sesuai dengan kondisi daerah;
5. Siklus operasi persampahan tidak lengkap / terputus karena berbedanya penanggung jawab;
6. Koordinasi antar birokrasi pemerintah seringkali lemah;
7. Manajemen operasional lebih dititik beratkan pada aspek pelaksanaan, sedangkan aspek pengendaliannya lemah – Perencanaan operasional seringkali hanya untuk jangka pendek.

Menurut Roni Kastam, 2007 Pengelolaan sampah diperkotaan diperlukan untuk mencegah terjadinya penumpukan sampah baik di tingkat produsen (rumah tangga dan komersil) maupun di tempat pembuangan sampah sementara. Pengelolaan sampah meliputi pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir.

1. Aspek Teknis Operasional

Ruang lingkup aspek teknis operasional sampah terbagi atas 6 bagian yaitu dapat diuraikan sebagai berikut.

- Pewadahan, adalah kegiatan menampung sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat sumber sampah.

- Pengumpulan, adalah kegiatan penanganan yang tidak hanya mengumpulkan sampah dari wadah individual atau komunal (bersama), melainkan juga mengangkut ke tempat terminal tertentu, baik dengan pengangkutan langsung maupun tidak langsung.
- Pemindahan, adalah kegiatan memindahkan sampah hasil pengumpulan ke dalam alat pengangkut untuk dibawa ke TPA.
- Pengangkutan, adalah kegiatan membawa sampah dari lokasi pemindahan atau langsung dari sumber sampah menuju ke TPA.
- Pengolahan, adalah proses untuk mengurangi volume sampah dan mengubah bentuk sampah menjadi bermanfaat, dengan cara pembakaran, pengomposan, pemadatan, penghancuran, pengeringan, dan pendaaur ulangan.
- Pembuangan akhir adalah tempat dimana dilakukan kegiatan untuk mengisolasi sampah sehingga aman bagi lingkungan (SNI 19-2425-2002).

2. Aspek Kelembagaan

Aspek Kelembagaan merupakan suatu kegiatan yang multidisiplin yang bertumpu pada prinsip teknik dan manajemen yang menyangkut aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya, dan kondisi fisik wilayah kota dan memperhatikan pihak yang dilayani yaitu masyarakat kota. Perancangan dan pemilihan organisasi yang melayani persampahan di suatu wilayah harus disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang membinanya, pola sistem operasional yang diterapkan, kapasitas kerja sistem dan lingkup tugas pokok dan fungsi yang harus ditangani (Rahardyan dan Widagdo, 2005; Damanhuri dan Padmi, 2011).

2.1.4 Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan

Strategi pengembangan sistem pengelolaan persampahan merupakan suatu pendekatan atau paradigma baru yang harus dipahami dan diikuti yaitu bahwa sampah dapat dikurangi, digunakan kembali dan atau didaur ulang; atau yang sering

dikenal dengan istilah 3R (*Reduce, Reuse Recycle*) (Eva Pongrácz, 2004). Hal ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru karena sudah banyak dilakukan oleh negara maju dan berhasil meningkatkan efisiensi pengelolaan yang signifikan. Dengan mengurangi sampah sejak di sumbernya maka beban pengelolaan kota akan dapat dikurangi dan anggaran serta fasilitas akan dapat semakin efisien dimanfaatkan. Beban pencemaran dapat dikurangi dan lebih jauh lagi dapat turut menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya;
2. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan; dan
3. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan.

2.1.5 SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunity, Threat*)

Freddy Rangkuti (2016) menjelaskan bahwa Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Proses perencanaan strategis ini dilakukan melalui tiga tahap utama:

1. Tahap Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dibagi menjadi faktor internal yang mencakup *Strengths* (kekuatan) dan *Weaknesses* (kelemahan), beserta faktor eksternal yang mencakup *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman). Data ini kemudian dimasukkan ke dalam dua matriks EFAS (*External Factors Analysis Summary*) untuk faktor eksternal dan matriks IFAS (*Internal Factors Analysis Summary*) untuk faktor internal. Berikut adalah langkah-langkah penyusunan matriks (baik EFAS maupun IFAS) :

- Buat tabel yang berisikan kolom faktor, bobot, rating, skor.
- Bobot menunjukkan tingkat pentingnya faktor tersebut, diberikan nilai antara 0–1, totalnya harus 1,00.

- Rating diberi skala 1–4. Untuk kekuatan dan peluang: 4 = sangat mendukung, 1 = tidak mendukung. Untuk kelemahan dan ancaman: 1 = sangat buruk, 4 = tidak terlalu buruk.
- Skor akhir adalah hasil dari bobot $\times$ rating. Setelah bobot dan rating untuk faktor internal dan eksternal tersebut dihitung, hasilnya kita masukkan ke dalam kuadran SWOT dengan cara :
 - a. Total nilai bobot x *rating* kekuatan - dengan total nilai bobot dan *rating* kelemahan = nilai kuadran sumbu X.
 - b. Total nilai bobot x *rating* peluang - dengan total nilai bobot dan *rating* ancaman = nilai kuadran sumbu Y.

2. Tahap Analisis

Setelah total skor diperoleh dari EFAS dan IFAS, dilakukan analisis strategi menggunakan matriks SWOT. Matriks SWOT dilakukan dengan menggabungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman menjadi empat strategi:

- S–O (*Strength–Opportunity*): Memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang.
- W–O (*Weakness–Opportunity*): Mengatasi kelemahan dengan peluang.
- S–T (*Strength–Threat*): Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.
- W–T (*Weakness–Threat*): Menghindari ancaman sambil memperbaiki kelemahan.

3. Tahap Pengambilan Keputusan

Strategi terbaik dipilih dari hasil analisis SWOT untuk dijadikan arah kebijakan ke depan.

2.2 Tinjauan Kebijakan

2.2.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur pengelolaan sampah di Indonesia, dengan tujuan utama untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Dalam

undang-undang ini, sampah didefinisikan sebagai sisa dari aktivitas manusia sehari-hari dan/atau proses alam yang berbentuk padat, serta dapat dimanfaatkan atau masih layak digunakan. Jenis sampah yang diatur mencakup sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik yang memerlukan penanganan khusus berdasarkan sifat atau konsentrasinya.

Kelompok pengelolaan sampah menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yaitu:

- 1) Pengurangan sampah (*waste minimization*) yang terdiri dari pembatasan terjadinya sampah, guna ulang, dan daur ulang. Pengurangan sampah melalui 3R meliputi:
 - a. Pembatasan timbulan sampah (*reduce*) mengupayakan agar sampah yang dihasilkan sesedikit mungkin;
 - b. Pemanfaatan kembali sampah (*reuse*) yaitu upaya penggunaan kembali sampah secara langsung;
 - c. Pendaauran ulang sampah (*recycle*) untuk sampah yang tidak dapat digunakan kembali secara langsung.
- 2) Penanganan sampah (*waste handling*) yang terdiri dari:
 - a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
 - b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
 - c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dari dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
 - d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;
 - e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Undang-undang ini melarang penggunaan sistem pembuangan terbuka (*open dumping*) di TPA setelah tahun 2013, meskipun praktik tersebut masih ada di beberapa daerah. Selain itu, Undang-undang ini juga mewajibkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sampah, termasuk pembiayaan melalui APBN dan APBD. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dengan memberikan masukan dan terlibat dalam kebijakan terkait.

2.2.2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 merupakan strategi yang melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan sampah secara menyeluruh, dari sumber hingga proses akhir. Tujuan utama yang ingin dicapai adalah pengelolaan 100% sampah dengan cara yang tepat dan benar pada tahun 2025. Pengelolaan ini dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pengurangan dan penanganan. Pengurangan mencakup upaya untuk membatasi timbulan sampah, memanfaatkan kembali, dan mendaur ulang, sedangkan penanganan mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Pemerintah menargetkan pengurangan sebesar 30% dan penanganan 70% dari total timbulan sampah jika tidak ada kebijakan pengurangan hingga tahun 2025.

2.2.3 Peraturan Pemerintah Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan ini menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merencanakan, mengelola, dan menyediakan fasilitas pengolahan sampah, termasuk tempat pembuangan sementara (TPS) dan TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang harus memenuhi kriteria teknis tertentu untuk mencegah pencemaran lingkungan. Peraturan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengumpulan dan pemilahan sampah. Dengan demikian, peraturan ini tidak hanya berfungsi sebagai kerangka hukum, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang bertujuan untuk menciptakan

lingkungan yang lebih bersih dan sehat, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali.

2.2.4 Peraturan Pemerintah Nomor No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Berdasarkan PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pemilahan dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit lima jenis sampah yang terdiri atas sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang dan sampah lainnya.

2.2.5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2019-2025

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2019 berfokus pada pengurangan timbulan sampah melalui pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Beberapa poin utama dari peraturan ini mencakup:

a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Ditekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, termasuk edukasi tentang pemilahan dan pengurangan sampah di sumbernya.

b. Pengembangan Infrastruktur

Peraturan ini mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang memadai untuk pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan sementara dan fasilitas daur ulang.

c. Kerjasama Antar Instansi

Diperlukan koordinasi antara berbagai instansi pemerintah dan pihak swasta untuk memastikan implementasi yang efektif dari strategi ini.

2.2.6 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020 merupakan landasan hukum utama dalam pengelolaan persampahan di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan guna mencegah timbulan sampah yang berlebihan serta mendukung pelestarian lingkungan. Tujuan utama dari Perda No. 2 Tahun 2020 meliputi :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah (3R).
2. Meminimalkan timbulan sampah di sumbernya.
3. Menyediakan fasilitas dan sistem pengelolaan sampah yang efektif.
4. Mendukung implementasi program persampahan berbasis komunitas.

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah meliputi:

- a. Pengurangan Sampah; dan
- b. Penanganan Sampah.

Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. Pembatasan timbulan Sampah;
- b. Pendauran ulang Sampah; dan/atau
- c. Pemanfaatan kembali Sampah.

Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. Pemilahan;
- b. Pengumpulan;
- c. Pengangkutan;
- d. Pengolahan; dan
- e. Pemrosesan Akhir Sampah.

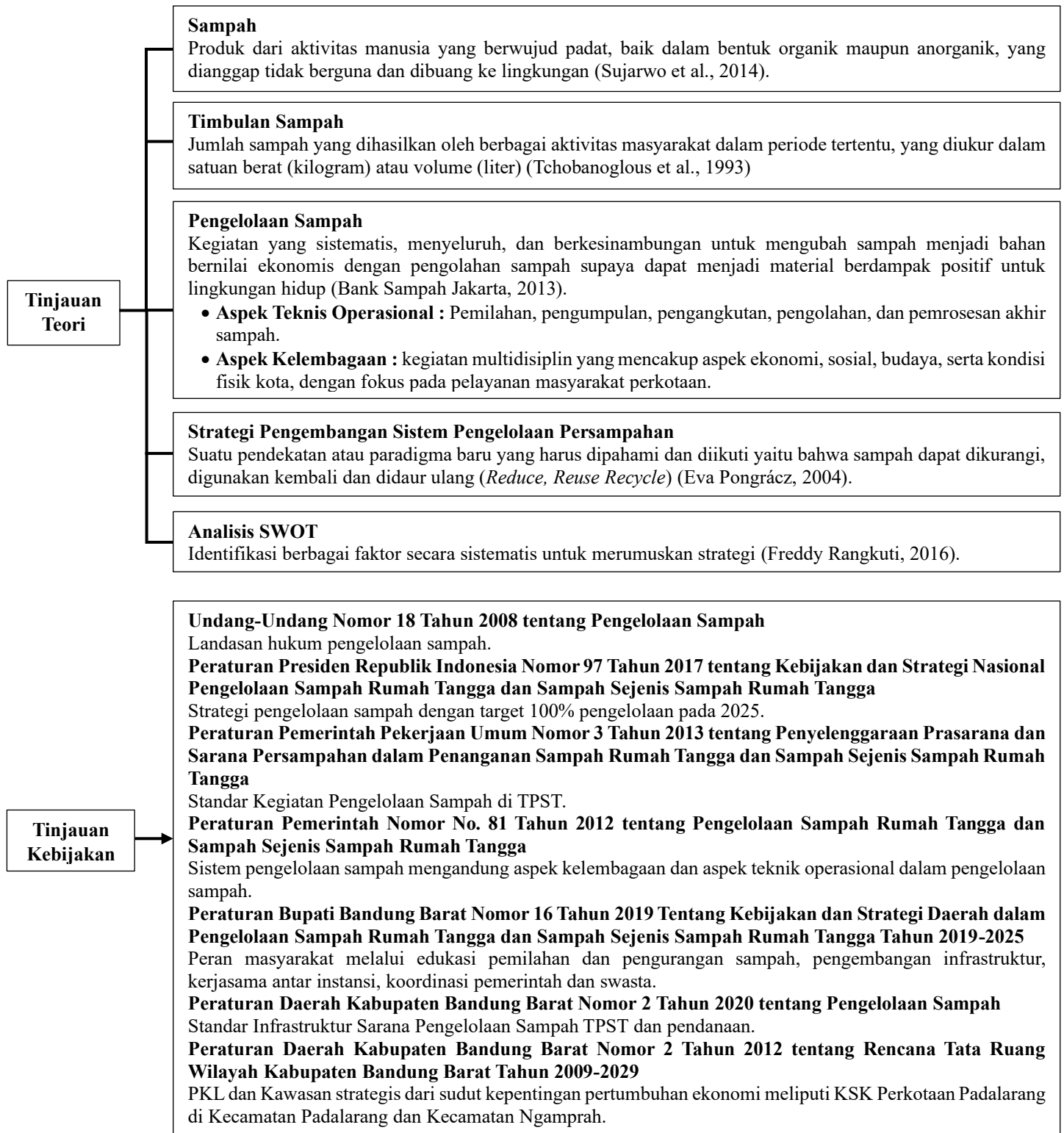
2.2.7 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029

Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL menurut PERDA Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Tertulis dalam peraturan ini bahwa PKL berada di Kecamatan Ngamprah dan Kecamatan Padalarang.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a salah satunya meliputi:

- a. KSK Perkotaan Padalarang meliputi:
 - a. Kecamatan Padalarang;
 - b. Kecamatan Ngamprah.

2.3 Kerangka Teori



Gambar II. 1 Kerangka Teori

2.4 Studi Terdahulu

Studi terdahulu berfungsi sebagai sumber referensi bagi peneliti dalam mencari ide-ide baru dan mendapatkan inspirasi yang dapat memperkaya penelitian yang sedang dilakukan. Dengan menganalisis hasil-hasil penelitian terdahulu, peneliti dapat memahami konteks dan perkembangan yang telah terjadi dalam bidang yang sama, serta mengidentifikasi kekurangan yang mungkin ada.

Tabel II. 1 Studi Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Tujuan	Metodologi	Variabel Penelitian	Kesimpulan	Perbedaan Studi Terdahulu dengan Peneliti
1	Strategi Pengelolaan Persampahan Dengan Program TPS 3R Di Kabupaten Bandung (Dayeuhkolot) Dinan Darmadi, Sadar Yuni Raharjo. (2023)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengelolaan Persampahan Dengan Program TPS 3R Di Kabupaten Bandung (Dayeuhkolot).	Peneliti melakukan penelitian dengan metode SWOT. Sampel yang digunakan yaitu masyarakat, petugas sampah dan intansi terkait	• Kondisi eksisiting pengelolaan persampahan • <i>Man</i> • <i>Money</i> • <i>Machine</i> • <i>Method</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan persampahan di Desa Dayeuhkolot memiliki strategi di kuadran IV, yang artinya pengelola lemah dan menghadapi tantangan besar. Oleh sebab itu untuk menanggulangi tantangan tersebut, diperlukannya strategi bertahan agar tidak semakin terperosok. Strategi tersebut berupa menyediakan TPS 3R agar dapat mengurangi sampah menjadi bermanfaat. Sehingga dapat memanfaatkan potensi timbulan sampah untuk di daur ulang menjadi sebuah produk yang bernilai tinggi, melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait pengelolaan sampah agar dapat mengoptimalkan mesin Smash dalam pengelolaan pengurangan sampah serta menyediakan	Perbedaan utama terletak pada cakupan wilayah penelitian (perkotaan dengan desa), fokus aspek yang diteliti (teknis operasional & kelembagaan vs 4M), serta pendekatan strategi yang lebih luas dalam penelitian dibandingkan solusi bertahan dalam studi terdahulu.

No	Judul dan Penulis	Tujuan	Metodologi	Variabel Penelitian	Kesimpulan	Perbedaan Studi Terdahulu dengan Peneliti
					pewadahan sampah yang sesuai dengan jenisnya.	
2	Transformasi Lingkungan dan Pengelolaan Persampahan di Kota Denpasar: Kajian Efektifitas Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Ketut Budha, Putu Ika Wahyuni, Putu Aryastana. (2023)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Desa Kesiman Kertalangu dalam menangani masalah persampahan dan dampaknya terhadap lingkungan di Kota Denpasar.	Populasi dalam penelitian ini berjumlah 77 orang yang merupakan pengelola TPST Desa Kesiman Kertalangu, dengan sampel sebanyak 30 orang yang diperoleh dengan metode deskriptif korelasional. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, studi dokumentasi, dan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan SWOT.	• Aspek teknis operasional • Kondisi infrastruktur • Tenaga operasional	Hasil menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur bangunan dan tenaga operasional pada TPST Desa Kesiman Kertalangu sudah sesuai dengan standar kebutuhan TPST, namun masih memunculkan permasalahan bau sampah yang menyengat. Selanjutnya, skema operasional pengelolaan sampah pada TPST Desa Kesiman Kertalangu yang terdiri dalam tujuh tahap telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Akhirnya, terdapat 14 strategi yang dapat digunakan untuk meminimalisir dampak lingkungan akibat pengelolaan sampah di TPST Desa Kesiman Kertalangu.	Perbedaan utama terletak pada cakupan wilayah yang lebih luas (perkotaan dengan desa), fokus aspek kelembagaan selain teknis operasional, serta pendekatan strategi berbasis target nasional dibandingkan optimalisasi operasional TPST.
3	Analisis Timbulan dan Komposisi Sampah Perumahan dan Non Perumahan Wilayah Kabupaten Kutai	Bertujuan untuk menganalisis timbulan dan komposisi sampah perumahan dan non-perumahan di Kabupaten Kutai	Perhitungan timbulan dan komposisi sampah dilakukan dengan menggunakan serangkaian persamaan berdasarkan metode SNI 19-3964-1994, mengacu pada hasil	•Timbulan Sampah •Komposisi Sampah •Jumlah Penduduk •Dampak Lingkungan	Hasil yang didapatkan ialah berat rata-rata timbulan sampah di Anggana per-jiwa sebesar 0,0573 kg/jiwa/hari serta volume rata-rata sebesar 0,00079 m ³ /jiwa/hari. Berdasarkan proyeksi potensi berat sampah per komposisi tahun 2021-2041 di wilayah Anggana, potensi berat sampah mengalami kenaikan,	Perbedaan utama terletak pada pendekatan yang digunakan, studi terdahulu lebih menitikberatkan pada analisis kuantitatif timbulan sampah dan proyeksinya untuk menentukan rekomendasi pengelolaan yang sesuai.

No	Judul dan Penulis	Tujuan	Metodologi	Variabel Penelitian	Kesimpulan	Perbedaan Studi Terdahulu dengan Peneliti
	Kartanegara (Studi Kasus: Kecamatan Anggana) M. Andrie Fahreza Rakhman, Muhammad Busyairi, Abdul Kahar. (2022)	Kartanegara, khususnya di Kecamatan Anggana sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan sampah, serta rekomendasi pengelolaan sampah yang tepat guna untuk dilakukan di Kecamatan Anggana.	pengukuran sampah yang dilakukan di lokasi sampling. Adapun perhitungan proyeksi penduduk dilakukan menggunakan serangkaian metode matematik dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3 Tahun 2013. Selanjutnya, dilakukan perhitungan proyeksi berat serta volume timbulan dan komposisi sampah bernilai. Mengacu pada Busyairi dkk, untuk menghitung proyeksi timbulan sampah dapat dilakukan dengan menggunakan Persamaan 1 dan 2 sebagai berikut. Proyeksi volume sampah = Jumlah total proyeksi penduduk x		dikarenakan setiap tahun adanya kenaikan jumlah jiwa. potensi sampah yang dominan adalah sampah anorganik. Pada tahun 2021 dengan jumlah jiwa 51.392 jiwa potensi sampah yang dihasilkan oleh sampah anorganik sebesar 1.381,014 kg/hari dan pada tahun 2041 dengan jumlah jiwa 114.488 jiwa potensi anorganik sebesar 3.076,541 kg/hari. Berdasarkan hal tersebut, rekomendasi pengelolaan persampahan yang tepat untuk Kecamatan Anggana ialah pembentukan bank sampah.	

No	Judul dan Penulis	Tujuan	Metodologi	Variabel Penelitian	Kesimpulan	Perbedaan Studi Terdahulu dengan Peneliti
			Volume timbulan sampah • Proyeksi berat sampah = Jumlah total proyeksi penduduk x Berat timbulan sampah.			
4	Edukasi Pengelolaan Dan Pemilahan Sampah Organik Dan Anorganik Di Desa Pecalongan Bondowoso Siti Indah Purwaning Yuwana, Mohammad Fuad Alfin Sayuti Adlan. (2021)	Beberapa permasalahan tentang sampah yang dihadapi di desa Pecalongan, dapat diketahui bahwa pokok masalah mitra pengabdian lebih pada minimnya pengetahuan tentang kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah serta fasilitas pendukung yang kurang, seperti tempat sampah. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini berusaha menanggulangi	Menggunakan metode edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan bantuan pendampingan penyediaan fasilitas tempat sampah, dengan melalui beberapa tahapan yaitu sosialisasi, perijinan, persiapan, pelaksanaan, pendampingan dan evaluasi.	•Aspek peran serta masyarakat •Infrastruktur Pengelolaan Sampah •Manfaat Ekonomi dari Pengolahan Sampah	Kesimpulan yang dapat dijelaskan dari keseluruhan hasil kegiatan pengabdian ini, antara lain : 1. Program pengabdian telah berjalan 100%, artinya semua tahap kegiatan kemitraan telah dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari tahap awal hingga tahap evaluasi sebagai tahap akhir. 2. Pemahaman masyarakat Pecalongan meningkat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya 3. Masyarakat Pecalongan memiliki pengetahuan baru, bagaimana memilah dan memilih sampah organik dan sampah anorganik 4. Ada pengetahuan baru bagi warga Pecalongan tentang bagaimana mengolah sampah tersebut menjadi sesuatu yang	Perbedaan utama terletak pada pendekatan dan cakupan penelitian, di mana peneliti menggunakan metode analisis strategis berbasis SWOT dalam konteks perkotaan, sementara studi terdahulu lebih bersifat implementatif dengan fokus pada perubahan perilaku masyarakat desa melalui edukasi dan pendampingan. Selain itu, peneliti mempertimbangkan aspek kelembagaan dan teknis operasional dalam pengelolaan sampah, sedangkan studi terdahulu lebih menyoroti peran serta masyarakat dan manfaat ekonomi dari pengolahan sampah.

No	Judul dan Penulis	Tujuan	Metodologi	Variabel Penelitian	Kesimpulan	Perbedaan Studi Terdahulu dengan Peneliti
		dengan cara melaksanakan kegiatan edukasi dan sosialisasi, serta bantuan penyediaan fasilitas tempat sampah yang sudah terpilah.			bernilai guna dan ekonomis, sehingga memicu mereka untuk lebih kreatif dan inovatif. 5. Warga masyarakat Pecalongan dapat mengetahui manfaat pengolahan sampah dengan cara 3R yaitu: <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> . Adanya kegiatan pengabdian ini mampu mengajak masyarakat lebih kreatif dan inovatif memanfaatkan sampah menjadi hal yang lebih berguna bagi penerus desa Pecalongan kedepannya.	
5	Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Vim Distrik Abepura Kota Jayapura Lazarus Ramandei. (2022)	1. Memperoleh gambaran proses perencanaan dan pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Vim, 2. Merumuskan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.	Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Sumber data pendukung yaitu berupa dokumen yang dapat berupa laporan, catatan serta bahan-bahan tertulis lainnya yang relevan dengan tema penelitian. Untuk menentukan jumlah	• Pengelolaan Sampah Rumah Tangga • Pemahaman Masyarakat tentang Konsep 3R • Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah • Pemberdayaan Masyarakat • Komposisi Sampah	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Vim Kota Jayapura belum optimal dilaksanakan, baik dalam pemilahan dan pengomposan, antara lain karena masih rendahnya pemahaman warga akan konsep 3R serta keterbatasan sarana dan prasarananya. Komposisi timbulan sampah di Kelurahan Vim Kota Jayapura terdiri dari: sampah organik 50,75%, plastik 17,14%, kertas 19,42%, dan kaca/logam 12,70%. Sampah organik dapat dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuat pupuk kompos dan	Studi terdahulu lebih menekankan faktor sosial dan kesadaran warga dalam pengelolaan sampah, sementara peneliti lebih menitikberatkan pada strategi pengelolaan yang berkelanjutan dalam lingkup perkotaan melalui analisis kelembagaan dan operasional. Selain itu, peneliti berorientasi pada pencapaian target dalam pengelolaan sampah, sedangkan studi terdahulu berfokus pada kondisi spesifik Kelurahan Vim dan memberikan rekomendasi berbasis perubahan pola pikir masyarakat.

No	Judul dan Penulis	Tujuan	Metodologi	Variabel Penelitian	Kesimpulan	Perbedaan Studi Terdahulu dengan Peneliti
			populasi dan sampling digunakan <i>Rumus Slovin</i> dan diperoleh jumlah sampel sebanyak 32 orang dari beberapa RW/RT di Kelurahan Vim. Penelitian ini menggunakan logika induktif abstraktif yaitu melakukan pendekatan analisis yang menggunakan sudut pandang peneliti sebagai <i>tool</i> analisis utama.		sampah jenis lainnya dapat dijual atau dikelola sehingga dapat menambah pendapatan. Disarankan agar pemerintah perlu lebih banyak mengadakan sosialisasi tentang pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>) untuk membenahi terlebih dahulu paradigma berpikir masyarakat terhadap sampah.	
6	Arahan Pengelolaan Persampahan di Kota Pare-Pare (Studi Kasus: Kecamatan Bacukiki Barat) Andi Heydi Maharani Bachmid, Kamran Aksa, Rimba Arief, Arista Asrib. (2023)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berpengaruh serta arahan operasional dalam pengelolaan persampahan di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare-Pare.	Metode analisis kolerasi untuk mengetahui ada tidaknya hubungan linear antar <i>variable</i> selanjutnya dilakukan analisis deskriptif kualitatif untuk memberikan arahan pengelolaan operasional persampahan.	•Pewadahan •Pengumpulan •Pengangkutan •Pembuangan akhir •Aspek teknis operasional.	Berdasarkan hasil analisis kolerasi dimana faktor penyebab tidak optimalnya persampahan yaitu pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir sehingga arahan sistem operasional persampahan yaitu terhadap pewadahan dilakukan pengelompokan sampah dan sarana pemilihan sehingga dibedakan menggunakan label berwarna serta wadah tertutup serta penyediaan TPS dan TPST pada wilayah permukiman dan dilakukan penyediaan bank sampah untuk pengelolaan 3R.	Perbedaan utama terletak pada pendekatan strategi berbasis kelembagaan dan teknis operasional untuk mencapai target, sementara studi terdahulu lebih menitikberatkan pada perbaikan sistem operasional persampahan berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh.

No	Judul dan Penulis	Tujuan	Metodologi	Variabel Penelitian	Kesimpulan	Perbedaan Studi Terdahulu dengan Peneliti
7	Strategi Pengelolaan Sampah di Kelurahan Pamak Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Ivan Tofani, Tiuridah Silitonga, Yurika Afrianita, Tesiherdawati. (2022)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengelolaan sampah yang tepat di Kelurahan Pamak Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun yaitu dengan melihat dari faktor internal maupun eksternal.	Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	• Aspek peran serta masyarakat • Kondisi pengelolaan persampahan • Infrastruktur pengelolaan persampahan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan (<i>strength</i>) yang dimiliki yaitu adanya Sumber Daya Manusia yang cukup. Kelemahannya yaitu kurangnya infrastruktur pendukung seperti Tempat Pembuangan Sementara maupun bak sampah. Peluang yang dimiliki yaitu Adanya dukungan dari pihak swasta maupun pemerintah dalam mengelola sampah di Kelurahan Pamak dan ancaman yang dimiliki yaitu Perubahan tata ruang yang merupakan adanya komitmen bersama pemerintah daerah dengan keterbatasan tanah untuk pembuangan sampah.	Perbedaan utama terletak pada cakupan wilayah, aspek yang diteliti, serta pendekatan metodologi. Hasil penelitian terdahulu lebih menekankan pada keterbatasan infrastruktur dan dukungan eksternal, sedangkan peneliti lebih menyoroti strategi pengelolaan sampah secara menyeluruh sesuai target.
8	Strategi Pengelolaan Sampah di Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen Musfira dan Joko Purcahyono. (2023)	Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian strategi pengelolaan sampah di Distrik Yapen Selatan.	Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif serta menggunakan metode analisis deskriptif dan metode SWOT. Data primer diperoleh melalui observasi di lapangan dan wawancara dengan pihak terkait. Data sekunder terdiri dari informasi demografi,	• Kondisi pengelolaan persampahan • Aspek teknis operasional	Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengoptimalkan layanan persampahan perlu didukung dengan strategi pengelolaan sampah yang fokus pada perkuatan faktor internal seperti: penambahan jumlah fasilitas TPS, sosialisasi dampak membuang sampah sembarangan dan manfaat retribusi kebersihan bagi keberlanjutan penyelenggaraan pengelolaan persampahan di kota, dan sosialisasi konsep pengolahan dan pengurangan sampah, yang juga	

No	Judul dan Penulis	Tujuan	Metodologi	Variabel Penelitian	Kesimpulan	Perbedaan Studi Terdahulu dengan Peneliti
			infrastruktur, dan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan sampah di daerah studi.		dapat memberikan nilai ekonomi kepada masyarakat.	
9	Analisa Permasalahan Pengelolaan Persampahan di Kota Mataram dengan Pendekatan DPSIR : Studi Kasus TPS Bintaro. Lalu Septiya Fahmi Rezi, Lulu Luciana Putri, Abdul Azizul Ghaffar, Nazer Akbar, Joni Safaat Adiansyah. (2024)	Tujuan dari penelitian ini mencoba mengidentifikasi secara lebih rinci lagi terkait permasalahan sampah yang ada di TPS Bintaro saat ini dengan menggunakan metode pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan <i>Driver-Pressure-State-Impact-Response</i> (DPSIR).	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Pengambilan data peneliti melalui pengamatan langsung di lapangan di Kecamatan Ampenan dengan cara mengobservasi kondisi lapangan secara visual dan melakukan wawancara dengan narasumber yang berada di Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) Bintaro. Analisis data menggunakan pendekatan <i>Driver-Pressure-State-Impact-Response</i> (DPSIR).	• Kondisi pengelolaan persampahan • Infrastruktur pengelolaan persampahan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sampah di TPS Bintaro menunjukkan dampak signifikan terhadap lingkungan. Keterbatasan sarana, anggaran, lahan, dan standar pengelolaan menyebabkan penumpukan sampah dan pencemaran. Diperlukan peningkatan infrastruktur, alokasi anggaran memadai, pembaruan tata ruang, dan penerapan standar pengelolaan sampah yang komprehensif.	Perbedaan utama terletak pada pendekatan analisis yang digunakan, cakupan penelitian, serta rekomendasi solusi, di mana peneliti menekankan strategi pengelolaan berbasis kelembagaan dan operasional, sementara studi terdahulu lebih menyoroti kebutuhan peningkatan infrastruktur dan standar pengelolaan.
10	Evaluasi Aspek Teknis Operasional	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui laju	Metode yang digunakan untuk mengukur timbulan	• Aspek teknis operasional	Hasil penelitian yang didapat timbulan sampah di Kecamatan Putussibau Utara dengan jumlah	Peneliti lebih berfokus pada strategi pengelolaan berbasis SWOT, sedangkan studi

No	Judul dan Penulis	Tujuan	Metodologi	Variabel Penelitian	Kesimpulan	Perbedaan Studi Terdahulu dengan Peneliti
	Pengelolaan Persampahan di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu. Meideristi Eka Suciutami, Arifin, Robby Irsan, Rizki Purnaini, Y Fitrianiingsih. (2022)	timbulan sampah serta komposisi sampah dan mengevaluasi aspek teknis operasional pengelolaan persampahan di Kecamatan Putussibau Utara.	sampah adalah pengukuran langsung dari 25 sampel perumahan dan 13 sampel non-perumahan dan komposisi sampah berdasarkan SNI 19-3964-1994 selama 8 hari, sedangkan evaluasi aspek teknis operasional dilakukan dengan observasi secara langsung serta wawancara pada key persondi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu dan dianalisis menggunakan metode <i>checklist</i> pada tabel yang telah dibuat dan evaluasi mengacu pada Permen PU No. 3/PRT/M/2013.	• Timbulan sampah • Komposisi sampah	penduduk 26,388 Jiwa sebesar 1,57 l/orang/hari dan timbulan sampah total kecamatan yaitu 41.607 m3/hari, sedangkan komposisi sampah organik berupa sampah sisa makanan dan daun-daun sebanyak 48% dan total anorganik dari berbagai macam komposisi sebanyak 52% yang besaran sampahnya didominasi oleh sampah plastik dan kertas yang dihasilkan oleh sumber perkantoran, pasar, dan toko, berdasarkan komposisi sampah dapat dihitung analisis pewadahan sampah organik dan anorganik dengan kapasitas wadah yang didapatkan masing-masing 3 liter. Berdasarkan timbulan sampah yang telah dihitung dapat dilakukan analisis estimasi timbulan sampah pada tahun mendatang yaitu sebesar 46.987 m3/hari, analisis kebutuhan kontainer dengan jumlah kontainer yang dibutuhkan sebanyak 2 unit dan alat angkut sebanyak 1 unit dengan proyeksi 5 tahun yaitu selama tahun 2020-2024. Pengelolaan sampah yang dihadapi adalah tingkat pelayanan yang masih rendah, sarana prasarana teknis operasional yang kurang memadai serta rendahnya peran serta	terdahulu lebih bersifat deskriptif dan kuantitatif dalam mengukur karakteristik timbulan sampah dan kebutuhan sarana prasarana pengelolaan. Selain itu, peneliti mengaitkan hasil analisis dengan kebijakan nasional, sementara studi terdahulu lebih fokus pada kondisi eksisting dan proyeksi kebutuhan di tingkat lokal.

No	Judul dan Penulis	Tujuan	Metodologi	Variabel Penelitian	Kesimpulan	Perbedaan Studi Terdahulu dengan Peneliti
					masyarakat dalam praktik minimasi dan pemanfaatan sampah.	
11	Strategi Pengelolaan Sampah di TPA Lubuk Terentang: Tinjauan Analisis SWOT Muliyadi, Fuad Muchlis, Hutwan Syarifuddin. (2023)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengelolaan sampah yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup di TPA Lubuk Terentang, Desa Lubuk Terentang Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Seksi Pengelolaan sampah dan Limbah B3, Bupati/Wakil Bupati, Bappeda, dan warga sekitar yang dijadikan sebagai informan penelitian. Wawancara dan dokumentasi digunakan dalam perolehan data dan informasi. Dengan mempertimbangkan semua karakteristik internal dan eksternal yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, maka teknik analisis data menggunakan analisis SWOT.	• Kondisi pengelolaan persampahan • Aspek teknis operasional	Berdasarkan hasil analisis SWOT, TPA Lubuk Terentang berada pada kuadran ketiga (negatif, positif) posisi ini menunjukkan kelemahan dan peluang memiliki nilai negatif dan positif artinya TPA dalam pengelolaannya menghadapi peluang sangat besar, tetapi dilain pihak TPA menghadapi beberapa kendala atau kelamahan internal. Fokus strategi pengelolaan sampah di TPA adalah meminimalkan masalah-masalah internal TPA sehingga dapat merebut peluang yang besar atau sering disebut <i>turn around strategy</i> , dari strategi ini dapat diperoleh dua strategi alternatif yaitu: pertama, pengadaan dan perbaikan sarana, dan kedua peningkatan kemampuan pembiayaan investasi operasional dan pemeliharaan sampah.	Peneliti lebih menekankan pada pengurangan timbulan sampah sesuai target, sedangkan studi terdahulu lebih menyoroti optimalisasi pengelolaan TPA.

No	Judul dan Penulis	Tujuan	Metodologi	Variabel Penelitian	Kesimpulan	Perbedaan Studi Terdahulu dengan Peneliti
12	Kajian Peran Bank Sampah Sebagai Konsep Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Pada Tipologi Perumahan Sederhana Di Kota Tangerang Selatan. (Studi Kasus : Bank Sampah Kresna 018, Bank Sampah Wijaya Kusuma 06 Dan Bank Sampah Lentera Peduli, Kecamatan Pamulang) Dhyta Rizkylia Sugiarto. (2023)	Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui peran, pelayanan dan pengelolaan bank sampah sebagai konsep pengelolaan sampah berkelanjutan pada tipologi perumahan sederhana di Kota Tangerang Selatan. (Studi kasus: Bank Sampah Kresna 018, Bank Sampah Wijaya Kusuma 06 dan Bank Sampah Lentera Peduli, Kecamatan Pamulang); 2. Untuk mengetahui sumber, jenis dan timbulan sampah yang dikelola oleh bank sampah di	Metode penelitian menggunakan analisis statistik deskriptif. Data primer dan sekunder diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara, kuesioner, studi pustaka dan dokumentasi.	• Kondisi pengelolaan persampahan • Sumber sampah • Jenis sampah • Timbulan sampah	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 1) Responden bersetuju bahwa bank sampah memberikan peran manfaat dalam pengelolaan sampah perumahan. 2) Responden menyatakan pelayanan bank sampah berupa penjemputan, pelayanan pembayaran dan pelayanan pendampingan cukup baik dan sangat baik. 3) Responden menyatakan viii pengelolaan sampah di bank sampah berupa pengumpulan, pemilahan, pengolahan dan pengangkutan cukup baik dan sangat baik. 4) Ketiga bank sampah berhasil mengelola timbulan sampah sebesar 4.758,23 kg dalam satu bulan pada bulan Juni 2022 atau reduksi sampah rata-rata sebesar 0,10 kg/orang/hari (16.94%). Strategi pengembangan bank sampah dirumuskan dalam analisis SWOT.	Peneliti berfokus pada strategi pengelolaan secara luas di tingkat perkotaan, sedangkan studi terdahulu lebih spesifik pada efektivitas bank sampah dalam lingkungan perumahan sederhana. Selain itu, peneliti menggunakan analisis SWOT untuk menentukan strategi pengelolaan secara menyeluruh, sementara studi terdahulu menggunakannya untuk mengembangkan strategi penguatan bank sampah dalam konteks pengurangan timbulan sampah.

No	Judul dan Penulis	Tujuan	Metodologi	Variabel Penelitian	Kesimpulan	Perbedaan Studi Terdahulu dengan Peneliti
		Kecamatan Pamulang; dan 3. Menyusun strategi pengembangan bank sampah untuk dapat mereduksi timbulan sampah di Kota Tangerang Selatan.				
13	Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat sebagai Upaya Mewujudkan Kota Layak Huni di Kelurahan Bulusan Tembalang Semarang. Santy Paulla Dewi, Nurini, Diah Intan Kusumo Dewi, Grandy Lorenessa Wungo. (2022)	Tujuan diseminasi ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat hingga pada akhirnya menyadari pentingnya turut berperan dalam implementasinya.	Metode yang digunakan pada kegiatan ini mengidentifikasi potensi dan masalah pengelolaan sampah di Bulusan, identifikasi karakteristik masyarakat, menganalisis pengelolaan sampah eksisting, yang selanjutnya dihasilkan beberapa arahan pengelolaan sampah dalam konteks kota layak huni. Proses pengumpulan data dilakukan melalui	• Kondisi pengelolaan persampahan • Aspek peran serta masyarakat	<i>Output</i> pengabdian masyarakat ini adalah strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat dalam kerangka konsep kota layak huni berdasarkan pembelajaran dari best practice serta teori yang relevan melalui pelibatan mahasiswa, pemilik kos, dan masyarakat dalam pemilahan sampah, peran pemerintah dalam menjembatani dengan pengepul sampah. <i>Output</i> dari pengabdian masyarakat ini adalah adanya komitmen dari pemilik kos untuk menyediakan tempat sampah yang berbeda sesuai dengan jenisnya.	Perbedaan utama terletak pada pendekatan dan tujuan penelitian, di mana peneliti lebih bersifat strategis dengan analisis kebijakan dan kelembagaan, sementara studi terdahulu lebih bersifat implementatif dengan fokus pada perubahan perilaku masyarakat menuju konsep kota layak huni.

No	Judul dan Penulis	Tujuan	Metodologi	Variabel Penelitian	Kesimpulan	Perbedaan Studi Terdahulu dengan Peneliti
			wawancara dan observasi lapangan.			
14	Analisis Strategi Pengelolaan Sampah Kota Yogyakarta Melalui Analisis SWOT dan Cost Benefit Analysis Potensi Penjualan RDF. Muhammad Misbakhul Arzaq. (2024)	Pada penelitian ini ditujukan mengenai analisis strategi pengelolaan sampah Kota Yogyakarta.	Penelitian ini menggunakan metode SWOT (<i>Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats</i>) yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal. Serta analisis kelayakan finansial dengan metode BCR (<i>Benefit Cost Ratio</i>) dari potensi penjualan RDF (<i>Refuse Derived Fuel</i>).	• Aspek teknis operasional • Aspek hukum • Aspek kelembagaan • Aspek pembiayaan • Aspek peran serta masyarakat	Berdasarkan hasil analisis SWOT, dengan perumusan strategi atau tahapan pencocokan (<i>matching stage</i>). Hasil yang didapatkan memberikan sebelas rumusan strategi untuk mendukung keberhasilan strategi pengelolaan sampah Kota Yogyakarta. Sedangkan hasil analisis BCR yang didapat dari tiga alternatif skenario menunjukkan nilai BCR pada skenario 1 (1,18), skenario 2 (0,26), dan skenario 3 (0,19). Sehingga skenario 1 layak secara finansial untuk dijalankan karena benefit yang didapatkan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan.	Perbedaan utama terletak pada pendekatan yang digunakan dalam studi terdahulu, yang menilai efektivitas strategi berdasarkan keuntungan ekonomi, sedangkan peneliti lebih berfokus pada aspek operasional dan kelembagaan.
15	Perencanaan Teknis Operasional Pengelolaan Sampah di Permukiman Padat Penduduk (Kelurahan Kota Bambu Selatan) Mayang Nuur Ervani, Dwi	Tujuan dari perencanaan ini adalah untuk merencanakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan efisien melalui konsep 3R (<i>Reuse, Reduce, Recycle</i>) di wilayah	Metode yang dilakukan berdasarkan SNI 19-3964- 1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan.	• Sumber sampah • Timbulan sampah • Komposisi sampah • Aspek teknis operasional • Aspek kelembagaan • Aspek peran serta masyarakat	Perencanaan pengelolaan sampah yang meliputi pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengolahan, dan pengangkutan akhir akan direncanakan selama 20 tahun (2020-2040) melalui tiga tahap perencanaan. Jumlah timbulan sampah yang dihasilkan di Kelurahan Kota Bambu Selatan berdasarkan haasil sampling ada sebanyak 152 liter/hari dengan laju timbulan sampah sebesar 1,5 liter/orang/hari. Komposisi sampah	Perbedaan utama terletak pada pendekatan penelitian, di mana peneliti lebih berfokus pada strategi implementatif berdasarkan SWOT, sementara studi terdahulu lebih bersifat perencanaan jangka panjang dengan fokus utama pada pengurangan di sumber dan optimalisasi TPS 3R serta bank sampah. Selain itu, peneliti menyoroti aspek teknis operasional dan aspek

No	Judul dan Penulis	Tujuan	Metodologi	Variabel Penelitian	Kesimpulan	Perbedaan Studi Terdahulu dengan Peneliti
	Indrawati, Pramianti Purwaningrum. (2021)	permukiman padat penduduk.			terdiri dari 64,97% organik dan 35,03% non organik. Potensi reduksi sampah yang direncanakan adalah sebesar 70% dengan target jumlah sampah masuk ke TPST sebesar 30%. Komponen utama dalam perencanaan berbasis 3R ini adalah pengurangan sampah di sumber dan peningkatan potensi reduksi sampah melalui bank sampah dan TPS 3R.	kelembagaan sebagai faktor penting dalam keberlanjutan strategi pengelolaan, sedangkan studi terdahulu lebih berfokus pada aspek teknis dan partisipasi masyarakat.

Sumber : Hasil Identifikasi 2024

2.5 Variabel Penelitian

Variabel dapat diartikan ciri dari individu, objek, gejala, peristiwa yang dapat diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif. Variabel dipakai dalam proses identifikasi, ditentukan berdasarkan kajian teori yang dipakai. Semakin sederhana suatu rancangan penelitian semakin sedikit variabel penelitian yang digunakan (Aristian, 2017).

Tabel II. 2 Variabel Penelitian Studi Terdahulu

Variabel Penelitian	Sumber Studi Terdahulu														
	Jurnal 1	Jurnal 2	Jurnal 3	Jurnal 4	Jurnal 5	Jurnal 6	Jurnal 7	Jurnal 8	Jurnal 9	Jurnal 10	Jurnal 11	Jurnal 12	Jurnal 13	Jurnal 14	Jurnal 15
Kondisi pengelolaan persampahan	✓						✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓
Aspek teknis operasional		✓				✓		✓		✓	✓			✓	✓
Aspek peran serta masyarakat				✓			✓						✓	✓	✓
Infrastruktur pengelolaan sampah		✓		✓	✓				✓						
Aspek hukum														✓	
Aspek kelembagaan														✓	✓
Aspek pembiayaan														✓	

Sumber : Hasil Peneliti, 2024

Penentuan variabel dilakukan sebagai acuan dalam pengumpulan data dan informasi guna memenuhi kebutuhan data penelitian yang akan dilakukan baik dengan cara sekunder maupun primer. Berdasarkan Tabel II. 2 Variabel Penelitian Studi Terdahulu, bahwasannya peneliti akan mengambil variabel penelitian meliputi variabel :

Tabel II. 3 Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Parameter	Sumber
Kondisi pengelolaan persampahan	Kebijakan dan regulasi	Keberadaan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah	• Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2019-2025 • Desi Natalia Baru, Roosje J. Poluan dan Ingerid L. Moniaga, 2019
	Peran masyarakat	Peran masyarakat dalam kegiatan pengurangan dan penanganan sampah	
	Pendanaan dan anggaran	Alokasi dana untuk pengelolaan sampah	
Aspek teknis operasional	Pemilahan Sampah	Kinerja pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga • Muhammad Misbakhul Arzaq, 2024 • Nur Indah Listriyani, 2018
	Pengumpulan Sampah		
	Pengangkutan Sampah		
	Pengolahan Sampah		
	Pemrosesan Akhir Sampah		
Aspek kelembagaan	Lembaga atau organisasi yang mengelola sampah	Adanya lembaga resmi yang menangani pengelolaan sampah	• Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah • Djatmiko Winahyu, Sri Hartoyo, dan Yusman Syaukat, 2013
	Pola penyelenggaraan pengelolaan, internal (dilingkungan Dinas) atau eksternal (antar instansi dan atau dengan pihak masyarakat)		
	Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam pengelolaan sampah	Tercukupinya kebutuhan atau ketersediaan tenaga kerja	
Infrastruktur pengelolaan persampahan	Tempat sampah yang menggunakan warna berbeda dengan lima jenis sampah yaitu B3, <i>reuse</i> , <i>recycle</i> , organik dan non organik	Keberadaan infrastruktur pengelolaan persampahan di eksisting Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah	• Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah • Desi Natalia Baru, Roosje J. Poluan dan Ingerid L. Moniaga, 2019
	TPS, TPS 3R, dan/atau alat pengumpul untuk sampah terpilah		
	Alat angkut sampah		
	Fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa TPS, TPS 3R, stasiun peralihan antara, TPA, dan/atau TPST		

Sumber : Hasil Identifikasi 2024

BAB III

METODOLOGI

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2011). Penelitian merupakan proses yaitu langkah-langkah yang dilakukan secara berencana dan sistematis karena berguna untuk mendapatkan suatu pemecahan masalah dan jawaban atas pertanyaan. Dalam melakukan penelitian, metode merupakan, salah satu bagian yang mutlak dan sangat penting. Penggunaan metode yang dimaksudkan agar sasaran dari hasil penelitian yang ingin dicapai dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Metode penelitian dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu, metode pendekatan, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

3.1.1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan pada sasaran pertama, melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan para ahli, untuk menilai kondisi pengelolaan sampah berdasarkan dua aspek utama, yaitu aspek teknis operasional dan kelembagaan. Penilaian ini dilakukan untuk mengukur skor faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengelolaan sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah. Selanjutnya, pendekatan kuantitatif diterapkan pada tahap kedua untuk menganalisis hasil data dari tahap pertama. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui posisi kuadran pengelolaan sampah pada kurva SWOT.

3.1.2 Metode Pengumpulan Data

Jenis dan sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data diantaranya:

1. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer menggunakan data yang diperoleh berdasarkan observasi lapangan dan wawancara untuk kebutuhan analisis.

A. Observasi Lapangan

Observasi lapangan adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati keadaan kondisi eksisting lokasi yang dikaji secara langsung. Dimana terdapat point observasi yang meliputi observasi mengenai kondisi pengelolaan persampahan yang diteliti dengan metode visualisasi yaitu menggunakan teknik dokumentasi foto.

Pada identifikasi ini observasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Bandung Barat, serta untuk mengevaluasi pengelolaan persampahan berdasarkan aspek menurut Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yaitu aspek teknik operasional dan aspek kelembagaan.

Tabel III. 1 Teknik Observasi

Poin Observasi		Teknik Observasi	Alat yang Dibutuhkan
Kegiatan			
Pemilahan Sampah	Kegiatan pengelompokan sampah paling sedikit lima jenis (Sampah B3, Sampah Organik, Sampah Non-organik, Sampah Reuse, Sampah Recycle)	Dokumentasi foto	Kamera, Alat Tulis
Pengumpulan Sampah	Metode pengumpulan baik komunal maupun individual	Dokumentasi foto	Kamera, Alat Tulis
Pengangkutan Sampah	Pengangkutan harus memaksimalkan kapasitas kendaraan angkut yang digunakan	Dokumentasi foto	Kamera, Alat Tulis
Pengolahan Sampah	Kegiatan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, daur ulang energi	Dokumentasi foto	Kamera, Alat Tulis
Fasilitas pengolahan sampah di wilayah permukiman	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Dokumentasi foto	Kamera, Alat Tulis
	Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (TPS 3R)	Dokumentasi foto	Kamera, Alat Tulis
	Stasiun peralihan antara	Dokumentasi foto	Kamera, Alat Tulis
	Bank Sampah	Dokumentasi foto	Kamera, Alat Tulis

Poin Observasi		Teknik Observasi	Alat yang Dibutuhkan
	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	Dokumentasi foto	Kamera, Alat Tulis
	Fasilitas truk pengangkut sampah	Dokumentasi foto	Kamera, Alat Tulis
Teknologi dan inovasi terbaru untuk mengolah sampah rumah tangga		Dokumentasi foto	Kamera, Alat Tulis
Ketersediaan tenaga ahli atau petugas untuk mengelola sampah		Dokumentasi foto	Kamera, Alat Tulis
Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah		Dokumentasi foto	Kamera, Alat Tulis

Sumber : Hasil Identifikasi 2024

B. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei berupa pemberian pertanyaan secara lisan kepada responden atau pihak terkait untuk memvalidasi variabel penelitian berdasarkan aspek teknis operasional dan kelembagaan. Dalam pengumpulan data melalui wawancara, penelitian ini menggunakan metode triangulasi narasumber, yaitu dengan mewawancarai beberapa pihak yang berbeda, seperti kepala bidang Dinas Lingkungan Hidup, kepala bidang Bappelitbangda, dan Camat yang mengetahui kondisi persampahan. Dengan menggunakan pendekatan triangulasi ini, hasil wawancara dapat dibandingkan dan dikonfirmasi satu sama lain, sehingga informasi yang diperoleh lebih kuat sebagai dasar penyusunan strategi pengelolaan sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah.

Tabel III. 2 Wawancara

No	Narasumber	Kriteria Narasumber	Topik Wawancara	
1	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Bidang terkait atau yang mewakili dan mengetahui kondisi persampahan di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah	Aspek Teknis Operasional	- Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah - Mekanisme pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir
			Aspek Kelembagaan	Kerjasama dengan pihak pemerintah daerah dalam mengelola sampah

No	Narasumber	Kriteria Narasumber	Topik Wawancara	
				• Teknologi dan inovasi terbaru untuk mengolah sampah rumah tangga • Tenaga ahli atau petugas yang terlatih untuk mengelola sampah • Sumber pembiayaan dan alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah • Kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan sampah • Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
2	BAPPELITBANGDA (Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah)	Kepala Bidang terkait atau yang mewakili dan mengetahui kondisi persampahan di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah	Aspek Kelembagaan	• Teknologi dan inovasi terbaru untuk mengolah sampah rumah tangga • Sumber pembiayaan dan alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah
3	Camat	Kepala Bidang terkait atau yang mewakili dan mengetahui kondisi persampahan di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah	Aspek Teknis Operasional Aspek Kelembagaan	• Kondisi persampahan dan pola pengumpulan sampah di kecamatan • Program yang melibatkan masyarakat di tingkat kecamatan • Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah

Sumber : Hasil Identifikasi 2024

C. Kuesioner

Pengumpulan data melalui kuesioner dilakukan untuk memperoleh penilaian terhadap tingkat kepentingan serta pengaruh kondisi aktual dari berbagai faktor internal dan eksternal yang telah dianalisis sebelumnya. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan bobot dan rating pada matriks IFAS dan EFAS, yang menjadi dasar dalam penyusunan strategi pengelolaan sampah di wilayah perkotaan Kabupaten Bandung Barat. Pemilihan responden ini dilakukan secara *purposive*, dengan

mempertimbangkan kriteria dimana dinilai memiliki pemahaman yang mendalam terhadap kondisi lapangan. Total responden berjumlah 7 dan berasal dari instansi Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Bappelitbangda, serta Kantor Kecamatan Ngamprah dan Kantor Kecamatan Padalarang. Penilaian bobot dan rating adalah sebagai berikut :

Tabel III. 3 Penilaian Bobot dan Rating

BOBOT : TINGKAT KEPENTINGAN FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL		NILAI		NILAI	
		Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
1	Tidak penting	1	1	1	1
2	Kurang penting	2	2	2	2
3	Cukup penting	3	3	3	3
4	Penting	4	4	4	4
5	Sangat Penting	5	5	5	5
Total bobot harus 1 atau 100%					
Cara menghitung :					
1	Jumlahkan total nilai bobot, misalnya berjumlah = 12				
2	Hitung rata-rata bobot dari masing-masing nilai, misalnya untuk faktor pertama 1 responden memilih nilai 4, dan 6 responden memilih nilai 5. Maka,				
	$\frac{\text{Jumlah Penilaian Responden}}{\text{Jumlah Responden}} = \frac{(4 \times 1) + (5 \times 6)}{7} = \frac{4 + 30}{7} = 4,9 = 5$				
RATING : DAMPAK FAKTOR DI KONDISI FAKTUAL		NILAI		NILAI	
		Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
1	Tidak Berdampak/Tidak Signifikan	1	4	1	4
2	Kurang Berdampak/Kurang Signifikan	2	3	2	3
3	Berdampak/Signifikan	3	2	3	2
4	Sangat Berdampak/Sangat Signifikan	4	1	4	1

Sumber : Diadaptasi dari Rangkuti, 2010

2. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder merupakan studi pendahuluan untuk mengetahui gambaran awal mengenai wilayah yang akan direncanakan. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan memperoleh data-data berupa dokumen tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen-dokumen tersebut dapat diperoleh dari dinas maupun instansi-instansi yang terkait.

Tabel III. 4 Kebutuhan Data Sekunder

No	Instansi	Sumber Data	Data yang Dibutuhkan	Bentuk Data	Tahun yang Diambil
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	RTRW Kabupaten Bandung Barat	Data sektor persampahan Kabupaten Bandung Barat	Dokumen	Data Terbaru
2		RENSTRA		Dokumen	

No	Instansi	Sumber Data	Data yang Dibutuhkan	Bentuk Data	Tahun yang Diambil
	Dinas Lingkungan Hidup	Peraturan Daerah	- Perencanaan strategis - Kebijakan pengelolaan persampahan		Data Terbaru
		Masterplan pengelolaan persampahan KBB			
		Laporan Pengelolaan Sampah	Data sumber sampah		10 tahun terakhir
			Data timbunan sampah		
			Data komposisi sampah		Data Terbaru
			Data jumlah dan kondisi fasilitas pengelolaan sampah (TPA, TPS, TPS3R, dll.)		
3	BAPPELITBANGDA (Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah)	RPJMD	Data anggaran untuk program pengelolaan sampah	Dokumen	Data Terbaru
			Evaluasi kinerja program pengelolaan sampah.		

Sumber : Hasil Identifikasi 2024

3.1.3 Metode Analisis

3.1.3.1 Identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal pengelolaan persampahan dalam aspek teknis operasional dan kelembagaan di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah

A. Identifikasi Faktor Internal

Analisis ini akan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2012, mengenai aspek teknis operasional yang meliputi sistem pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Proses analisis dilakukan dengan observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan para ahli terhadap kondisi pengelolaan persampahan di lapangan untuk memenuhi kebutuhan data primer. Serta data sekunder diperoleh dari instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, BAPPELITBANGDA, Kantor Kecamatan, serta laporan-laporan operasional lain yang ada. Kemudian potensi dan masalah digunakan

sebagai mengukur skoring untuk memenuhi faktor internal berdasarkan aspek teknik operasional persampahan di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah.

Indikator utama yang dianalisis meliputi kegiatan teknis, ketersediaan fasilitas, sumber daya manusia, serta perhitungan kebutuhan fasilitas persampahan.

1. Kegiatan Teknis Operasional

- Pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

2. Fasilitas Pemilahan dan Pengolahan

- Tempat pemilahan berdasarkan jenis sampah.
- Fasilitas pengolahan seperti TPS, TPS3R, TPST, TPA, serta armada truk pengangkut.

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

- Ketersediaan tenaga kerja untuk mendukung operasional persampahan.

4. Perhitungan Kebutuhan Fasilitas Persampahan

- Perhitungan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sarana dan prasarana yang ada mampu melayani timbulan sampah serta untuk mengidentifikasi gap antara kondisi eksisting dan kebutuhan ideal.

Analisis kebutuhan fasilitas persampahan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sarana dan prasarana yang ada mampu melayani jumlah timbulan sampah di wilayah penelitian, serta untuk mengidentifikasi selisih antara kondisi eksisting dan kebutuhan ideal. Perhitungan kebutuhan ini didasarkan pada data jumlah penduduk, timbulan sampah per kapita, serta kapasitas standar tiap jenis fasilitas sesuai ketentuan teknis dan regulasi yang berlaku.

Beberapa fasilitas utama yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS3R), Tempat Pengolahan Sampah

Terpadu (TPST), serta Bank Sampah. Selain itu, perhitungan timbulan sampah harian juga diperlukan sebagai dasar estimasi kebutuhan fasilitas.

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berupa rumus dan asumsi kapasitas layanan. Hasil perhitungan kemudian dibandingkan dengan kondisi eksisting untuk memperoleh selisih, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan prioritas pembangunan maupun strategi pengelolaan persampahan.

- Timbulan Sampah Internal

Perhitungan timbulan sampah pada kawasan penelitian, dilakukan perhitungan berdasarkan jumlah penduduk serta nilai timbulan per kapita yang telah ditetapkan dalam regulasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001, timbulan sampah rata-rata di kawasan permukiman adalah 0,5–0,6 kg/orang/hari atau setara dengan 2,5–3 liter/orang/hari.

Dengan demikian, perhitungan timbulan sampah dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Timbulan Sampah Internal (kg/hari)} = \text{Jumlah Penduduk Kawasan Perkotaan Padalarang–Ngamprah} \times \text{Timbulan per Kapita (kg/orang/hari)}$$

Untuk kawasan internal penelitian, yaitu Kawasan Perkotaan Padalarang–Ngamprah, data jumlah penduduk yang digunakan adalah penduduk Kecamatan Padalarang dan Kecamatan Ngamprah.

Adapun capaian persentase pengelolaan sampah yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah berdasarkan perhitungan dari Dinas Lingkungan Hidup, sebagai berikut :

Diketahui,

- Jumlah penanganan sampah KBB= 50.513,596 ton/tahun

Jumlah penanganan sampah Perkotaan Bandung Barat

$$= \frac{\text{Jumlah Penduduk Perkotaan Bandung Barat}}{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Barat}} \times \text{Jumlah Penanganan Sampah KBB}$$

- Jumlah pengurangan sampah = 34,57 ton/hari (DLH, 2025) x 365

$$= 12.618,05 \text{ ton/tahun}$$

Jumlah pengurangan sampah Perkotaan Bandung Barat

$$= \frac{\text{Jumlah Penduduk Perkotaan Bandung Barat}}{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Barat}} \times \text{Jumlah Pengurangan Sampah KBB}$$

Kemudian, hasil jumlah penanganan dan pengurangan sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah dimasukkan kedalam rumus persentase penanganan dan pengurangan sampah sebagai berikut :

$$\text{Persentase Penanganan Sampah} = \frac{\text{Jumlah Penangan Sampah}}{\text{Jumlah Timbulan Sampah}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Pengurangan Sampah} = \frac{\text{Jumlah Pengurangan Sampah}}{\text{Jumlah Timbulan Sampah}} \times 100\%$$

1. TPS 3R (Tempat Pengolahan Sampah *Reduse, Reuse* dan *Recycle*)

Perhitungan kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R) dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah rumah tangga (KK), serta timbulan sampah harian. Berdasarkan Permen PU No. 3 tahun 2013, kriteria umum TPS 3R yaitu berkapasitas minimal 200 KK dengan luas minimal 200 m². Adapun kriteria TPS 3R adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Kriteria Tempat Pengolahan Sampah 3R

No.	Cakupan Layanan		Pemilahan Sampah	Luas (m ²)
	Rumah	Jiwa		
1.	2000	10.000	Tanpa pemilahan	1000
2.	200	1000	50% sampah terpilah 50% sampah tercampur	200-500
3.	200	1000	80% sampah terpilah 20% sampah tercampur	>200

Sumber: Permen Pu No. 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

2. TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu)

Perhitungan kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dilakukan berdasarkan jumlah penduduk dan timbulan sampah harian. Menurut SNI 3242-2008, satu unit TPST dirancang untuk melayani sekitar ±120.000 jiwa pada skala kecamatan atau kota kecil. Oleh karena itu, kebutuhan TPST dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Kebutuhan TPST} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Kecamatan}}{120.000 \text{ Jiwa}}$$

Hasil perhitungan dibulatkan ke atas untuk menjamin seluruh penduduk dapat terlayani oleh fasilitas TPST yang tersedia. Selain jumlah

penduduk, faktor timbulan sampah harian juga menjadi dasar perhitungan kapasitas TPST. Berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001, timbulan sampah rata-rata di permukiman adalah 0,5–0,6 kg/orang/hari atau setara dengan 2,5–3 liter/orang/hari. Dengan demikian, kapasitas timbulan sampah dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Timbulan Sampah (kg/hari)} = \text{Jumlah Penduduk} \times \text{Timbulan per Kapita (kg/orang/hari)}$$

Sebagai contoh, apabila suatu kecamatan memiliki 240.000 jiwa, maka kebutuhan TPST adalah:

$$240.000 \div 120.000 = 2 \text{ unit TPST.}$$

Sementara untuk perhitungan kapasitas timbulan sampah hariannya:

$$240.000 \times 0,6 = 144.000 \text{ kg/hari atau } 144 \text{ ton/hari.}$$

Artinya, fasilitas TPST di wilayah tersebut harus dirancang mampu menampung dan mengolah sekitar 144 ton sampah setiap harinya agar sistem pengelolaan persampahan berjalan optimal.

3. Bank Sampah

Perhitungan kebutuhan Bank Sampah dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk atau jumlah Kepala Keluarga (KK) yang ada di wilayah kelurahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 dan SNI 3242-2008, satu unit Bank Sampah idealnya mampu melayani sekitar 500–1.000 KK atau setara dengan 2.500–5.000 jiwa. Dengan demikian, kebutuhan Bank Sampah di suatu wilayah dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Kebutuhan Bank Sampah} = \frac{\text{Jumlah KK}}{500 - 1000}$$

atau dengan pendekatan jumlah penduduk :

$$\text{Kebutuhan Bank Sampah} = \frac{\text{Jumlah Penduduk}}{2500 - 5000}$$

Selain faktor jumlah penduduk, aspek timbulan sampah harian juga menjadi dasar perhitungan. Berdasarkan SNI 19-2454-2002, rata-rata timbulan sampah rumah tangga adalah 0,5–0,6 kg/orang/hari. Hal ini

penting untuk memastikan bahwa kapasitas Bank Sampah yang tersedia sebanding dengan jumlah sampah yang dapat dikelola.

Sebagai contoh, jika suatu kelurahan memiliki 20.000 jiwa atau sekitar 4.000 KK, maka kebutuhan Bank Sampah adalah:

- Dengan pendekatan KK: $4.000 \div 500 = 8$ unit (minimum), atau $4.000 \div 1.000 = 4$ unit (maksimum).
- Dengan pendekatan jumlah penduduk: $20.000 \div 2.500 = 8$ unit, atau $20.000 \div 5.000 = 4$ unit.

Artinya, wilayah tersebut membutuhkan 4–8 unit Bank Sampah untuk melayani seluruh penduduk secara optimal.

4. Pegiat Maggot

Perhitungan kebutuhan pegiat maggot dilakukan dengan mempertimbangkan fasilitas pengelolaan persampahan yang terdapat di eksisting wilayah Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah. Sesuai dengan kebijakan terbaru Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pembangunan fasilitas pengelolaan sampah tidak lagi berorientasi pada penambahan Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang hanya berfungsi sebagai titik transit dan telah berubah dari sistem angkut–buang menuju sistem yang menekankan pengurangan dan pengolahan sampah dari sumber. Sehingga pembangunan Pegiat Maggot dapat memungkinkan dilakukannya pengurangan timbulan sampah dari sumber. Oleh karena itu, diperlukan perbandingan antara setiap prasarana pengolahan sampah agar sejalan dengan target nasional pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025.

B. Identifikasi Faktor Eksternal

Faktor eksternal mencakup aspek luar yang dapat mendukung pengelolaan sampah, sedangkan tantangan adalah hambatan dari luar yang perlu diatasi. Proses analisis dilakukan dengan observasi lapangan dan

wawancara mendalam dengan para ahli terhadap kondisi pengelolaan persampahan di lapangan untuk memenuhi kebutuhan data primer. Serta data sekunder diperoleh dari instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, BAPPELITBANGDA, Kantor Kecamatan, serta laporan-laporan operasional lain yang ada. Kemudian potensi dan masalah digunakan sebagai mengukur skoring untuk memenuhi faktor eksternal berdasarkan dan aspek kelembagaan persampahan di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah. Berikut adalah faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pengelolaan sampah :

- Kerjasama dengan pihak pemerintah daerah
- Teknologi dan inovasi pengolahan sampah
- Sumber pembiayaan dan alokasi anggaran
- Kebijakan dan regulasi pengelolaan sampah
- Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Aspek kelembagaan bersifat multidisiplin (Rahardyan dan Widagdo, 2013), maka indikator eksternal yang digunakan dalam penelitian ini mencakup kerjasama pemerintah daerah, kebijakan dan regulasi, sumber pembiayaan, inovasi teknologi, serta keterlibatan masyarakat, yang masing-masing merepresentasikan aspek ekonomi, sosial, dan budaya dalam sistem persampahan.

- **Timbulan Sampah Eksternal**

Perhitungan timbulan sampah pada skala eksternal, cakupan wilayah yang digunakan adalah seluruh Kabupaten Bandung Barat. Data jumlah penduduk yang digunakan merupakan total penduduk Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana tercatat dalam publikasi resmi BPS. Perhitungan timbulan sampah pada skala eksternal ini tetap mengacu pada standar yang sama, yaitu 0,5–0,6 kg/orang/hari atau setara dengan 2,5–3 liter/orang/hari, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Permukiman dan

Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001. Dengan demikian, timbulan sampah eksternal dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Timbulan Sampah Eksternal (kg/hari)} = \text{Jumlah Penduduk Kecamatan di KBB} \times \text{Timbulan per Kapita (kg/orang/hari)}$$

Hasil perhitungan timbulan sampah pada skala eksternal ini memberikan gambaran mengenai kondisi persampahan Kabupaten Bandung Barat secara menyeluruh.

Adapun capaian persentase pengelolaan sampah yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah berdasarkan perhitungan dari Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bandung Barat, sebagai berikut :
Diketahui,

- Jumlah penanganan sampah KBB= 50.513,596 ton/tahun
- Jumlah pengurangan sampah = 34,57 ton/hari (DLH, 2025) x 365

Kemudian, hasil jumlah penanganan dan pengurangan sampah dimasukkan kedalam rumus persentase penanganan dan pengurangan sampah adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase Penanganan Sampah} = \frac{\text{Jumlah Penangan Sampah}}{\text{Jumlah Timbulan Sampah}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Pengurangan Sampah} = \frac{\text{Jumlah Pengurangan Sampah}}{\text{Jumlah Timbulan Sampah}} \times 100\%$$

3.1.3.2 Identifikasi strategi dalam pengelolaan persampahan di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah untuk dapat mencapai target yang sudah ditentukan

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 mengatur strategi pengelolaan sampah secara menyeluruh dengan target 100% pengelolaan yang tepat pada 2025. Pendekatan yang diterapkan mencakup pengurangan, seperti pembatasan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang, serta penanganan yang meliputi pemilahan hingga pemrosesan akhir. Pemerintah menargetkan pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan 70%. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan analisis SWOT guna merumuskan strategi. Sehingga hasilnya dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan bagi DPUPR Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan pengelolaan persampahan.

A. Analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunity, Threat*)

Berikut merupakan tahapan dalam membuat analisis SWOT (Freddy Rangkuti, 2015: 2-13) :

1. Menentukan indikator-indikator kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Indikator kekuatan dan kelemahan dikategorikan sebagai faktor internal yang berasal dari dalam wilayah perencanaan, yaitu Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah yang menjadi fokus studi. Sementara itu, peluang dan ancaman dikategorikan sebagai faktor eksternal, yaitu berasal dari wilayah yang lebih luas dari wilayah perencanaan. Faktor eksternal ini dapat berada pada lingkup Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, hingga nasional, tergantung relevansinya terhadap isu dan arah perencanaan.
2. Menentukan sejumlah narasumber yang dianggap memiliki pemahaman dan wawasan mendalam terkait isu pengelolaan sampah serta kebijakan lingkungan di wilayah studi. Pemilihan narasumber dilakukan secara *purposive*, dengan mempertimbangkan peran, pengalaman, serta keterkaitannya langsung terhadap persoalan yang dibahas yaitu pengelolaan persampahan di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah.
3. Membuat pemilihan strategi yang didasarkan atas perhitungan bobot dan rating analisis SWOT. Cara perhitungan bobot dan rating analisis SWOT adalah sebagai berikut :
 - a. Memberi nilai bobot untuk daftar faktor internal dan eksternal yang telah ditemukan berdasarkan variabel penelitian seputar pengelolaan persampahan. Nilai bobot ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensi penanganan, besarnya dimulai dari 0,0 sampai dengan 1,0. Bobot kekuatan ditambah dengan bobot kelemahan harus berjumlah 100% atau 1, begitupun dengan jumlah bobot peluang dan ancaman harus berjumlah 100% atau 1.
 - b. Cara perhitungan rating adalah antisipasi kita terhadap perubahan yang akan terjadi tahun depan atau beberapa tahun ke depan. Nilainya dimulai dari 1 sampai dengan 4.

- Untuk matriks IFAS, 1 = sangat lemah, 2 = lemah, 3 = kuat, 4 = sangat kuat. Kekuatan harus mendapat peringkat 3 atau 4 dan kelemahan harus mendapat peringkat 1 atau 2.
- Untuk matriks EFAS, 1 = responnya di bawah rata-rata, 2 = responnya rata-rata, 3 = responnya di atas rata-rata, 4 = responnya sangat bagus. Baik peluang maupun ancaman dapat menerima rating 1, 2, 3, atau 4.

Tabel III. 5 Matriks Internal Factor Analysis Summary (IFAS)

No	KEKUATAN	Bobot	Rating	Score
1				
2	dst			
Total				
	KELEMAHAN			
1				
2	dst			
Total				
Total Bobot x Score untuk Internal Faktor				

Sumber : Freddy Rangkuti, 2015

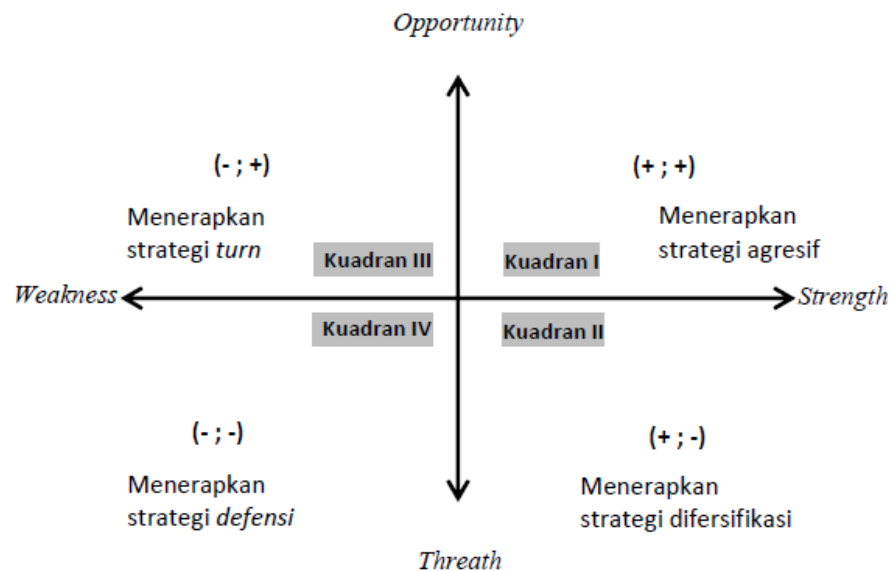
Tabel III. 6 Matriks Eksternal Factor Analysis Summary (EFAS)

No	PELUANG	Bobot	Rating	Score
1				
2	dst			
Total				
	ANCAMAN			
1				
2	dst			
Total				
Total Bobot x Score untuk Eksternal Faktor				

Sumber : Freddy Rangkuti, 2015

- c. Setelah bobot dan rating untuk faktor internal dan eksternal tersebut dihitung, hasilnya kita masukkan ke dalam kuadran SWOT dengan cara :
 - c. Total nilai bobot x *rating* kekuatan - dengan total nilai bobot dan *rating* kelemahan = nilai kuadran sumbu X.
 - d. Total nilai bobot x *rating* peluang - dengan total nilai bobot dan *rating* ancaman = nilai kuadran sumbu Y.

Berikut merupakan pemilihan strategi dari masing-masing daerah kurva SWOT.



Gambar III. 1 Posisi Kuadran SWOT

Sumber : Pearce dan Robinson dalam Raharja, A. B.

a. Kuadran I (positif ; positif)

Merupakan situasi yang sangat menguntungkan, dimana wilayah kajian memiliki peluang dan kekuatan bagus sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang paling tepat diterapkan adalah mendukung kebijakan pertumbuhan agresif (*Growth Oriented Strategy*). Dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal.

b. Kuadran II (positif ; negatif)

Meskipun memiliki berbagai ancaman, wilayah kajian masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang paling tepat digunakan adalah menggunakan kekuatan untuk meraih peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi artinya wilayah kajian ini dalam kondisi mantap namun menghadapi sejumlah tantangan berat sehingga diperkirakan wilayah kajian akan mengalami kesulitan. Oleh karenanya, wilayah kajian disarankan untuk segera memperbanyak ragam strategi taktisnya.

c. Kuadran III (negatif ; positif)

Merupakan posisi keadaan yang sangat tidak menguntungkan, dimana wilayah kajian menghadapi beberapa kelemahan internal sekaligus peluang yang suram.

Strateginya adalah *turn around*, artinya memperbaiki kinerja internal wilayah kajian.

d. Kuadran IV (negatif ; negatif)

Wilayah kajian menghadapi peluang yang sangat besar, tetapi secara internal wilayah kajian memiliki beberapa kelemahan. Fokus strategi wilayah kajian ini adalah meminimalkan masalah internal wilayah kajian, sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik. Strateginya adalah strategi *defensive*, artinya kondisi internal wilayah kajian berada pada pilihan dilematis. Mengendalikan kinerja internal wilayah kajian agar tidak semakin merosot dengan berupaya berbenah diri. Seiring dengan “berharap/menunggu waktu tepat” kondisi eksternal membaik

4. Setelah masing-masing indikator SWOT ditentukan, langkah selanjutnya adalah membuat formulasi strategi dengan menggabungkan S dengan O, W dengan O, S dengan T, dan W dengan T. Model yang akan digunakan dalam analisis ini yaitu Matriks SWOT, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel III. 7 Matriks Analisis SWOT

Eksternal \ Internal	Internal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	Peluang (O)	Strategi SO (Strategi yang menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang)	Strategi WO (Strategi yang meminimalkan kelemahan dan memanfaatkan peluang)
Eksternal \ Internal	Internal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	Ancaman (T)	Strategi ST (Strategi yang menggunakan kekuatan dan mengatasi ancaman)	Strategi WT (Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman)

Sumber : Freddy Rangkuti, 2001

Sebelum melakukan pilihan strategi, kita perlu mengetahui pengertian masing-masing strategi dari hasil penggabungan, yaitu SO strategi, WO strategi, ST strategi, dan WT strategi. Menurut Freddy Rangkuti (2015: 8-9) strategi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

- Strategi SO : Strategi yang menggunakan seluruh kekuatan yang kita miliki untuk merebut peluang.

- Strategi ST : Strategi yang disusun dengan menggunakan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman yang akan terjadi.
- Strategi WO : Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk merebut peluang. Artinya banyak peluang yang dapat diraih, tetapi tidak ditunjang dengan kekuatan yang memadai (lebih banyak kelemahannya) sehingga kelemahan tersebut perlu diminimalisasi terlebih dahulu.
- Strategi WT : Strategi yang disusun dengan meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman.

Hasil analisis SWOT yang telah menghasilkan strategi SO, WO, ST, maupun WT, kemudian dirumuskan menjadi usulan program-program pengelolaan sampah. Setiap program disertai dengan penanggung jawab utama, misalnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Barat, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, maupun kelompok masyarakat. Dengan demikian, hasil analisis SWOT tidak hanya menghasilkan strategi secara teoritis, tetapi juga memberikan arahan program yang dapat langsung digunakan sebagai masukan dalam perencanaan pengelolaan persampahan dalam upaya mengurangi timbulan sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

Dalam merumuskan strategi penambahan prasarana persampahan, diperlukan justifikasi mengenai penentuan lokasi dari setiap jenis prasarana berdasarkan kebutuhan unit di tingkat desa maupun kecamatan. Hal ini menggunakan pendekatan yang mengacu pada data jumlah penduduk, timbulan sampah, serta cakupan layanan tiap prasarana sebagaimana ditetapkan dalam regulasi. Adapun penentuan lokasi untuk TPS 3R, Bank Sampah, TPST, maupun unit pengolahan organik seperti pegiat maggot, disajikan pada tabel berikut :

Tabel III. 8 Justifikasi Penentuan Lokasi Penambahan Fasilitas Prasarana Persampahan

Prasarana Persampahan	Penentuan Lokasi	Sumber
TPS 3R	• Lokasi dekat dengan permukiman agar mudah diakses masyarakat • Melayani 200–400 KK ($\pm$ 1000–2000 jiwa) per TPS 3R	Permen PU No. 3 Tahun 2013

Prasarana Persampahan	Penentuan Lokasi	Sumber
	• 1 TPS 3R per kelurahan padat (10.000 jiwa atau 2.000 rumah)	
TPST	Lokasi strategis untuk melayani sampah sesuai jumlah penduduk di skala kecamatan/kawasan perkotaan karena 1 unit TPST melayani 120.000 jiwa (skala kecamatan/kawasan perkotaan)	SNI 3242-2008 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman
	Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 adanya pembangunan TPST di WP Padalarang-Ngamprah	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 adanya pembangunan TPST di WP Padalarang-Ngamprah
Bank Sampah	• Melayani 500–1.000 KK atau 2.500–5.000 jiwa • Terletak di tengah permukiman padat sehingga ada partisipasi aktif masyarakat • Memprioritaskan pembangunan di wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, SNI 3242-2008
Pegiat Maggot	• Lokasi dekat sumber sampah organik (pasar, restoran) supaya bahan baku organik mudah didapat • Dalam skala desa idealnya diletakan di fasilitas umum yang mudah diakses, seperti balai desa atau lahan kosong di area permukiman	Tata Ruang Berkelanjutan untuk Budidaya Maggot: Pendekatan Lingkungan dan Arsitektural. <i>IKRA-ITH Teknologi Jurnal Sains Dan Teknologi</i> , 9(1), 47–58. (Sujatini et al., 2024)

Sumber : Hasil Analisis, 2025

3.2 Matriks Analisis

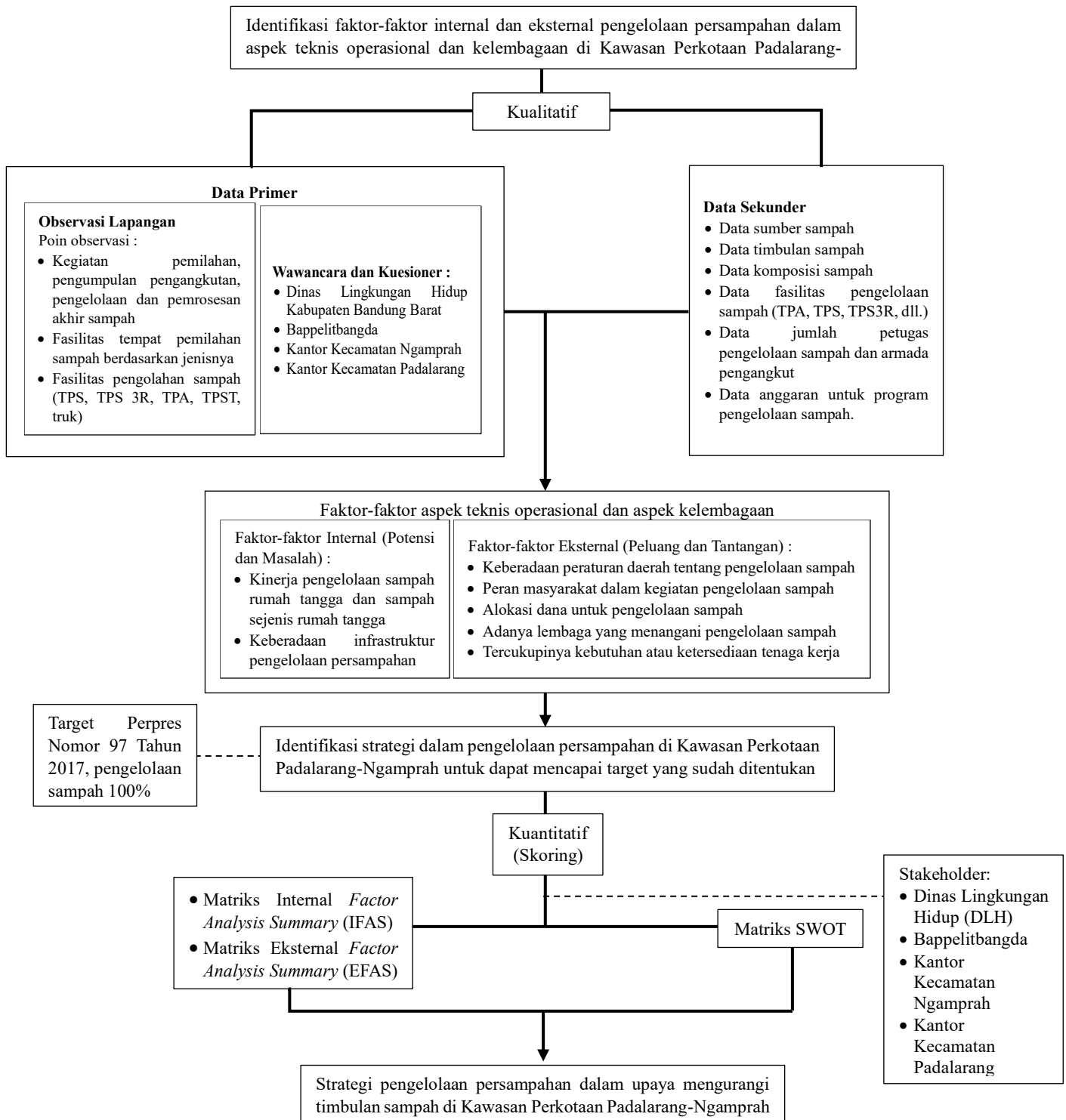
Tabel III. 9 Matriks Analisis

No	Sasaran	Metode Analisis	Kebutuhan Data		Metode Survey	Sumber	Output
1	Identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal pengelolaan persampahan dalam aspek teknis operasional dan kelembagaan di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah	Kualitatif	Kekuatan	• Kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah	Observasi Lapangan	Hasil Observasi	Faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) dalam aspek teknis operasional dan kelembagaan di Kabupaten Bandung Barat
				• Data sumber sampah • Data timbulan sampah • Data komposisi sampah • Data fasilitas pengelolaan sampah (TPA, TPS, TPS3R, dll.) • Data jumlah petugas pengelolaan sampah dan armada pengangkut • Data anggaran untuk program pengelolaan sampah • Perencanaan strategis • Kebijakan pengelolaan persampahan • Evaluasi kinerja program pengelolaan sampah.	Sekunder	Dinas Lingkungan Hidup	
			Kelemahan	• Keterbatasan dana dan anggaran • Rendahnya partisipasi masyarakat	Wawancara	• Dinas Lingkungan Hidup • Bappelitbangda • Kantor Kecamatan	
			Peluang	• Kerjasama dengan pihak pemerintah daerah dalam mengelola sampah • Teknologi dan inovasi terbaru untuk mengolah sampah rumah tangga	Wawancara	• Dinas Lingkungan Hidup • Bappelitbangda	

No	Sasaran	Metode Analisis	Kebutuhan Data		Metode Survey	Sumber	Output
				• Sumber pembiayaan dan alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah • Kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan sampah • Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah		• Kantor Kecamatan	
			Ancaman	• Data sumber sampah • Data timbulan sampah • Data komposisi sampah	Sekunder	• Dinas Lingkungan Hidup	
				• Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah	Wawancara	• Dinas Lingkungan Hidup • Bappelitbangda • Kantor Kecamatan	
2	Identifikasi strategi dalam pengelolaan persampahan di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah untuk dapat mencapai target yang sudah ditentukan	Analisis SWOT	Faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan tantangan) terhadap pengelolaan persampahan berdasarkan aspek teknik operasional dan kelembagaan untuk mencapai target nasional pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70% pada tahun 2025.		Hasil pengolahan data	• Hasil observasi dan wawancara • Dinas Lingkungan Hidup • Bappelitbangda • Kantor Kecamatan	Strategi pengelolaan persampahan dalam mengurangi timbulan sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah untuk dapat mencapai target yang sudah ditentukan

Sumber: Hasil Identifikasi 2024

3.3 Kerangka Analisis



Gambar III. 2 Kerangka Analisis

3.4 Time Schedule

Tabel III. 10 Time Schedule Tugas Akhir

[illegible]

BAB IV

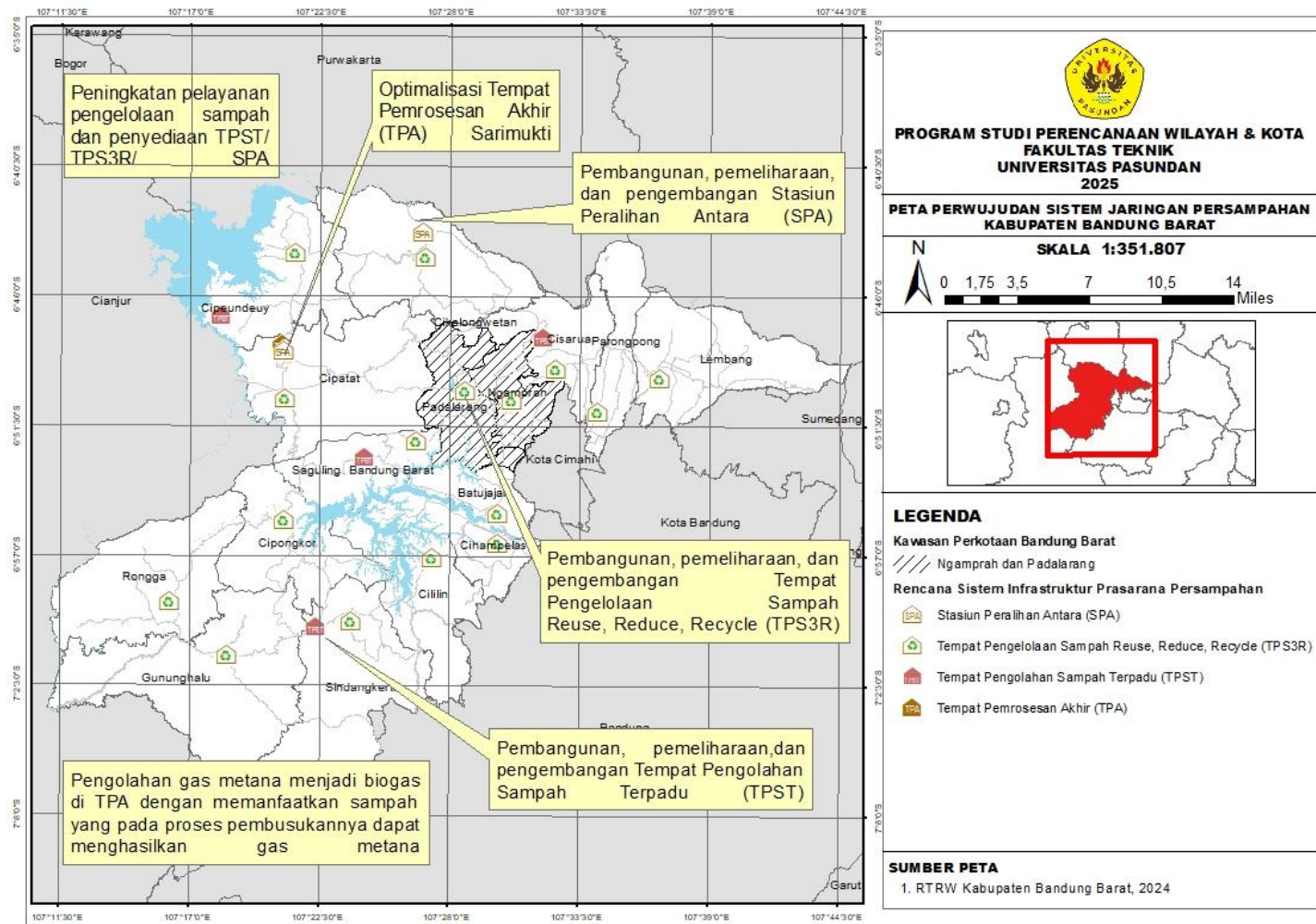
GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bandung Barat

4.1.1 Gambaran Umum Kebijakan

Menurut RTRW Kabupaten Bandung Barat 2024-2044, penataan ruang di kawasan perkotaan diarahkan untuk mewujudkan lingkungan yang layak huni, produktif, dan lestari. Salah satu aspek krusial yang diatur dalam dokumen ini adalah penyediaan dan pengelolaan infrastruktur dasar dan utilitas lingkungan. RTRW Kabupaten Bandung Barat 2024-2044 menegaskan pentingnya pembangunan fasilitas pengolahan sampah yang memadai, baik di tingkat regional maupun lokal, serta menekankan pada peningkatan kualitas sanitasi perkotaan.

RTRW Kabupaten Bandung Barat 2024-2044 juga menggarisbawahi pentingnya penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam upaya pengelolaan sampah. Dokumen ini mendorong adanya inisiatif dan program di tingkat masyarakat serta industri untuk meminimalkan timbulan sampah dari sumbernya, sejalan dengan visi pembangunan wilayah yang ramah lingkungan. RTRW memberikan mandat bagi pemerintah daerah untuk menciptakan mekanisme pengelolaan sampah yang berbasis sirkularitas, bukan hanya fokus pada pembuangan akhir. Oleh karena itu, strategi yang dikembangkan dalam penelitian ini harus sejalan dengan arahan RTRW 2024-2044, yang memprioritaskan pengelolaan sampah berbasis sumber dan peningkatan efisiensi infrastruktur pengelolaannya di area perkotaan.



Gambar IV. 1 Peta Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan Kabupaten Bandung Barat 2024

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjadi dasar hukum utama dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan perubahan paradigma pengelolaan sampah dari kumpul-angkut-buang menjadi pendekatan *reduce, reuse, recycle* (3R), serta mengedepankan pengelolaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Kebijakan ini menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan daerah yang mendukung pengurangan timbulan sampah sejak dari sumbernya, baik melalui pemilahan sampah, pengembangan bank sampah, maupun pembentukan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas), kebijakan ini ditetapkan sebagai landasan strategis dan dasar hukum utama dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di seluruh wilayah Indonesia, sebab Jakstranas memberikan kerangka kerja nasional yang wajib diimplementasikan oleh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Bandung Barat, dalam merancang kebijakan dan program pengelolaan sampah mereka. Jakstranas tidak hanya menetapkan visi pengelolaan sampah yang berkelanjutan, tetapi juga menggarisbawahi urgensi pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan fokus pada pengurangan timbulan sampah dari sumbernya, yang sejalan dengan tujuan utama penelitian ini.

Jakstranas 2017 secara eksplisit menetapkan target untuk pengelolaan sampah nasional, yaitu pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025. Target ini menjadi acuan utama bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menyusun rencana strategis pengelolaan sampah di wilayahnya. Jakstranas mengamanatkan bahwa upaya pengurangan sampah harus dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti pembatasan timbulan sampah, daur ulang, serta pemanfaatan kembali sampah.

Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Rumah Tangga Tahun 2019-2025 yang selanjutnya disebut Jakstrada memuat tentang:

- a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- b. Strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi peningkatan kinerja Pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dilakukan melalui kegiatan :

- a. Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- b. Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- c. Pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Sedangkan penanganan sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan melalui:

- a. Pemilahan
- b. Pengumpulan
- c. Pengangkutan
- d. Pengolahan dan
- e. Pemrosesan akhir

Pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan yang disusun oleh pemerintah, tetapi juga pada seberapa besar anggaran yang disiapkan untuk menjalankannya. Salah satu indikator yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan serta untuk melihat seberapa serius pemerintah dalam menangani persoalan pengelolaan sampah adalah alokasi anggaran yang memadai. Berikut adalah tabel perbandingan alokasi anggaran pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 :

Tabel III. 11 Tabel perbandingan alokasi anggaran pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024

Wilayah	Total APBD (Rp)	Alokasi Pengelolaan Sampah (Rp)	Persentase dari APBD (%)
Kabupaten Bandung Barat	3.465.660.875.614	42.574.400	0,0012%
Provinsi Jawa Barat	30.000.000.000.000	300.000.000.000	1%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, 2024; SIPSN KLHK, 2024

Berdasarkan perbandingan alokasi anggaran antara Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat, terdapat beberapa perbedaan yang signifikan dalam hal alokasi persentase terhadap total APBD. Dilihat berdasarkan persentase alokasi pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat (0,0012%) jauh lebih kecil dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat (1%). Ini menunjukkan bahwa sektor persampahan belum menjadi prioritas utama dalam perencanaan keuangan daerah. Sehingga, diperlukan peningkatan alokasi anggaran di tingkat Kabupaten Bandung Barat, serta melakukan optimalisasi anggaran melalui kerja sama sektor swasta, pemberdayaan masyarakat, dan pencarian sumber pembiayaan alternatif seperti CSR dan program hibah dari pemerintah pusat.

4.1.2 Administrasi Kabupaten Bandung Barat

Kabupaten Bandung Barat terbagi menjadi 16 wilayah administrasi kecamatan, yaitu Lembang, Parongpong, Cisarua, Cikalongwetan, Cipeundeuy, Ngamprah, Cipatat, Padalarang, Batujajar, Cihampelas, Cililin, Cipongkor, Rongga, Sindangkerta, Gununghalu dan Saguling. Kabupaten Bandung Barat meliputi 165 desa, dengan batas wilayah administrasi meliputi :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur; Kecamatan (Maniis, Darangdan, Bojong dan Wanayasa) Kabupaten Purwakarta; Kecamatan (Sagalaherang, Jalan Cagak dan Cisalak) Kabupaten Subang.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan (Cilengkrang, Cimenyan, Margaasih dan Soreang) Kabupaten Bandung, Kecamatan (Cidadap dan Sukasari) Kota Bandung dan Kecamatan (Cimahi Utara, Cimahi Tengah dan Cimahi Selatan) Kota Cimahi.

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan (Campaka, Ciranjang, dan Mande) Kabupaten Cianjur.
- Sebelah Selatan : Berbatasan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan data statistik Kabupaten Bandung Barat dalam angka tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2022 sebanyak 1.846.969 jiwa. Jumlah penduduk ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (2021) sebesar 1.814.226 jiwa, dan pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 1,77 persen dan tahun 2021 sebesar 1,65 persen. Jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III. 12 Kondisi Penduduk Kabupaten Bandung Barat

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Timbulan Sampah (ton/hari)
Rongga	48.499	113,12	428,74	25,80
Gununghalu	80.348	160,64	500,17	33,40
Sindangkerta	70.463	120,47	584,90	31,52
Cililin	96.159	77,78	1.236,29	40,80
Cihampelas	128.473	46,99	2.734,05	59,08
Cipongkor	103.266	79,94	1.291,79	43,32
Batujajar	103.120	32,04	3.218,48	47,04
Saguling	34.653	51,42	673,92	14,76
Cipatat	136.821	126,03	1.085,62	59,64
Padalarang	178.903	51,40	3.480,60	76,54
Ngamprah	169.910	35,99	4.721,03	74,99
Parongpong	90.567	45,14	2.006,36	47,64
Lembang	191.644	95,56	2.005,48	82,76
Cisarua	64.906	55,13	1.177,33	33,76
Cikalong Wetan	128.200	112,91	1.135,42	54,56
Cipeundeuy	93.600	101,09	925,91	37,44

Sumber : Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2024

Kondisi penduduk dilihat dari wilayah/kecamatan, penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Lembang sebanyak 191.644 jiwa, sedangkan urutan kedua kecamatan dengan penduduk terbanyak yaitu Kecamatan Padalarang sebesar 178.903 jiwa dan diikuti oleh Kecamatan Ngamprah sebanyak 169.910 jiwa. Untuk tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bandung Barat per-km² sebesar 1.700,38 jiwa/km², dimana kecamatan dengan penduduk terpadat di Kecamatan Ngamprah sebanyak 4.721,03 jiwa/km² dan Kecamatan Padalarang 3.480,60 jiwa/km².

4.1.3 Kondisi Persampahan Kabupaten Bandung Barat

A. Sumber Sampah

Sumber sampah di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan data dari website Sampah Kita yang dibuat oleh Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

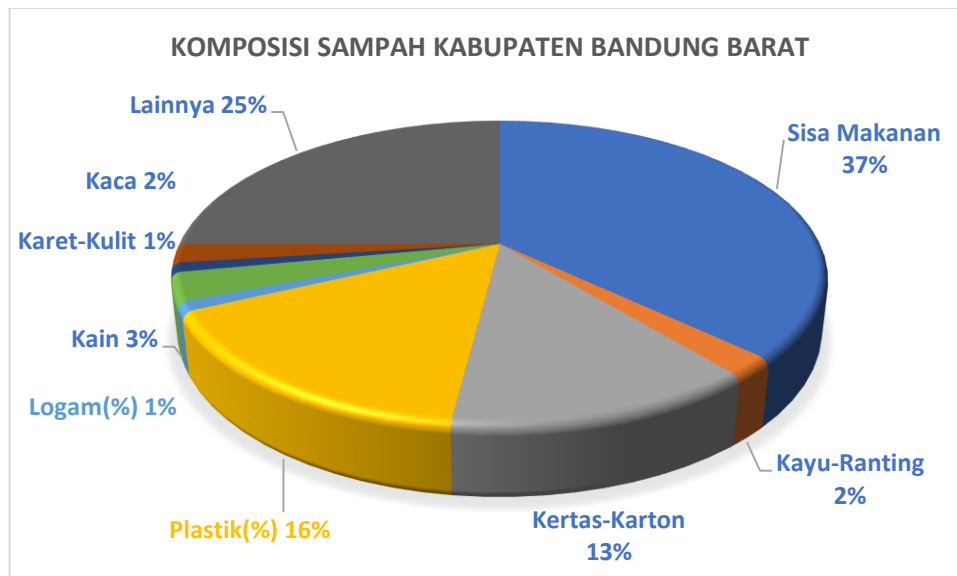
Tabel IV. 1 Sumber Sampah Kabupaten Bandung Barat

Kelompok	Jumlah Sampah (ton/hari)
Permukiman	6,09
Pasar	3,11
Industri	2,35
TPS	0,13

Sumber : Sampah Kita, 2025

B. Komposisi Sampah

Komposisi sampah di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional tahun 2024 dijelaskan pada diagram berikut :



Gambar IV. 2 Diagram Komposisi Sampah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2024

Berdasarkan data tersebut, tiga jenis sampah terbanyak di Kabupaten Bandung Barat adalah sisa makanan sebesar 37%, diikuti oleh plastik sebesar 16%, dan kertas/karton sebesar 13%. Jika tidak ada upaya pengurangan dan pengelolaan sampah yang signifikan, maka Kabupaten Bandung Barat berpotensi mengalami penumpukan sampah yang serius. Hal ini mengingatkan bahwa kuota ritase sampah Kabupaten Bandung Barat ke TPA Sarimukti sangat terbatas, yaitu hanya 17 ritase per hari. Artinya, jumlah sampah yang dapat dibuang ke TPA sangat dibatasi, dan sisanya harus diolah atau ditangani di wilayah Kabupaten Bandung Barat sendiri.

4.1.3.1 Aspek Teknis Operasional

A. Pemilahan Sampah

Masyarakat umumnya belum melakukan pemilahan di sumber sehingga kondisi sampah masih tercampur antara sampah organik dan anorganik. Tempat pembuangan dari tiap-tiap sumber sampah masih sangat beragam, misalnya untuk skala rumah tangga umumnya menggunakan kresek berukuran sedang sampai besar, sementara tempat pembuangan dari non permukiman (kantor, sekolah, toko dll) menggunakan trash bag ukuran besar. Di beberapa sumber sampah seperti perkantoran, misalnya Kantor Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat telah disediakan tempat sampah terpilah yaitu untuk sampah organik dan anorganik.

Usaha-usaha pemilahan telah dilakukan diberbagai sumber sampah. Salah satunya daerah-daerah yang terdapat Bank Sampah di sekitarnya. Beberapa daerah yang telah terlibat pemilahan adalah:

- Bank Sampah Sukamaju Sejahtera;
- Bank Sampah Bukit Berlian;
- Perumahan Alam Sanggar (Bank Sampah Resik Kenari);
- Perumahan Cisasawi (Bank Sampah Phiesaw);
- Komplek Puspa, Anjelir, Safamarwa, Lavender, Bukit Indah, Cibaling Permai, Pondok Mutiara; dan
- Pondok Pesantren Darul Halim.

B. Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah di Kabupaten Bandung Barat adalah yang berupa TPS, bak sampah terbuka serta *container*. Sampah yang sudah terkumpul kemudian diangkut oleh truk dari UPT Kebersihan menuju TPA Regional Sarimukti. Data seluruh TPS yang ada di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut :

Tabel IV. 2 Daftar Nama TPS di Kabupaten Bandung Barat

No	TPS	Keterangan
1	Transfer Dipo Gedong Lima	Kondisi Aktif, Aset Pemda
2	Pasar Tagog Padalarang	Kondisi Aktif, Aset Pemda, bentuk Kontainer
3	Pasar Panorama Lembang	Kondisi Aktif, Aset Pemda, bentuk Kontainer
4	Pasar Batu Jajar Kondisi Aktif	Aset Pemda, bentuk Kontainer

No	TPS	Keterangan
5	Pasar Cililin Kondisi Aktif	Aset Pemda, bentuk Kontainer
6	TPS Ciwaruga	Kondisi Aktif, Aset Pemda
7	TPS Sariwangi	Kondisi Aktif, Aset Pemda

Sumber : Rencana Induk Pengelolaan Sampah, 2024

C. Pengolahan Sampah

Kabupaten Bandung Barat hingga kini belum memiliki Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang memadai. Beberapa fasilitas Tempat Pengolahan Sampah dengan konsep *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS3R) memang telah dibangun, namun sebagian besar tidak lagi beroperasi atau tidak berjalan sesuai fungsinya. Akibatnya, upaya pengolahan sampah di tingkat kawasan belum dapat dilakukan secara maksimal.

Saat ini, pengelolaan sampah yang masih berjalan adalah melalui program bank sampah yang umumnya dijalankan secara mandiri oleh warga di tingkat RW. Namun, cakupan dan kapasitas pengelolaan melalui bank sampah ini masih terbatas dan belum mampu mengimbangi volume timbulan sampah yang terus bertambah setiap tahun. Permasalahan seperti kurangnya sarana prasarana, keterbatasan dana, serta lemahnya dukungan kelembagaan menjadi kendala utama dalam meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan sampah di daerah tersebut.

D. Pengangkutan Sampah

Mekanisme pengangkutan sampah yang diterapkan di Kabupaten Bandung Barat terbagi menjadi dua jenis, yaitu pengangkutan langsung dan pengangkutan tidak langsung. Pengangkutan langsung berarti sampah dari sumbernya, seperti rumah tangga, fasilitas umum, atau pasar, diambil secara langsung oleh kendaraan pengangkut milik UPT Kebersihan tanpa melalui tempat penampungan antara. Sementara itu, pengangkutan tidak langsung dilakukan dengan cara mengumpulkan sampah terlebih dahulu di Tempat Penampungan Sementara (TPS) terdekat. Setelah itu, sampah yang terkumpul di TPS akan diangkut menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) oleh kendaraan operasional UPT Kebersihan.

Hampir seluruh desa (sekitar 98% atau 10 Kecamatan dan 54 Desa) di Kabupaten Bandung Barat telah menjalin kerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup. Artinya, sebagian

besar wilayah sudah memiliki sistem pengangkutan sampah yang resmi, dimana petugas kebersihan mengangkut sampah dari desa atau RW ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Hal ini menjadi kekuatan penting karena menunjukkan adanya struktur dan sistem kerja yang sudah terbentuk dan berjalan. Adapun rincian wilayah pelayanan penanganan sampah diantaranya diuraikan sebagai berikut :

Tabel IV. 3 Area Pelayanan UPT Persampahan di Kabupaten Bandung Barat

No.	Kecamatan	Desa
1	Batujajar	Batujajar Barat
2	Batujajar	Batujajar Timur
3	Batujajar	Galanggang
4	Batujajar	Giriasih
5	Batujajar	Pangauban
6	Batujajar	Selacau
7	Cihampelas	Cihampelas
8	Cihampelas	Cipatik
9	Cihampelas	Mekarmukti
10	Cihampelas	Pataruman
11	Cihampelas	Citapen
12	Cihampelas	Singajaya
13	Cihampelas	Tanjung Wangi
14	Cikalong Wetan	Ciptagumati
15	Cikalong Wetan	Mandalamukti
16	Cikalong Wetan	Mandalasari
17	Cikalongwetan	Cikalong
18	Cililin	Cililin
19	Cipatat	Ciptaharja
20	Cisarua	Jambudipa
21	Cisarua	Padaasih
22	Lembang	Cibogo
23	Lembang	Cikahuripan
24	Lembang	Cikole
25	Lembang	Gudang Kahuripan
26	Lembang	Jayagiri
27	Lembang	Kayuambon
28	Lembang	Lembang
29	Lembang	Pagerwangi
30	Lembang	Wangunharja
31	Lembang	Sukamantri
32	Ngamprah	Bojongkoneng
33	Ngamprah	Cilame
34	Ngamprah	Cimareme
35	Ngamprah	Margajaya
36	Ngamprah	Mekarsari
37	Ngamprah	Paku haji
38	Ngamprah	Sukatani
39	Ngamprah	Tanimulya
40	Ngamprah	Gadobangkong

No.	Kecamatan	Desa
41	Padalarang	Ciburuy
42	Padalarang	Cimerang
43	Padalarang	Cipeundeuy
44	Padalarang	Jaya Mekar
45	Padalarang	Kerta Jaya
46	Padalarang	Kertamulya
47	Padalarang	Laksana Mekar
48	Padalarang	Padalarang
49	Parongpong	Cigugur
50	Parongpong	Cihanjuang
51	Parongpong	Cihideung
52	Parongpong	Ciwaruga
53	Parongpong	Karyawangi
54	Parongpong	Sariwangi

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

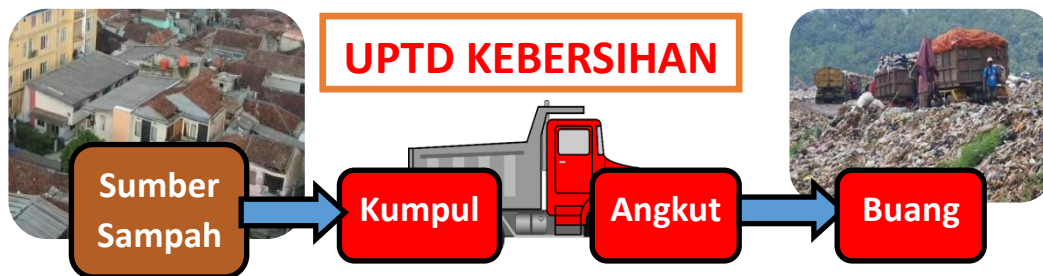
Walaupun sudah ada pengangkutan sampah oleh UPT Persampahan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Padalarang mengatakan bahwa warga menilai pengangkutan tersebut tidak efektif. Banyak warga yang sudah memilah sampah dari rumah, namun ketika sampah tersebut diangkut oleh petugas, semuanya tetap dicampur kembali di truk pengangkut. Ini membuat masyarakat enggan untuk melanjutkan pemilahan karena merasa tidak ada tindak lanjut dari upaya mereka dan menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memilah sampah masih rendah, sehingga menghambat jalannya program pengelolaan sampah yang baik (Anisa Dzulhikmah, 2025). Bertambahnya permukiman baru juga menimbulkan masalah baru, dikarenakan setiap permukiman baru belum terlayani oleh UPT Persampahan dan tidak mengetahui bagaimana alur pengelolaan sampah di wilayahnya sehingga menyebabkan timbunan sampah baru di sepanjang jalan.

E. Pemrosesan Akhir Sampah

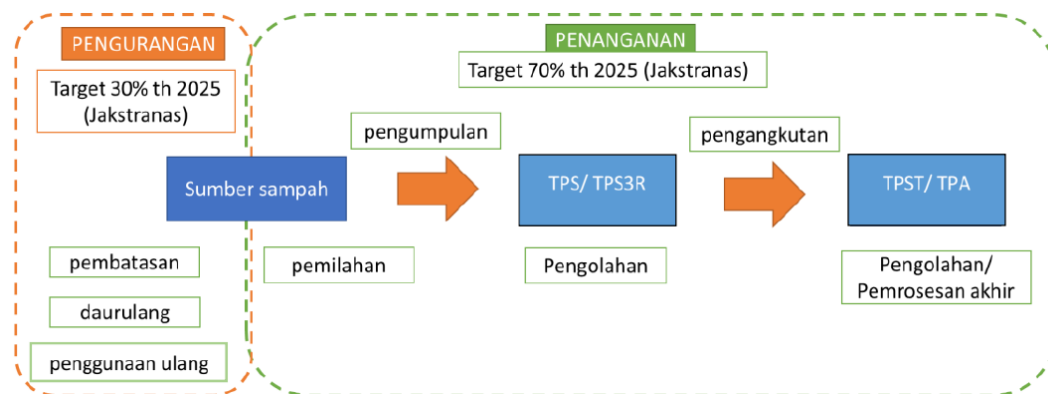
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang saat ini dimanfaatkan oleh Kabupaten Bandung Barat adalah TPA Regional Sarimukti. Meskipun masa pakai TPA ini diproyeksikan akan habis pada tahun 2017, faktanya hingga kini Sarimukti masih dioperasikan, meskipun berstatus *overload* dan hanya menyisakan satu zona yang masih aktif. Dalam rencana jangka panjang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya mengalihkan aktivitas pengelolaan sampah regional ke TPA Legok Nangka. Akan tetapi, jarak TPA Legok Nangka yang relatif jauh serta potensi

kemacetan di jalur distribusinya menjadi hambatan tersendiri, terutama bagi armada pengangkut sampah dari Kabupaten Bandung Barat. Jarak yang jauh ini berpotensi menambah beban biaya operasional, termasuk kebutuhan bahan bakar serta besaran *tipping fee* yang harus dikeluarkan. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berharap adanya alternatif lokasi TPA baru yang khusus melayani wilayah Kabupaten Bandung Barat saja.

Saat ini Kabupaten Bandung Barat masih menggunakan sistem pengelolaan sampah dengan pendekatan "kumpul, angkut, buang". Model ini adalah sistem pengelolaan sampah konvensional di mana sampah dikumpulkan dari berbagai sumber, diangkut ke TPA dan dibuang begitu saja. Meskipun demikian, ada upaya untuk mengubah sistem tersebut dengan melibatkan pengelolaan sampah yang lebih komprehensif, termasuk pemilahan sampah di tingkat rumah tangga.



Gambar IV. 3 Alur Pengelolaan Sampah Kabupaten Bandung Barat



Gambar IV. 4 Skema Pengelolaan Persampahan Berdasarkan Jakstranas

Maka dari itu, perlu diperhatikan skema ideal pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas). Gambar IV. 4 menunjukkan bahwa Jakstranas menargetkan pengurangan sampah sebesar

30% dan penanganan sebesar 70% pada tahun 2025. Strategi pengurangan dilakukan melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah, pemilahan, daur ulang, dan penggunaan ulang.

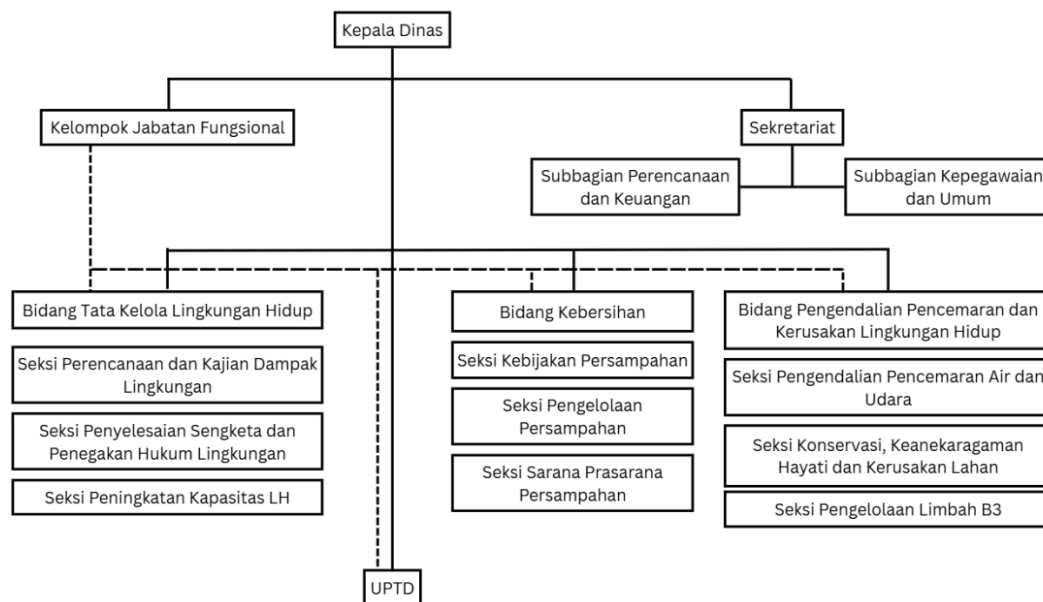
4.1.3.2 Aspek Kelembagaan

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Barat merupakan lembaga utama dalam pengelolaan sampah, dengan dukungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan yang bertugas di lapangan. DLH bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan teknis, sementara penganggaran berada di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda). Selain itu, pengelolaan ini juga melibatkan kolaborasi antar dinas seperti Dinas Permukiman, DPUTR, serta camat dan kepala desa, sesuai instruksi dari Gubernur dan Bupati.



Gambar IV. 5 Struktur Kelembagaan Pengelolaan Sampah Kabupaten Bandung Barat

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Barat sebagai lembaga utama dalam pengelolaan sampah, berikut disajikan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat yang mencakup bidang, seksi, serta unit pelaksana teknis yang terkait langsung dengan pengelolaan persampahan.



Gambar IV. 6 Struktur Kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup

Instruksi dari Gubernur dan Bupati terkait pemilahan sampah dari sumber sudah disebarkan, namun pelaksanaannya belum konsisten. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan dan pengangkutan menjadi tantangan utama. Penyuluhan telah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Satpol PP Provinsi melalui Satlinmas, namun belum cukup mengubah pola pikir masyarakat tanpa adanya insentif dan fasilitas pendukung. Adapun inovasi yang dibuat oleh Provinsi berupa teknologi digital aplikasi Sampah Kita untuk mendeteksi volume sampah dan memantau alurnya dari tingkat RT/RW hingga ke Dinas Lingkungan Hidup. Namun, inovasi ini belum berjalan optimal dikarenakan tidak ada sosialisasi mengenai input data ke tingkat RT/RW.

Dalam segi pembiayaan, retribusi yang dipungut dari masyarakat hanya mampu menutupi sekitar 20–25% dari biaya operasional. Pemerintah daerah terpaksa menutupi sisanya melalui subsidi karena usulan kenaikan retribusi kerap mendapat penolakan. Terdapat dua skema pembiayaan yang berjalan. Pertama, retribusi resmi berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2021 dan Perbup, biasanya sebesar Rp10.000 per bulan untuk layanan dari UPT. Kedua, iuran mandiri yang disepakati warga bersama pengurus RW. Untuk pengadaan sarpras seperti gerobak atau tempat sampah, sebagian besar diperoleh melalui hibah pemerintah atau program CSR.

Namun, keterbatasan anggaran desa dan kecamatan membuat banyak permohonan sarana prasarana tidak terealisasi dalam musrenbang.

Dokumen perencanaan sudah memuat target-target pengumpulan, pengangkutan, pengurangan, hingga pengolahan sampah. Namun, pencapaian target sangat tergantung pada konsistensi pelaksanaan dan keterlibatan aktif masyarakat. Sebagai contoh, rencana pembangunan sarana pengelolaan sampah di Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, dibatalkan karena penolakan warga yang khawatir akan bau yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pemerintah, melainkan pada kesadaran dan kepedulian masyarakat.

Peraturan tentang larangan membuang sampah sembarangan sebenarnya sudah ada dalam Perda, termasuk sanksi denda. Namun, penegakannya masih lemah karena belum tersedia mekanisme pelaporan, pihak berwenang yang jelas, maupun prosedur pembuktian yang efektif.

4.2 Gambaran Umum Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah

4.2.1 Gambaran Umum Kebijakan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah menekankan pentingnya pengurangan dan penanganan sampah langsung dari sumbernya, melalui kegiatan seperti pemilahan sampah, pengangkutan terjadwal, pemanfaatan bank sampah, TPS3R, hingga keterlibatan masyarakat dan kelembagaan lokal seperti karang taruna. Adapun mengatur pelaksanaan pengelolaan sampah secara berjenjang dan terpadu mulai dari rumah tangga, RT, RW, hingga tingkat kecamatan. Selain itu, tercantum tentang pemberlakuan sanksi administratif dan denda bagi pelanggaran, seperti membuang sampah sembarangan atau tidak melakukan pemilahan sampah sesuai ketentuan. Sanksi ini bertujuan memberikan efek jera sekaligus membentuk perilaku masyarakat yang lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melanjutkan ketentuan sebelumnya yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Retribusi, yang mengatur mekanisme iuran dan retribusi masyarakat dalam pelayanan

pengangkutan sampah. Hampir 98% kegiatan pengangkutan sampah di Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan oleh UPT Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), yang bertugas mengangkut sampah dari sumber di tingkat desa atau RW menggunakan armada truk menuju TPA Sarimukti. Kolaborasi antara pemerintah desa atau RW dengan UPT Kebersihan, di mana warga membayar iuran bulanan, umumnya sebesar Rp10.000, berdasarkan kesepakatan pengurus wilayah setempat dengan masyarakat. Untuk wilayah yang menjalin kerja sama resmi dengan UPT Kebersihan, pungutan dilakukan melalui sistem retribusi daerah sesuai ketentuan Peraturan Daerah. Selain itu, penyediaan sarana pengelolaan sampah, termasuk TPS3R, bank sampah, dan alat-alat pengolahan, sebagian besar diperoleh melalui bantuan atau hibah dari pemerintah.

4.2.2 Administrasi Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah

Kabupaten Bandung Barat adalah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kecamatan Ngamprah. dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Bandung. Ruang lingkup yang menjadi lokus pada penelitian ini adalah Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah yang meliputi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Padalarang dan Kecamatan Ngamprah. Kedua kecamatan tersebut termasuk ke dalam pembagian zona yang ada pada dokumen RTRW sebagai Pusat inti Wilayah Pengembangan (WP), berada di Kecamatan Ngamprah-Padalarang dengan fungsi Ngamprah sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan Padalarang sebagai pusat perdagangan dan jasa. Dengan luas wilayah mencapai 87,28 km² dari 1287,41 km² total luas Kabupaten Bandung Barat, wilayah kajian ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Cikalongwetan
- Sebelah Timur : Kecamatan Cisarua dan Kota Cimahi
- Sebelah Selatan : Kecamatan Batujajar
- Sebelah Barat : Kecamatan Cipatat dan Kecamatan Saguling

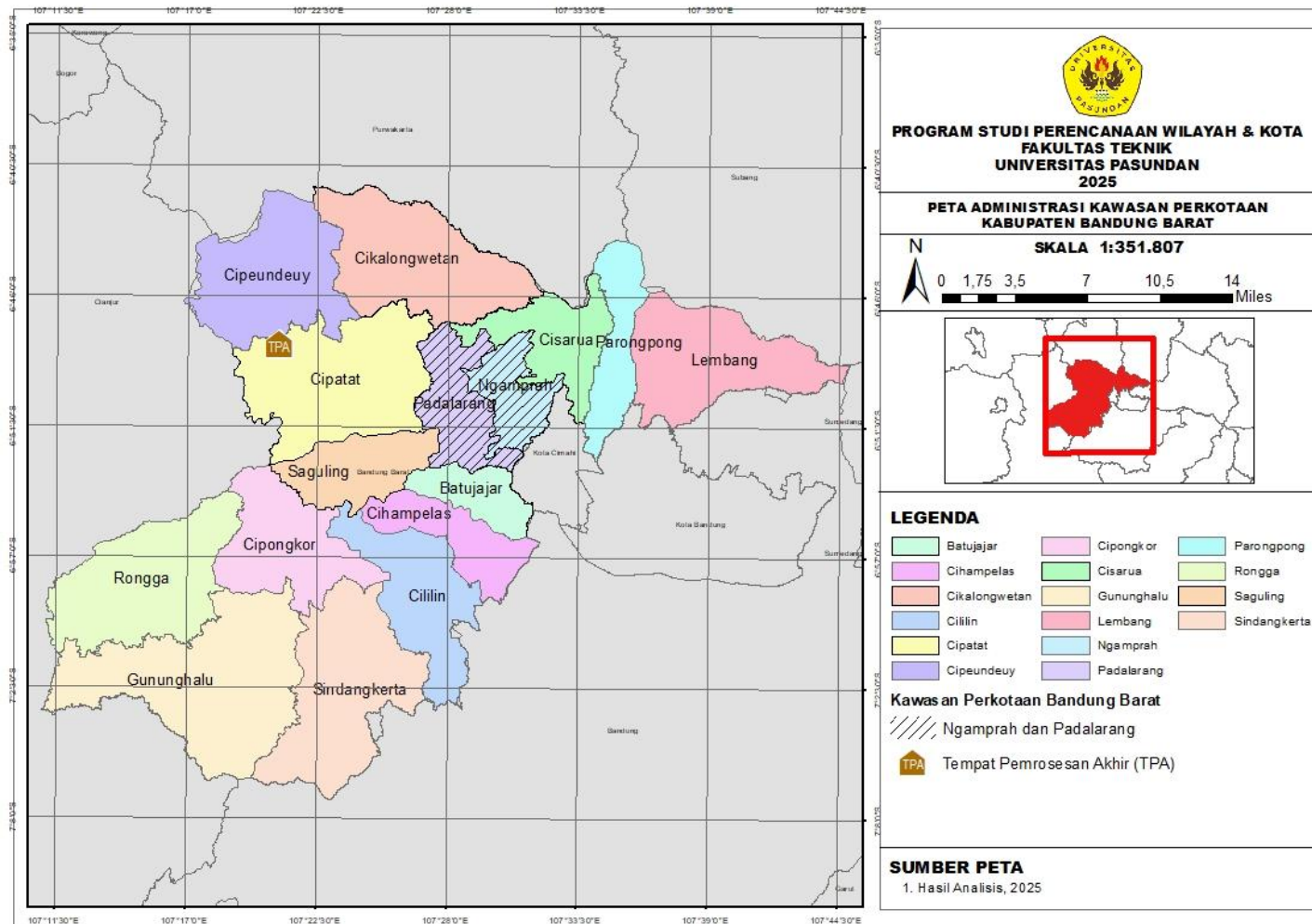
Tabel IV. 3 Luas Ruang Lingkup Wilayah Penelitian

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Timbulan Sampah (ton/hari)
Padalarang	178.903	51,40	3.480	74,99

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Timbulan Sampah (ton/hari)
Laksanamekar	19.347	4,71	4.320	9,67
Cimerang	5.021	5,12	926	2,51
Cipeundeuy	14.014	5,04	2.626	7,01
Kertajaya	21.003	4,39	4.519	10,50
Jayamekar	19.875	5,77	3.254	9,94
Padalarang	36.443	5,11	6.736	18,22
Kertamulya	27.933	2,48	10.639	13,97
Ciburuy	21.312	5,66	3.557	10,66
Tagogapu	11.736	5,79	1.915	5,87
Campakamekar	15.315	7,80	1.855	7,66
Ngamprah	169.910	35,99	4.721	76,54
Cimareme	10.562	2,24	4.715	5,28
Gadobangkong	18.581	1,49	12.470	9,29
Tanimulya	39.369	2,3	17.117	19,68
Pakuhaji	9.880	3,17	3.117	4,94
Cilame	41.479	6,69	6.200	20,74
Margajaya	19.611	1,24	15.815	9,81
Mekarsari	17.182	1,97	8.722	8,59
Ngamprah	8.557	1,52	5.630	4,28
Sukatani	8.088	4,63	1.747	4,04
Cimanggu	7.736	6,12	1.264	3,87
Bojongkoneng	5.956	4,62	1.289	2,98

Sumber : Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2024

Dari segi kondisi penduduk dilihat dari wilayah/kecamatan, Kecamatan Padalarang dan Kecamatan Ngamprah menempati posisi kedua dan ketiga untuk urutan kecamatan dengan penduduk terbanyak, sebanyak 178.903 jiwa dan 169.910 jiwa. Untuk tingkat kepadatan Kecamatan Ngamprah dan Kecamatan Padalarang berada di urutan kesatu dan kedua sebagai kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi.



Gambar IV. 7 Peta Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah

4.2.3 Kondisi Persampahan Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah

A. Sumber Sampah

Sumber sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah berdasarkan data dari website Sampah Kita yang dibuat oleh Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Tabel IV. 4 Sumber Sampah Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah

Kelompok	Jumlah Sampah (ton/hari)
Permukiman	2,79
Pasar	0,25
Industri	2,21

Sumber : Sampah Kita, 2025

4.2.3.1 Aspek Teknis Operasional

A. Pemilahan Sampah

Masyarakat secara umum dinilai belum melakukan pilah sampah dari sumbernya saha-usaha pemilahan telah dilakukan diberbagai sumber sampah. Salah satunya daerah-daerah yang terdapat Bank Sampah di sekitarnya. Beberapa daerah yang telah terlibat pemilahan adalah Bank Sampah Sukamaju Sejahtera dan Bank Sampah Bukit Berlian di Kecamatan Padalarang. Bank sampah telah dibentuk di berbagai wilayah dan mulai aktif menjalankan fungsinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, disebutkan bahwa bank sampah selain dari pengelolaan yang memang baik tapi juga didukung oleh CSR Indonesia Power. Contohnya bank sampah di Desa Sukamaju, Kecamatan Padalarang, berhasil meraih penghargaan dari Kementrian. Namun secara umum, bank sampah masih memiliki keterbatasan kapasitas dan fasilitas, termasuk belum adanya alat pencacah dan kendaraan pengangkut yang memadai. Sehingga, pemilahan sampah belum dilakukan secara optimal oleh semua rumah tangga.

Tabel IV. 5 Bank Sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah

No	Nama Bank Sampah	Alamat beserta Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang terkelola (Kg/Bulan)	Status	Wilayah Pelayanan
Kecamatan Ngamprah					
1	Bank Sampah Bina Masyarakat Mandiri	Kp. Kebon Kalapa No.42, RT 03 RW 02, Desa Tanimulya, Ngamprah, Kab. Bandung Barat	1.500	Aktif	RW 02

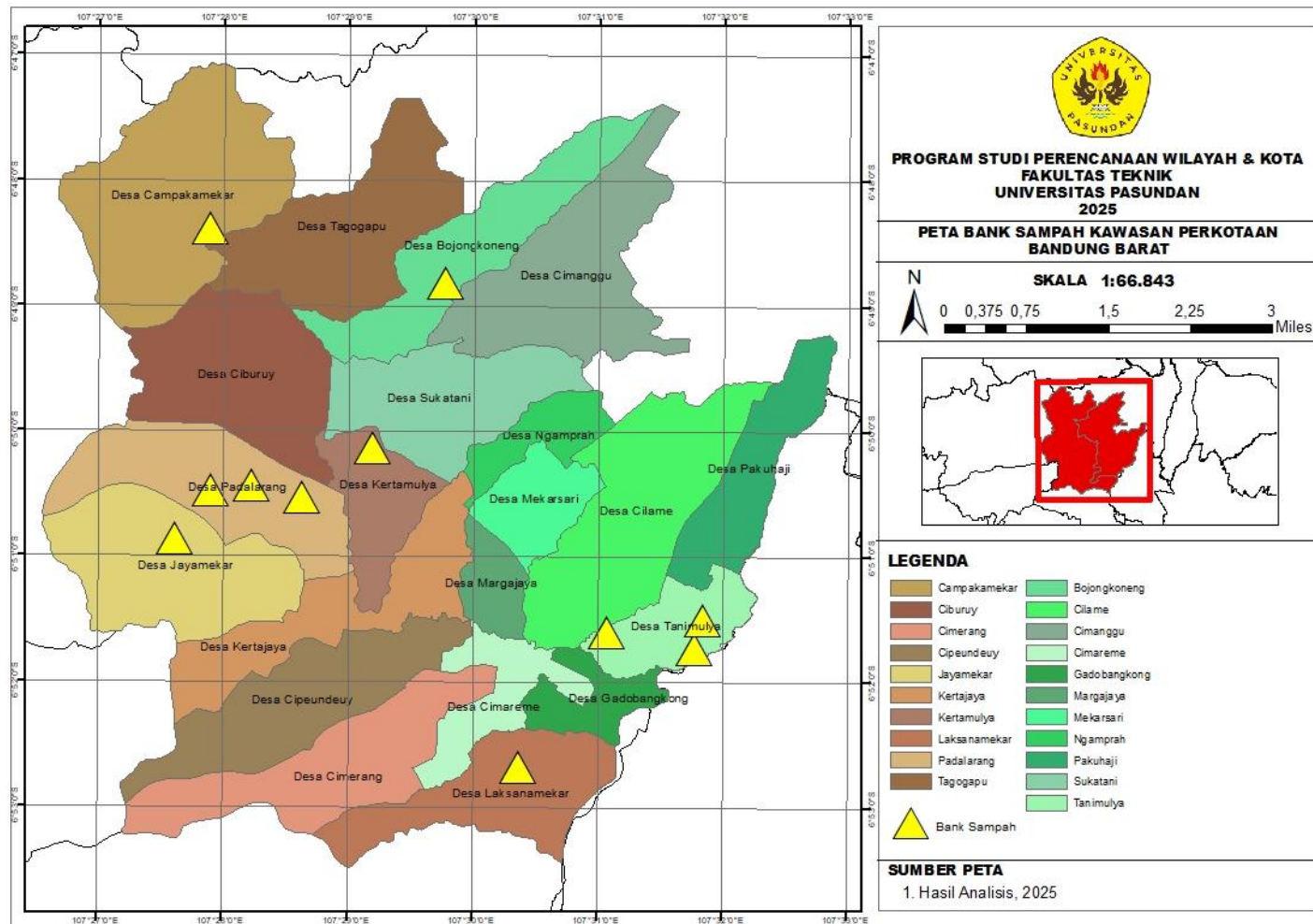
No	Nama Bank Sampah	Alamat beserta Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang dikelola (Kg/Bulan)	Status	Wilayah Pelayanan
2	Bank Sampah Bintang RT 9 RW 16	RW 16, Desa Tanimulya, Ngamprah, Kab. Bandung Barat	1.200	Aktif	RW 16
3	Bank Sampah Sahdu	Puri Cipageran Indah 2 RW 22 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat	1.200	Aktif	RW 22
4	Bank Sampah Cihampelas Asri	RW 4, Desa Bojongkoneng, Ngamprah, Kab. Bandung Barat	12.330	Aktif	RW 4
Kecamatan Padalarang					
1	Bank Sampah Cidadap Berseri	Kampung Cidadap RT 01/RW 12 Desa Padalarang, Kab. Bandung Barat	300	Aktif	RT 01 RW 12
2	Bank Sampah Sukamaju Sejahtera	Kampung Sukamaju Rt 04 Rw 06 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang, Kab. Bandung Barat	3.000	Aktif	RW 6
3	Bank Sampah Si Cikal	Desa Laksana Mekar, Padalarang, Kab. Bandung Barat	150	Tidak Aktif	Desa Laksanamekar, Padalarang
4	Bank Sampah Berkah Mandiri	Perum Pondok Padalarang Indah RW 28 Desa Padalarang, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat	38	Aktif	RW 28
5	Bank Sampah Unit Bukit Berlian	Perum Bukit Berlian, Kertamulya, Padalarang, Kab. Bandung Barat	10.000	Aktif	Perum Bukit Berlian
6	Bank Sampah Permata Resik	Komplek permata, Desa Jayamekar, Padalarang RW 25, Kab. Bandung Barat	900	Aktif	RW 25
7	Bank Sampah Rereongan	Desa Cempakamekar, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat	4.500	Aktif	Desa Cempakamekar , Padalarang

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025



Gambar IV. 8 Kondisi Eksisting Bank Sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ungamprah

Sampah dari sumber diangkut ke tempat pengumpulan sampah dengan cara beragam sesuai kondisi dan kemampuan wilayah setempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, disebutkan bahwa salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui bank sampah yang sanggup mengakomodir pengangkutan sampah organik dari tingkat RT, meskipun masih membutuhkan sarana dan prasarana pendukungnya. Sebagai contoh, bank sampah di wilayah Padalarang telah menggandeng karang taruna yang bersedia membantu dalam proses pengangkutan sampah dan telah memiliki jadwal pengangkutan. Namun demikian, sarana seperti kendaraan cator dan ember sampah hingga saat ini belum tersedia. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran, di mana kecamatan belum mampu untuk mengadakan ember sampah sampai ke level RT.



Gambar IV. 9 Peta Bank Sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah

B. Pengumpulan Sampah

Tempat Pemindahan Sementara (TPS) saat ini di wilayah pelayanan sampah Kabupaten Bandung Barat dibangun berupa bak sampah kontainer ukuran 6-10 m³ dan ada juga yang menggunakan konstruksi batu bata. Sampah yang ada di Kabupaten Bandung Barat sebagian besar masih berupa sampah domestik. Penghasil sampah didominasi oleh kegiatan rumah tangga. Persampahan domestik dewasa ini lebih banyak dimusnahkan dengan metode *on-site*, yaitu dengan dibakar dan dibuang ke lahan-lahan kosong di sekitar perumahan. Untuk saat ini, TPS di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah berjumlah dua di Kecamatan Padalarang :

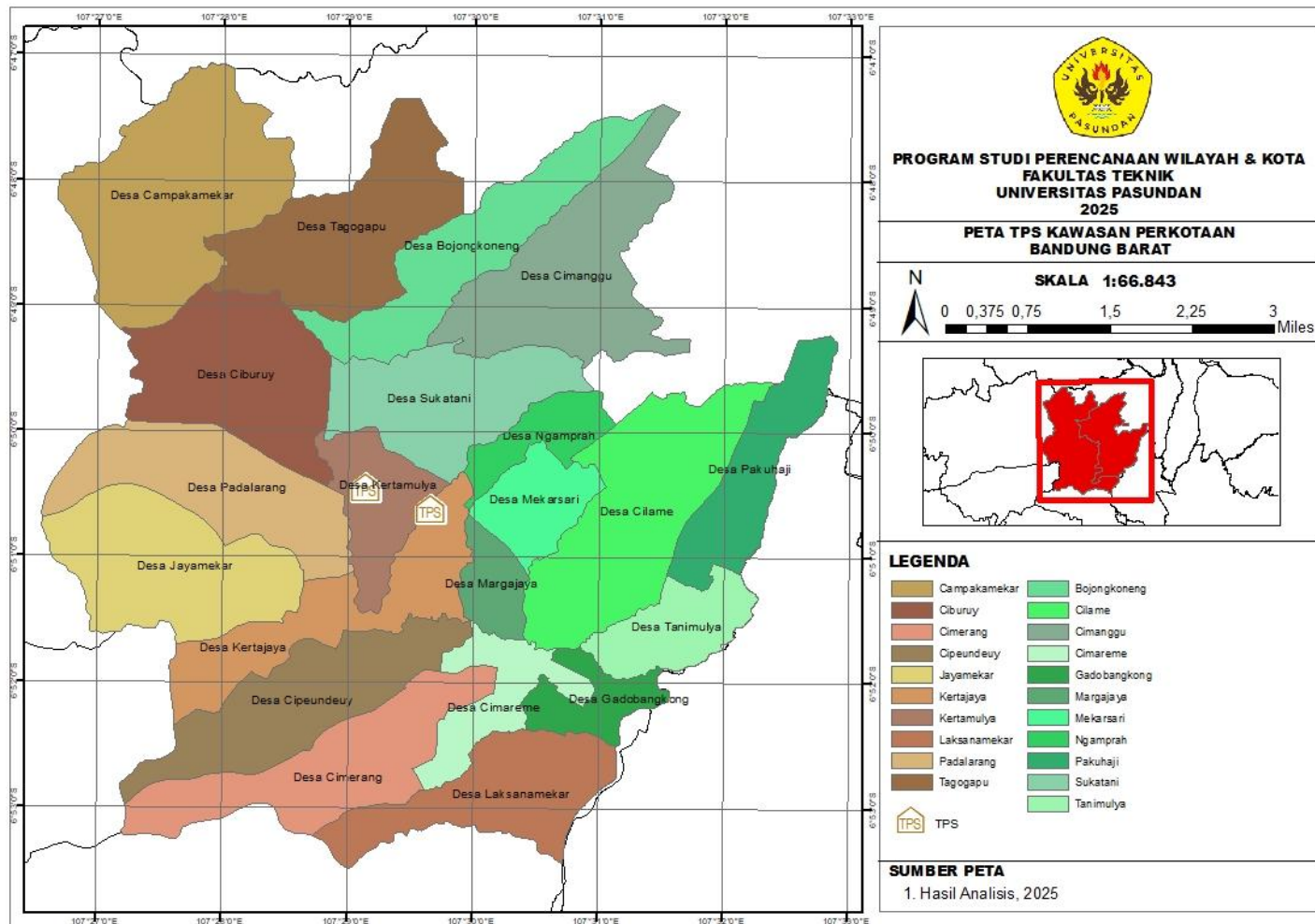
Tabel IV. 6 TPS di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah

No	TPS	Keterangan
1	Transfer Dipo Gedong Lima	Kondisi Aktif, Aset Pemda
2	Pasar Tagog Padalarang	Kondisi Aktif, Aset Pemda, bentuk Kontainer

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025



Gambar IV. 10 Kondisi Eksisting TPS di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah



Gambar IV. 11 Peta TPS di Kawasan Perkotaan Padalarang-Engamprah

C. Pengolahan Sampah

Di Kabupaten Bandung Barat belum dibangun TPST dan saat ini terdapat satu TPS3R yang aktif di masing-masing kecamatan kawasan perkotaan, sehingga pengolahan sampah belum berjalan optimal. Di sisi lain, perkembangan kawasan perumahan yang pesat di Kecamatan Padalarang dan Kecamatan Ngamprah turut meningkatkan volume timbunan sampah setiap harinya. Banyak perumahan baru yang belum terjangkau layanan pengangkutan sampah dari UPT Persampahan, sehingga sebagian warga memilih untuk membuang sampah secara sembarangan atau ke lokasi yang tidak semestinya (Anisa Dzulhikmah, 2025). TPS3R seperti yang terdapat di Tagog Apu sebenarnya dirancang untuk menjadi solusi lokal dalam pengolahan sampah, namun pelaksanaannya masih terkendala oleh keterbatasan modal dan operasional. Sementara itu, tawaran dari pihak swasta untuk pengelolaan sampah dengan teknologi pembakaran modern masih belum dapat diterapkan luas karena biaya bulanan yang dianggap tinggi oleh masyarakat (Agus, 2025).

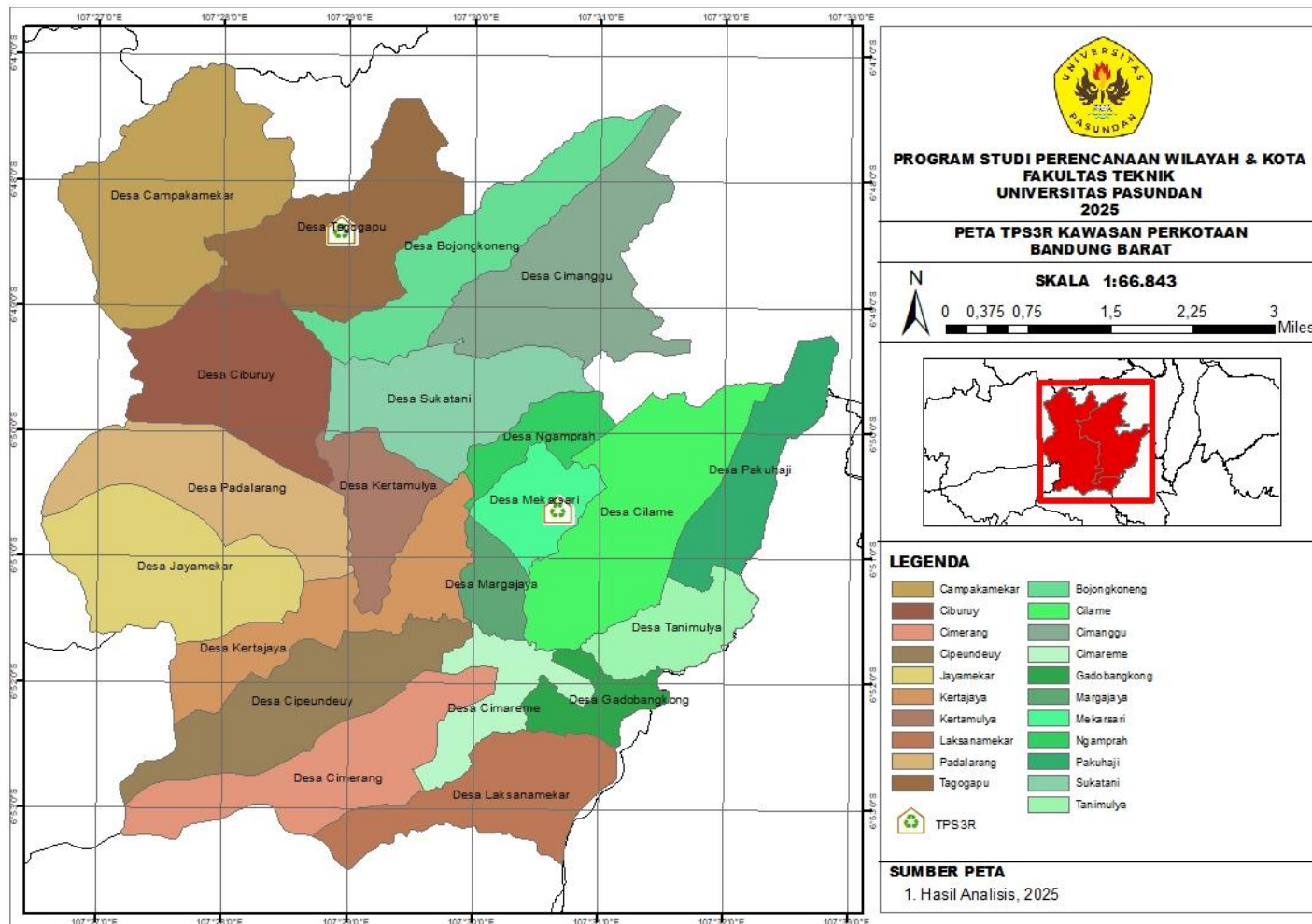
Tabel IV. 7 TPS3R di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah

No	Nama TPS3R		Lokasi TPS3R	Status Lahan TPS3R	Unit Pengelola TPS3R	Volume terolah (kg/hari)
1	TPS 3R Permata Jaya Tagog Apu	Pemilahan, Kompos	Tagogapu, Kecamatan Padalarang	Carik Desa	KPP/KSM	80
2	TPS 3R Saung Bersih Pemda Bandung Barat	Bata terawang, Pemilahan, Mesin cacah	Pemda Bandung Barat, Mekarsari, Ngamprah	Tanah Pemda	Tim Pengelola	500

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025



Gambar IV. 12 Kondisi Eksisting TPS3R di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah



Gambar IV. 13 Peta TPS3R di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah

Salah satu alternatif solusi yang mulai berkembang adalah Kecamatan Padalarang kerja sama dengan pegiat budidaya maggot skala besar di wilayah Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah. Maggot atau *larva Black Soldier Fly* (BSF) dinilai mampu mengolah sampah organik secara efisien dan ramah lingkungan (Anisa Dzulhikmah, 2025). Namun, penerapan solusi ini memerlukan kesiapan infrastruktur yang memadai di tingkat warga, seperti tersedianya sarana pengangkutan khusus seperti gerobak dan motor roda tiga (cator) bagi pengepul atau pengangkut. Selain itu, jika warga ingin langsung mengantarkan sampah organik ke lokasi pegiat maggot, perlu dipikirkan juga ketersediaan lahan transit di sekitar lokasi untuk mencegah terjadinya timbunan sampah baru. Kebersihan lingkungan, potensi polusi bau, serta kenyamanan warga sekitar harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaannya. Tak kalah penting, skema pemasaran hasil budidaya maggot juga harus direncanakan secara jelas agar kegiatan ini dapat berkelanjutan dan bernilai ekonomi, bukan hanya sebagai solusi sementara pengurangan sampah organik.

Tabel IV. 8 Pegiat Maggot di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah

No	Pegiat Maggot	Sampah terkelola (kg/hari)	Alamat
Kecamatan Ngamprah			
1	Pegiat Maggot Hegar 7	150	RW 7, Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah
2	Sekretariat Saung Maggot KBB	100	Kp. Bojongkoneng Landeuh Kec. Ngamprah RT 02 RW 11
3	Pegiat Maggot RW 2	100	RW 2, Desa Tanimulya, Kec. Ngamprah
4	Maggot Cimanggu	15	RW 11, Desa Cimanggu, Kec. Ngamprah
5	Pegiat Maggot Sukatani	100	RW 3, Desa Sukatani, Kec. Ngamprah
6	Plasma Saung Maggot KBB	100	Kp. Lebakgede, Desa Bojongkoneng, Kec. Ngamprah
7	Plasma Saung Maggot KBB	100	Kp. Cipulus, Desa Ngamprah, Kecamatan Ngamprah
8	Plasma Saung Maggot KBB	100	Puri Cipageran Indah 2 C-3 RT 05 RW 20, Tanimulya, Ngamprah
9	Plasma Saung Maggot KBB	100	Kp. Ciburial rt 003 rw 008, Margajaya, Ngamprah
10	Plasma Saung Maggot KBB	100	Kp. Pasirkuntul, Desa Bojongkoneng, Ngamprah
11	Plasma Saung Maggot KBB	100	Kp. Cihaliwung Wetan, Desa Sukatani, Ngamprah

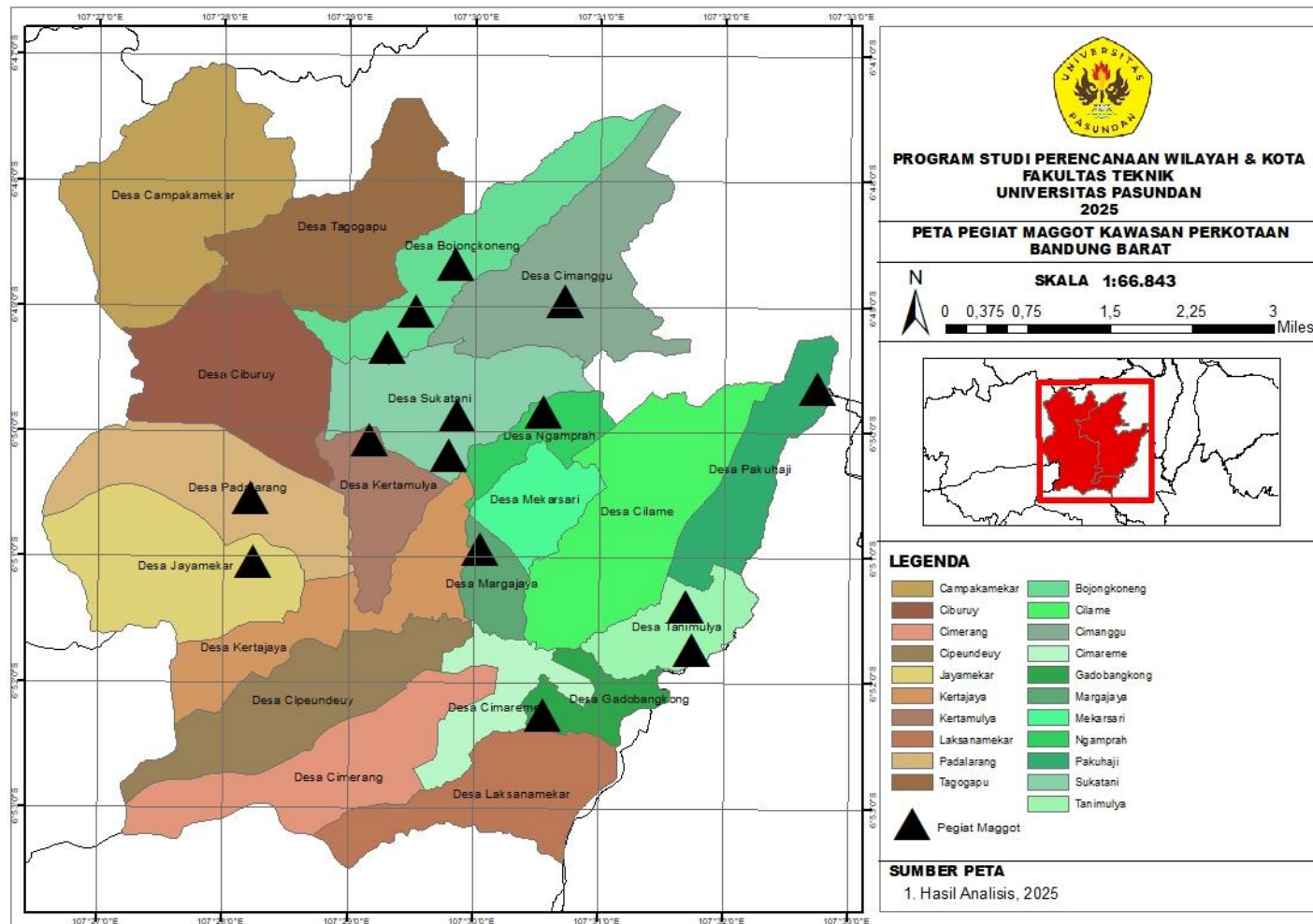
No	Pegiat Maggot	Sampah terkelola (kg/hari)	Alamat
12	Plasma Saung Maggot KBB	100	Kp. Cikawati RT 02 RW 06 Desa Pakuhaji Kec. Ngamprah
Kecamatan Padalarang			
1	Plasma Saung Maggot KBB	100	Kp. Kepuh, Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang
2	Plasma Saung Maggot KBB	100	Kp. Gunung bentang Desa Jayamekar, Padalarang
3	Maggot Bukit Berlian	135	Perum Bukit Berlian, Kertamulya, Padalarang

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025



**Gambar IV. 14 Kondisi Eksisting Pegiat Maggot di Kawasan Perkotaan Padalarang-
Ngamprah**

Maka, dengan adanya bank sampah, TPS3R, dan pegiat maggot, pengurangan volume sampah dari sumber menjadi lebih efektif dan terarah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat menggalakan ketiga sarana persampahan tersebut yang diharapkan dapat mengurangi volume sampah dari sumbernya, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pengelolaan sampah.



Gambar IV. 15 Peta Pegiat Maggot di Kawasan Perkotaan Padalarang-Engamprah

D. Pengangkutan Sampah

Pada Kondisi Normal Rata-rata Pengangkutan sampah yang dilakukan UPT Kebersihan adalah sebanyak 34 ritase (1 ritase ~ 12 m³ Dump Truck). Namun, pada akhir tahun 2024 terjadi pembatasan kiriman ke TPA Sarimukti dikarenakan kapasitas Sarimukti yang tidak akan mencukupi sampai pada TPA baru siap, yakni TPPAS Legok Nangka pada tahun 2029. Sehingga Ritase untuk Kabupaten Bandung Barat dikurangi dari yang semula 34 rit menjadi 17 rit. Akibatnya Pengangkutan Sampah ke TPA Sarimukti oleh UPT Kebersihan berkurang dari yang semula sekitar 138 ton/hari menjadi sekitar 102 ton/hari.

Tabel IV. 9 Jumlah Armada Pengangkut Kabupaten Bandung Barat

Jumlah Armada Pengangkut yang Beroperasi	2023	2024 – Mei	2025
Motor Roda 3	6	6	6
Pickup	5	5	5
Dump Truck	26	30	30
Armroll Truck	8	11	11

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025



Gambar IV. 16 Armada Pengangkutan Sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah

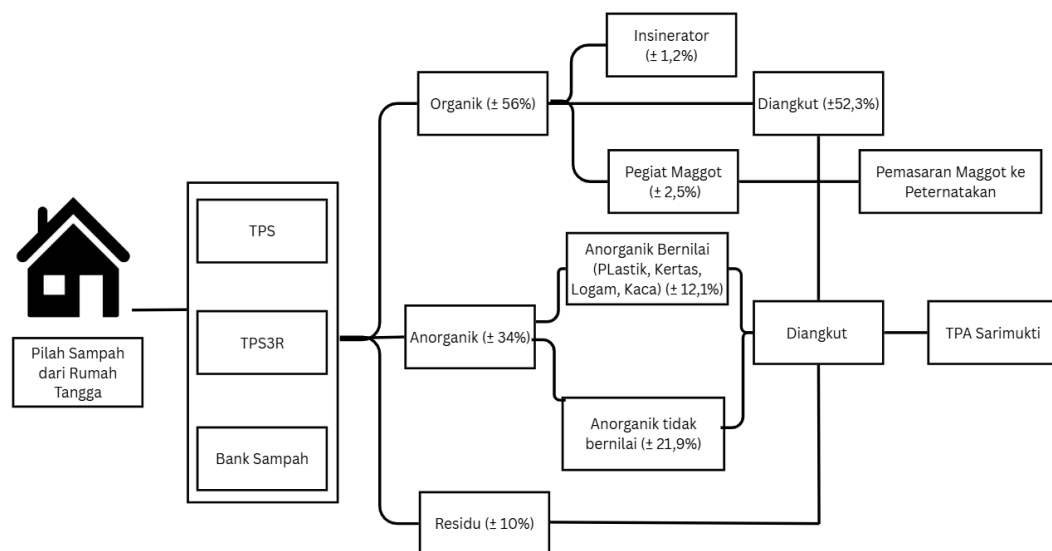
E. Pemrosesan Akhir Sampah

Lokasi tempat pemrosesan akhir sampah Kabupaten Bandung Barat berada di TPK Regional Sarimukti yang terletak di petak 12, RPH Cipatat, BKPH Padalarang, KPH Bandung Utara, Desa Sarimukti Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat. Lokasi TPK Sarimukti merupakan hujan jati dengan luas areal 21,2

Ha berjarak 46 km dari Kota Bandung, digunakan sejak tanggal 28 Mei 2006 untuk menampung sampah dari Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Sistem operasi pengelolaan sampah di TPK Sarimukti dilakukan secara *Controlled Landfill* serta terdapat kegiatan pengomposan didalamnya.

Pada pengelolaan sampah yang ada, sampah organik sebagian besar diolah melalui sistem pengelolaan berbasis masyarakat seperti Bank Sampah, dengan beberapa sampah yang diolah melalui pegiat maggot dan insinerator. Selain itu, terdapat sistem pemilahan yang dilakukan pada sumber sampah, namun implementasinya masih belum merata di seluruh desa.

Dalam hal pengelolaan sampah anorganik, beberapa sampah berhasil dipisahkan dan didaur ulang, namun sebagian besar masih berakhir di TPA Sarimukti. Sampah anorganik yang tidak terkelola dengan baik, seperti plastik, kaca, dan logam, memerlukan pengelolaan lebih lanjut melalui daur ulang. Sampah residu yang tidak dapat didaur ulang tetap diangkut dan dibuang di TPA.



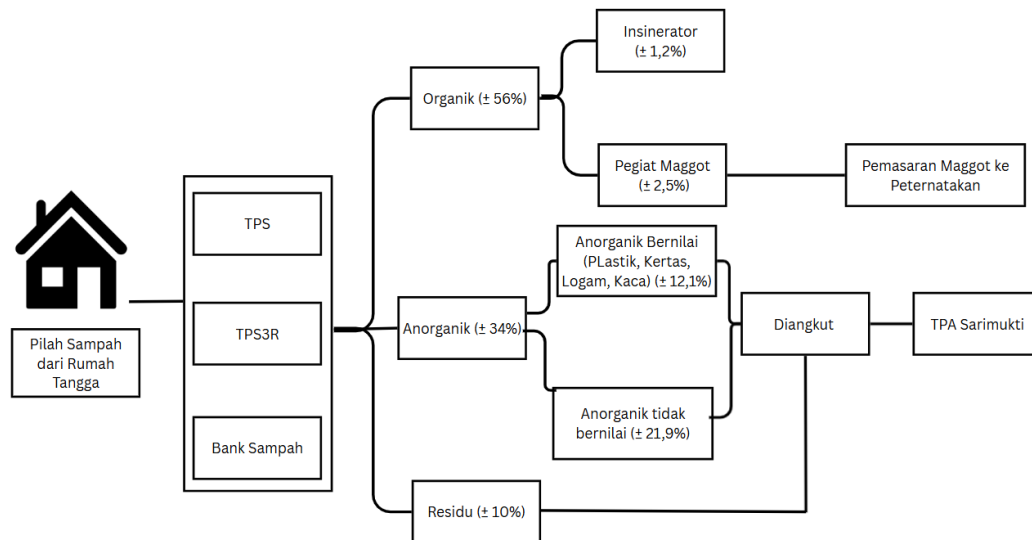
Gambar IV. 17 Skema Pengelolaan Rumah Tangga Eksisting di Perkotaan Padalarang-Ngamprah

Berikut adalah persentase sampah yang berhasil terkelola berdasarkan data yang ada:

Tabel IV. 10 Persentase Sampah Berhasil Terkelola

Fasilitas	Jumlah Sampah Terkelola (Kg/Bulan)	Persentase Sampah Terkelola (%)
Bank Sampah	33,730 Kg (Total)	10-20%
Pegiat Maggot	5,000 Kg	1-3%
Insinerator	12,500 Kg	4-5%
TPA Sarimukti	100,000 Kg	75-80%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025



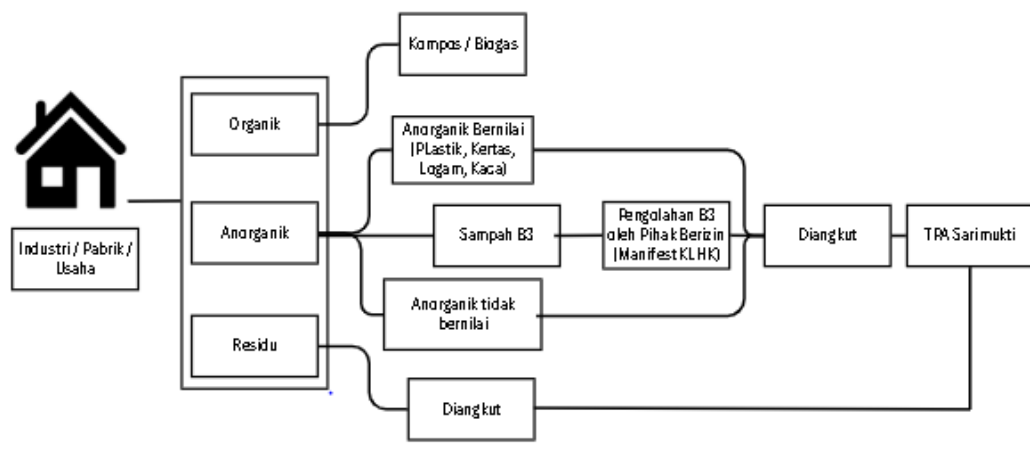
Gambar IV. 18 Skema Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Ideal di Perkotaan Padalarang-Ngamprah

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Gambar IV.18 menunjukkan skema ideal pengelolaan persampahan yang, dimulai dari pemilahan sampah dipilah dari rumah tangga dan didistribusikan ke TPS, TPS3R, maupun bank sampah. Sampah organik sebagian diolah melalui pegiat maggot dan insinerator, sehingga sudah tidak ada yang diangkut ke TPA Sarimukti. Sehingga berbeda dengan skema di kondisi eksisting yang dimana masih terdapat sampah organik yang diangkut ke TPA Sarimukti. Sampah anorganik terbagi menjadi anorganik bernilai (plastik, logam, kertas, kaca) yang masuk ke bank sampah/TPS3R untuk didaur ulang, serta anorganik tidak bernilai yang diangkut langsung ke TPA Sarimukti. Sedangkan sampah residu seluruhnya dibuang ke TPA.

Selain timbulan sampah rumah tangga, kawasan Padalarang–Ngamprah juga menghasilkan sampah dari aktivitas industri dan usaha. Karakteristik sampah

industri lebih beragam karena terdiri atas sampah organik, anorganik, residu, serta limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).



Gambar IV. 19 Skema Pengelolaan Sampah Industri Ideal Perkotaan Padalarang-Ngamprah

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sistem pengelolaan sampah industri idealnya dijelaskan melalui skema pada Gambar IV.19, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pemilahan di Sumber

Pada tahap pemilahan di sumber, sampah industri terlebih dahulu dipisahkan berdasarkan karakteristiknya. Sampah organik umumnya diarahkan ke fasilitas pengolahan, baik dalam bentuk kompos maupun biogas. Sementara itu, sampah anorganik dipilah menjadi dua kategori, yaitu anorganik bernilai seperti plastik, kertas, logam, dan kaca yang dapat dimanfaatkan kembali melalui proses daur ulang maupun bank sampah industri, serta anorganik tidak bernilai yang pada akhirnya bersama dengan sampah residu diangkut menuju TPA Sarimukti. Adapun limbah B3, seperti oli bekas, baterai, limbah medis, dan limbah kimia, tidak diperkenankan dibuang ke TPA, melainkan wajib dikelola oleh pihak ketiga yang memiliki izin resmi sesuai ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

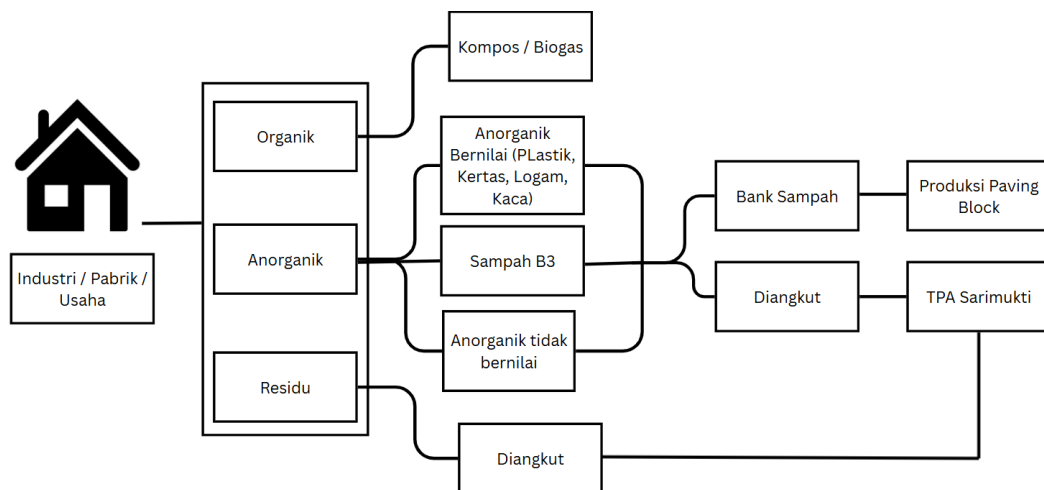
2. Pengangkutan dan Pengolahan

Industri umumnya bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) maupun pihak ketiga untuk pengangkutan sampah non-B3. Adapun

pengelolaan B3 wajib mengikuti sistem *manifest* untuk menjamin pencatatan, pengangkutan, dan pengolahan sesuai standar yang berlaku.

3. Pemrosesan Akhir

Sampah organik diolah menjadi kompos atau biogas, sampah anorganik bernilai dimanfaatkan melalui daur ulang, sedangkan sampah residu dan anorganik tidak bernilai ditimbun di TPA Sarimukti. Limbah B3 diproses lebih lanjut pada insinerator khusus atau fasilitas pengolahan berizin sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.



Gambar IV. 20 Skema Pengelolaan Sampah Industri di Eksisting Perkotaan Bandung Barat

Sedangkan untuk di kondisi eksisting terdapat perbedaan utama dengan skema ideal terletak pada aspek pengelolaan limbah B3. Dalam skema ideal, pengelolaan limbah B3 seharusnya dilakukan oleh pihak berizin sesuai dengan mekanisme manifest Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Namun, pada kondisi eksisting di lapangan, pengolahan limbah B3 tersebut belum tersedia. Meskipun demikian, terdapat inisiatif positif di salah satu bank sampah di Padalarang, yang bahkan termasuk dalam empat bank sampah terbaik di Indonesia, dengan melakukan inovasi pemanfaatan sampah yang sudah tidak bernilai ekonomis menjadi produk paving block.

Dengan demikian, pengelolaan sampah di kawasan Padalarang–Ngamprah belum sepenuhnya menerapkan prinsip pengelolaan berkelanjutan yang sesuai dengan kebijakan nasional. Akan tetapi, sudah ada rencana untuk

mengimplementasikan sesuai dengan arahan kebijakan nasional. Namun, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam mencapai keberhasilan pengelolaan sampah ideal, antara lain keterbatasan fasilitas pengolahan, sarana pengangkutan yang belum merata, serta rendahnya kepatuhan sebagian industri kecil dalam melakukan pemilahan dan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan regulasi.

Hasil menunjukkan bahwa capaian pengelolaan baru mencapai 22,63%, terdiri atas pengurangan 13,34% dan penanganan 18,13%, sehingga masih jauh dari target Jakstranas 2025. Sampah anorganik bernilai sebagian telah dikelola melalui bank sampah dengan kapasitas sekitar 34,9 ton/bulan, sementara sebagian besar timbunan sampah masih berakhir di TPA Sarimukti.

Selain itu, pengelolaan sampah industri turut berperan, dengan organik diolah menjadi kompos atau biogas, anorganik bernilai masuk ke proses daur ulang, sedangkan residu dan anorganik tidak bernilai dibuang ke TPA. Adapun limbah B3 harus ditangani oleh pihak berizin sesuai ketentuan KLHK. Secara keseluruhan, pengelolaan sampah di kawasan ini telah mengarah pada penerapan Jakstranas, namun masih menghadapi keterbatasan sarana, keterjangkauan fasilitas, serta rendahnya kepatuhan pemilahan di sumber.

4.2.3.2 Aspek Kelembagaan

Permasalahan persampahan di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah merupakan isu yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Setiap individu menghasilkan sampah, namun tidak semua memiliki kesadaran dan peran aktif dalam pengelolaannya. Secara umum, permasalahan utama dalam pengelolaan sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah meliputi terbatasnya anggaran, kurangnya fasilitas pengangkutan dan pengolahan, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Masalah ini semakin diperparah dengan kondisi Tempat Pembuangan Akhir Sarimukti (TPA) yang mengalami kelebihan kapasitas sejak tahun 2024. Gagalnya proses pelelangan perluasan TPA menyebabkan timbunan sampah di berbagai wilayah, terutama di Kecamatan Padalarang dan Kecamatan Ngamprah, hingga menumpuk di pinggir jalan dan permukiman warga.

Sebagian besar wilayah mengandalkan kerja sama dengan UPT Kebersihan dalam proses pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah ke TPA

Sarimukti. Namun, beberapa RW dan desa mulai mengembangkan sistem mandiri melalui bank sampah, TPS3R, dan budidaya maggot (Agus, 2025). TPS3R memiliki peran penting dalam memilah dan mengolah sampah sebelum residunya dibuang ke TPA, sehingga membantu mengurangi beban TPA. Upaya pelibatan kecamatan dan desa dalam pengelolaan sampah hanya sebatas koordinasi dan fasilitasi, sementara banyak desa belum memiliki sistem pengelolaan mandiri yang memadai. Beberapa desa membakar sampah sendiri atau bekerja sama dengan pegiat lingkungan, tetapi upaya ini masih terbatas karena kurangnya sarana dan prasarana, seperti gerobak, cator, dan tempat pengolahan yang memadai (Cucun, 2025).

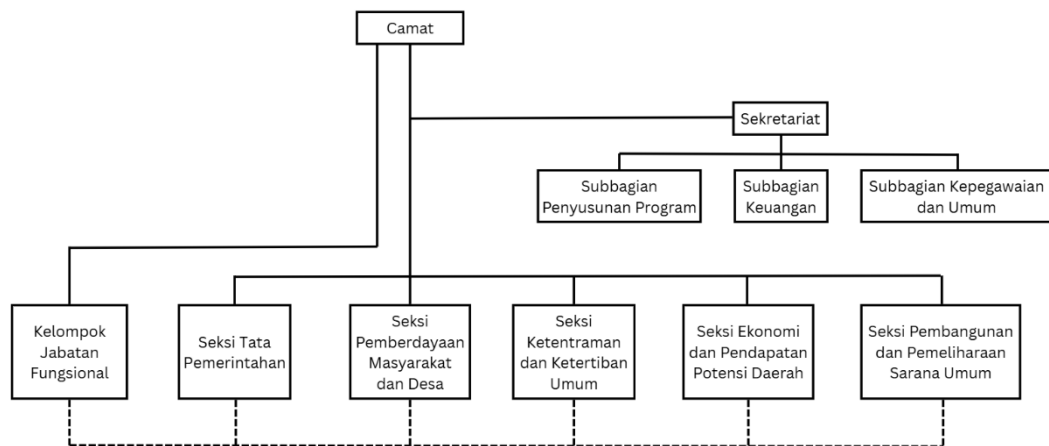
Adapun beberapa inovasi yang diajukan kepada Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah, yaitu mesin MOTAH (Mobil Tempur Sampah), teknologi pembakaran sampah bantuan militer yang ramah lingkungan dan tidak menghasilkan asap, namun memerlukan proses pemanasan awal, tenaga operator, serta biaya operasional yang cukup besar. Kemudian Aplikasi “Sampah Kita”, sistem digital dari Provinsi Jawa Barat untuk mencatat dan memantau jumlah serta jenis sampah di tingkat RT, RW, desa. Adapun tawaran dari pihak swasta untuk mengelola sampah dengan teknologi tertentu, biayanya (Rp100.000–150.000/KK/bulan) dinilai memberatkan warga. Terakhir adalah inovasi Satlinmas Penyuluh Sampah, program dari Satpol PP Provinsi yang melibatkan satlinmas desa untuk sosialisasi pilah sampah menggunakan sepeda dan speaker rekaman suara keliling desa yang diharapkan dapat merubah mindset dan pola pikir masyarakat terhadap pilah sampah (Anisa Dzulhikmah).



Gambar IV. 18 Website Aplikasi Sistem Digital Sampah Kita

Pengelolaan sampah juga mulai melibatkan komunitas lokal seperti Karang Taruna dan pengurus RW dalam kegiatan pengangkutan di tingkat masyarakat. Namun, hambatan utama masih terletak pada keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana. Disebutkan bahwa SDM ada namun masih minim pengetahuan dalam pelaksanaan di lapangan. Banyak kegiatan bergantung pada tenaga sukarela dan belum ditunjang peralatan seperti mesin pencacah atau pelebur plastik, padahal alat-alat ini dapat meningkatkan nilai ekonomis sampah. Dikarenakan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk pengelolaan sampah masih belum mencukupi kebutuhan operasional, di mana retribusi dari masyarakat hanya mampu menutupi sekitar 20–25% dari total biaya, sehingga diperlukan subsidi dari pemerintah daerah (Cecep, 2025).

Pemerintah telah mengesahkan peraturan daerah mengenai larangan membuang sampah sembarangan, aturan ini sudah ada dan bisa menjadi dasar hukum untuk memberikan sanksi atau denda. Sayangnya, implementasi di lapangan masih lemah. Masih diperlukan sistem penegakan hukum yang kuat, termasuk pemantauan dengan CCTV, petugas penindak, serta mekanisme penarikan denda yang transparan. Namun, potensi untuk menjadikan regulasi ini sebagai alat edukatif dan represif terhadap pelanggar masih sangat besar, apalagi jika dilengkapi dengan sistem bukti seperti CCTV di titik rawan pembuangan sampah liar. Pemerintah daerah juga sudah memasukkan program pengelolaan sampah dalam dokumen perencanaan pembangunan (renstra), termasuk rencana pengadaan alat *incinerator* yang akan disebar ke berbagai kecamatan pada tahun-tahun mendatang (Anisa Dzulhikmah, 2025).



Gambar IV. 21 Struktur Kelembagaan Kecamatan

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Faktor-Faktor Internal dan Eksternal Pengelolaan Persampahan dalam Aspek Teknis Operasional dan Kelembagaan di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah

Analisis terhadap pengelolaan sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah dilakukan dengan mengidentifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan tantangan). Identifikasi ini didasarkan pada hasil wawancara mendalam dengan berbagai narasumber, termasuk Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Padalarang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat. Berikut adalah faktor internal dan eksternal yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara :

5.1.1 Faktor Internal

Faktor internal adalah segala potensi dan kendala yang berasal dari dalam kawasan perkotaan yang menjadi lokasi studi, yaitu meliputi Kecamatan Padalarang dan Kecamatan Ngamprah. Faktor internal ini mencakup aspek-aspek seperti teknik operasional, infrastruktur persampahan dan sumber daya manusia. Identifikasi dilakukan melalui survey lapangan, wawancara dengan dinas atau instansi terkait persampahan, serta telaah terhadap data sekunder dari dinas terkait.

A. Teknis Operasional

Kegiatan pemilahan sampah dilakukan sejak dari sumbernya, yaitu di tingkat rumah tangga, dengan memisahkan antara sampah organik dan anorganik. Pemerintah provinsi dan kabupaten telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mendukung pengelolaan sampah, seperti Perda No. 1 Tahun 2021 tentang retribusi dan instruksi langsung dari gubernur dan bupati untuk memilah sampah dari rumah tangga. Pemerintah daerah juga sudah memasukkan program pengelolaan sampah dalam dokumen perencanaan pembangunan (renstra), termasuk rencana pengadaan alat *incinerator* yang akan disebar ke berbagai kecamatan pada tahun-tahun mendatang (Anisa Dzulhikmah, 2025). Ini menunjukkan adanya dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan. Hampir seluruh desa (sekitar 98% atau 10 Kecamatan dan

54 Desa) di Kabupaten Bandung Barat telah menjalin kerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Persampahan di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup. Artinya, sebagian besar wilayah sudah memiliki sistem pengangkutan sampah yang resmi, dimana petugas kebersihan mengangkut sampah dari desa atau RW ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Hal ini menjadi kekuatan penting karena menunjukkan adanya struktur dan sistem kerja yang sudah terbentuk dan berjalan.

Walaupun sudah ada pengangkutan sampah oleh UPT Kebersihan, warga menilai pengangkutan tersebut tidak efektif. Banyak warga yang sudah memilah sampah dari rumah, namun ketika sampah tersebut diangkut oleh petugas, semuanya tetap dicampur kembali di truk pengangkut. Ini membuat masyarakat enggan untuk melanjutkan pemilahan karena merasa tidak ada tindak lanjut dari upaya mereka dan menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memilah sampah masih rendah, sehingga menghambat jalannya program pengelolaan sampah yang baik (Anisa Dzulhikmah, 2025).

Pertumbuhan timbulan sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah dapat dilihat pada tabel timbulan sampah 10 tahun terakhir berikut :

Tabel V. 1 Timbulan Sampah Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah

Kecamatan	Timbulan (ton/hari)								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ngamprah	66,81	69,95	70,69	71,18	67,89	71,08	70,31	73,80	74,99
Padalarang	67,41	70,70	71,50	72,39	70,15	72,54	73,19	75,32	76,54

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Adapun capaian persentase pengelolaan sampah yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah berdasarkan perhitungan dari Dinas Lingkungan Hidup, sebagai berikut :

Diketahui,

- Jumlah penanganan/pengangkutan sampah KBB= 50.513,596 ton/tahun

Jumlah penanganan/pengangkutan sampah Perkotaan Bandung Barat

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Penduduk Perkotaan Bandung Barat}}{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Barat}} \times \text{Jumlah Penanganan Sampah KBB} \\
 &= \frac{379.000 \text{ jiwa}}{1.907.800 \text{ jiwa}} \times 50.513,596 \text{ ton/tahun} \\
 &= 10.034,937 \text{ ton/tahun}
 \end{aligned}$$

- Jumlah pengurangan sampah = 34,57 ton/hari (DLH, 2025) x 365

$$= 12.618,05 \text{ ton/tahun}$$

Jumlah pengurangan sampah Perkotaan Bandung Barat

$$= \frac{\text{Jumlah Penduduk Perkotaan Bandung Barat}}{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Barat}} \times \text{Jumlah Pengurangan Sampah KBB}$$

$$= \frac{379.000 \text{ jiwa}}{1.907.800 \text{ jiwa}} \times 12.618,05 \text{ ton/tahun}$$

$$= 7.381,54 \text{ ton/tahun}$$

- Timbulan Sampah = Jumlah Penduduk Perkotaan Bandung Barat x timbulan sampah x 365

$$= 379.000 \times 0,5 \text{ kg/hari} \times 365$$

$$= 55.334.000 \text{ kg/tahun}$$

$$= 55.334 \text{ ton/tahun}$$

Maka, jika dimasukan kedalam rumus persentase penanganan dan pengurangan sampah adalah sebagai berikut :

Persentase Penanganan Sampah

$$\frac{\text{Jumlah Penangan Sampah}}{\text{Jumlah Timbulan Sampah}} \times 100\% = \frac{10.034,937 \text{ ton/tahun}}{55.334 \text{ ton/tahun}} \times 100\%$$

$$= 18,13\%$$

Persentase Pengurangan Sampah

$$\frac{\text{Jumlah Pengurangan Sampah}}{\text{Jumlah Timbulan Sampah}} \times 100\% = \frac{7.381,54 \text{ ton/tahun}}{55.334 \text{ ton/tahun}} \times 100\%$$

$$= 13,34\%$$

Maka, berdasarkan hasil perhitungan persentase capaian pengelolaan sampah di kawasan perkotaan Kabupaten Bandung Barat, diketahui bahwa total pengelolaan sampah baru mencapai 31,47% dari keseluruhan timbulan sampah. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah (Jakstranas), yaitu pengurangan sebesar 30% dan penanganan sebesar 70% pada tahun 2025, maka capaian di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah masih tergolong rendah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan upaya pengelolaan sampah, khususnya pada aspek pengurangan di sumber, melalui penguatan kelembagaan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penyediaan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

B. Infrastruktur

Meskipun belum merata, sudah ada beberapa sarana dasar persampahan seperti bank sampah, TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle*), dan budidaya maggot. Misalnya, di Kecamatan Padalarang terdapat bank sampah yang sudah mendapatkan penghargaan dari pemerintah berkat kinerjanya. Keberadaan infrastruktur ini penting sebagai awal dari pengurangan volume sampah sebelum dibawa ke TPA. Kemudian, ada pegiat maggot yang besar di Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, sebagai salah satu upaya mengelola sampah organik.

Namun, anggaran yang dialokasikan untuk mengelola sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah masih belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan operasional dan sarana prasarana pengelolaan sampah. Retribusi yang dipungut dari masyarakat pun belum mampu menutupi keseluruhan biaya pengelolaan, di mana besaran retribusi tersebut hanya mampu meng-*cover* sekitar 20–25% dari total biaya manajemen pengelolaan sampah. Meskipun demikian, upaya untuk menaikkan besaran retribusi menjadi kendala karena menimbulkan keberatan dari masyarakat. Untuk mengatasi kekurangan ini, pemerintah daerah memberikan subsidi guna menutupi selisih biaya yang tidak terjangkau oleh retribusi, sehingga layanan pengelolaan sampah tetap dapat berjalan.

C. Sumber Daya Manusia

Di lapangan, jumlah tenaga kerja yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan. Meskipun sudah banyak pelatihan dilakukan, implementasinya sering terkendala oleh minimnya insentif, sehingga beberapa petugas kebersihan tidak mendapatkan upah yang layak. Ini berdampak pada semangat kerja dan efektivitas pengelolaan. Pengelolaan sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah juga mendapat dukungan dari komunitas seperti karang taruna yang digiat dan bersedia untuk mengangkut sampah dari RT oleh bank sampah, serta Satlinmas yang terlibat dalam penyuluhan ke masyarakat. Inovasi seperti penggunaan sepeda oleh Satlinmas desa yang dilengkapi speaker dengan rekaman suara ajakan memilah sampah menjadi upaya edukasi yang kreatif dan membumi.

5.1.2 Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan hal-hal di luar kawasan perkotaan studi yaitu di tingkat Kabupaten Bandung Barat hingga provinsi yang berpotensi memengaruhi sistem pengelolaan sampah. Faktor eksternal ini mencakup indikator seperti kolaborasi, teknologi dan inovasi, regulasi, pembiayaan, dan partisipasi masyarakat. Identifikasi dilakukan melalui survey lapangan, wawancara dengan dinas atau instansi terkait persampahan, serta telaah terhadap data sekunder dari dinas terkait.

A. Timbulan Sampah

Timbulan sampah merupakan salah satu indikator penting dalam memahami permasalahan pengelolaan sampah di wilayah Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah. Jumlah Timbulan sampah merupakan hasil kali jumlah penduduk x timbulan per jiwa. Berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001, timbulan sampah rata-rata di permukiman adalah 0,5–0,6 kg/orang/hari atau setara dengan 2,5–3 liter/orang/hari. Berdasarkan jumlah penduduk dari Badan Pusat Statistik naik tiap tahunnya, sehingga timbulan sampah otomatis naik tiap tahunnya pula. Diperparah dengan perumahan baru yang terus bertambah di Kecamatan Padalarang dan tidak semuanya masuk layanan UPT Persampahan. Akibatnya, sampah dari penghuni perumahan tersebut dibuang sembarangan atau bahkan dibakar sendiri oleh warga. Sehingga menjadi tantangan besar karena semakin sulit mengontrol volume dan lokasi pembuangan sampah liar dikarenakan kondisi TPA Sarimukti yang *overload*. Sebelumnya, pada tahun 2024 sudah ada upaya memperluas lahan TPA Sarimukti namun gagal, tapi kemudian di tahun ini dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi menyebutkan bahwa sudah ada penambahan luas lahan untuk pembuangan sampah sampai dengan tahun 2028. Pertumbuhan timbulan sampah dapat dilihat pada tabel timbulan sampah 10 tahun terakhir berikut :

Tabel V. 2 Timbulan Sampah Kabupaten Bandung Barat 10 Tahun Terakhir

Kecamatan	Timbulan (ton/hari)								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rongga	22,23	22,44	21,36	21,19	24,27	24,60	24,60	24,60	25,80
Gununghalu	30,34	30,68	32,05	32,05	31,67	32,05	31,99	32,05	33,40
Sindangkerta	27,60	27,94	28,29	30,41	29,38	29,84	30,20	28,18	31,52

Kecamatan	Timbulan (ton/hari)								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cililin	35,99	36,40	36,66	38,15	39,47	38,45	39,20	38,46	40,80
Cihampelas	45,98	46,44	46,95	52,15	53,06	53,47	53,16	55,39	59,08
Cipongkor	36,10	36,44	36,83	36,83	40,00	39,92	40,86	41,31	43,32
Batujajar	36,47	39,18	39,73	43,13	45,45	43,95	44,63	45,45	47,04
Saguling	11,64	12,40	12,72	13,14	13,52	13,72	13,99	14,05	14,76
Cipatat	52,72	53,23	53,80	40,26	56,12	56,89	57,47	58,27	59,64
Padalarang	67,41	70,70	71,50	72,39	70,15	72,54	73,19	75,32	76,54
Ngamprah	66,81	69,95	70,69	71,18	67,89	71,08	70,31	73,80	74,99
Parongpong	44,63	45,28	45,80	36,10	45,20	45,74	46,14	46,93	47,64
Lembang	77,82	78,67	79,56	79,14	79,05	79,90	80,48	82,08	82,76
Cisarua	29,66	29,95	30,24	26,56	31,66	32,12	32,47	32,87	33,76
Cikalongwetan	49,03	49,59	49,92	47,82	51,24	51,97	52,52	53,21	54,56
Cipeundeuy	32,40	33,16	33,40	33,25	35,20	35,69	36,06	36,55	37,44

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Adapun capaian persentase pengelolaan sampah yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah berdasarkan perhitungan dari Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bandung Barat, sebagai berikut :

Diketahui,

- Jumlah penanganan/pengangkutan sampah KBB= 50.513,596 ton/tahun
- Jumlah pengurangan sampah = 34,57 ton/hari (DLH, 2025) x 365
= 12.618,05 ton/tahun
- Timbulan Sampah = Jumlah Penduduk x timbulan sampah x 365
= 1.911.661 x 0,5 kg/hari x 365
= 279.113.506 kg/tahun
= 279.113,51 ton/tahun

Maka, jika dimasukan kedalam rumus persentase penanganan dan pengurangan sampah adalah sebagai berikut :

Persentase Penanganan Sampah

$$\frac{\text{Jumlah Penangan Sampah}}{\text{Jumlah Timbulan Sampah}} \times 100\% = \frac{50.513,596 \text{ ton/tahun}}{279.113,51 \text{ ton/tahun}} \times 100\% \\ = 18,11\%$$

Persentase Pengurangan Sampah

$$\frac{\text{Jumlah Pengurangan Sampah}}{\text{Jumlah Timbulan Sampah}} \times 100\% = \frac{12.618,05 \text{ ton/tahun}}{279.113,51 \text{ ton/tahun}} \times 100\% \\ = 4,52\%$$

Maka, berdasarkan hasil perhitungan persentase capaian pengelolaan sampah di kawasan perkotaan Kabupaten Bandung Barat, diketahui bahwa total pengelolaan sampah baru mencapai 22,63% dari keseluruhan timbulan sampah. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah (Jakstranas), yaitu pengurangan sebesar 30% dan penanganan sebesar 70% pada tahun 2025, maka capaian di Kabupaten Bandung Barat masih tergolong rendah.

B. Kolaborasi

Terdapat kolaborasi kelembagaan yang berjalan, meskipun belum sepenuhnya efektif. Telah terbentuknya struktur kelembagaan yang jelas, yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang membawahi UPT Kebersihan sebagai pelaksana operasional, serta adanya bidang khusus di DLH yang menangani perencanaan pengelolaan sampah. Pengelolaan anggaran secara menyeluruh berada di bawah DLH, dengan kebijakan anggaran ditentukan oleh Bappelitbangda sebagai koordinator anggaran seluruh SKPD. Selain itu, pengelolaan sampah juga melibatkan kolaborasi lintas dinas seperti Dinas Permukiman, Dinas PUTR, dan DLH, serta dukungan dari camat dan kepala desa berdasarkan instruksi dari tingkat gubernur dan bupati.

Salah satu peluang yang sangat potensial adalah adanya dukungan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari pihak swasta. Berdasarkan penjelasan Camat Padalarang, bank sampah di Desa Sukamaju mampu berjalan dengan baik bahkan sampai meraih penghargaan dari Kementerian karena adanya dukungan CSR dari *Indonesia Power*. Dukungan ini tidak hanya berupa dana, tetapi juga fasilitas dan pelatihan, sehingga sangat membantu dalam operasional bank sampah. Ini merupakan bukti bahwa sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta bisa menjadi solusi nyata dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Terdapat pegiat maggot besar di wilayah Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, yang siap bekerjasama dalam menangani sampah organik. Kerjasama ini membuka peluang besar karena metode pengelolaan sampah berbasis budidaya maggot dianggap efektif untuk mengurangi volume sampah organik. Maka dari itu, berkolaborasi dengan berbagai *stakeholder* dalam hal pengelolaan sampah sangat

dianjurkan supaya terciptanya teknis operasional pengelolaan sampah yang kolaboratif. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mewajibkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sampah, termasuk pembiayaan melalui APBN dan APBD sebagai dukungan biaya sarana prasarana seperti alat angkut (gerobak/cator) serta lahan untuk menampung sampah sementara, agar kerjasama ini bisa berjalan dengan lancar.

C. Teknologi dan Inovasi

Salah satu inovasi yang diterapkan adalah keterlibatan Satlinmas desa, yang diberdayakan oleh Satpol PP Provinsi untuk melakukan edukasi pilah sampah kepada warga. Dengan bekal sepeda dan speaker yang memutar pesan suara “Lakukan Pilah Sampah,” mereka berkeliling desa untuk mengingatkan masyarakat secara rutin. Inovasi ini merupakan peluang strategis dalam membentuk kesadaran kolektif tentang pentingnya memilah sampah sejak dari rumah. Jika edukasi ini dilakukan konsisten, maka perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah akan lebih mudah berubah. Provinsi juga memiliki aplikasi Sampah Kita untuk mendeteksi volume sampah dan memantau alurnya dari tingkat RT/RW hingga ke DLH. Aplikasi ini dinilai cukup baik dari segi sistem karena telah memungkinkan pelacakan data secara terstruktur. Namun, tantangan masih ada pada pemanfaatan aplikasinya di tingkat bawah yang belum sepenuhnya berjalan optimal karena kurangnya pelatihan dan fasilitas. Meski begitu, aplikasi ini dapat menjadi peluang untuk sistem pengelolaan berbasis data ke depan.

Adapun teknologi yang diajukan kepada Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah, beberapa diantaranya yaitu mesin MOTAH (Mobil Tempur Sampah), teknologi pembakaran sampah bantuan militer yang ramah lingkungan dan tidak menghasilkan asap, namun memerlukan proses pemanasan awal, tenaga operator, serta biaya operasional yang cukup besar. Kemudian ada tawaran dari pihak swasta untuk mengelola sampah dengan teknologi tertentu. Ada pula penggunaan mesin pencacah plastik, mesin pengurai, dan mesin pelebur plastik di bank sampah. Teknologi ini memungkinkan plastik dilelehkan dan dicetak kembali menjadi barang yang bernilai guna. Edukasi dan sosialisai juga dilakukan secara intensif,

terutama kepada ibu-ibu PKK dan Posyandu, baik dari sisi pemilahan sampah hingga pengurangan sampah plastik, misalnya dengan kebiasaan membawa *tumbler*, mengurangi sampah dari bungkus dan sisa makanan nasi box di acara-acara penting, dan lain sebagainya.

D. Regulasi

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, yang menjadi landasan hukum dalam upaya penanggulangan permasalahan persampahan. Peraturan ini menekankan pentingnya pengurangan dan penanganan sampah langsung dari sumbernya, melalui kegiatan seperti pemilahan sampah, pengangkutan terjadwal, pemanfaatan bank sampah dan TPS3R, serta pelibatan masyarakat dan kelembagaan lokal seperti karang taruna. Pengelolaan sampah diatur secara berjenjang dan terpadu, mulai dari rumah tangga, RT, RW, hingga tingkat kecamatan.

Sebagai bentuk penegakan, peraturan ini juga mengatur sanksi administratif dan denda bagi pelanggaran, seperti membuang sampah sembarangan atau tidak melakukan pemilahan sesuai ketentuan. Tujuan sanksi tersebut bukan hanya memberikan efek jera, tetapi juga mendorong pembentukan perilaku masyarakat yang lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Namun demikian, implementasi di lapangan masih tergolong lemah. Penegakan hukum belum berjalan optimal, sehingga diperlukan sistem pengawasan yang lebih kuat, misalnya melalui pemantauan CCTV di titik-titik rawan, penempatan petugas pengawas, dan mekanisme penarikan denda yang transparan dan konsisten. Meskipun demikian, regulasi ini memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai alat edukatif sekaligus represif terhadap pelanggar, terutama jika dilengkapi sistem pembuktian yang kuat dan dukungan teknologi. Di sisi lain, pemerintah daerah telah menunjukkan komitmennya dengan memasukkan program pengelolaan sampah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan (Renstra), termasuk rencana pengadaan incinerator yang akan disebar ke beberapa kecamatan dalam waktu dekat (Anisa Dzulhikmah, 2025).

Namun, tantangan utama yang masih dihadapi adalah tingginya ketergantungan terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti. Berdasarkan skema pengelolaan sampah dalam Jakstranas, idealnya hanya residu yang diangkut ke TPA. Kenyataannya, masih banyak sampah anorganik yang belum dipilah dan terangkut bersama residu, karena keterbatasan fasilitas pengolahan di tingkat hulu dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memilah sampah. Keterbatasan kapasitas TPA Sarimukti—dengan kuota ritase hanya 17 ritase/hari—semakin memperburuk kondisi, menimbulkan penumpukan di TPS dan menghambat sistem pengangkutan. Dengan demikian, kelemahan utama dari sistem pengelolaan sampah di kawasan perkotaan Padalarang–Ngamprah terletak pada belum optimalnya pengurangan dan pengolahan di sumber. Pemanfaatan fasilitas pengelolaan sampah berbasis komunitas, seperti bank sampah dan TPS3R, juga masih rendah. Hal ini membuat sistem yang ada belum sepenuhnya sejalan dengan target Jakstranas, yaitu pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sebesar 70% di tahun 2025.

E. Pembiayaan

Dari hasil wawancara, dikatakan bahwa pihak swasta sebenarnya telah menawarkan teknologi pembakaran sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan. Namun, menurut narasumber termasuk DLH dan Kecamatan Padalarang, biaya yang dibebankan kepada masyarakat masih sangat tinggi, berkisar Rp100.000–Rp150.000/KK/bulan. Bagi sebagian besar masyarakat, biaya ini terbilang terlalu mahal, sehingga teknologi tersebut belum bisa digunakan secara massal. Ini menjadi hambatan serius dalam modernisasi pengelolaan sampah berbasis teknologi.

F. Partisipasi Masyarakat

Hampir semua narasumber sepakat bahwa salah satu akar permasalahan pengelolaan sampah adalah rendahnya kesadaran masyarakat. Kecamatan Ngamprah menyebutkan bahwa masyarakat cenderung belum disiplin dalam membuang sampah, dan pemilahan sampah masih menjadi hal yang berat dilakukan jika tidak diawasi terus-menerus. Bahkan meskipun sudah ada sosialisasi dari pemerintah daerah, pelaksanaannya masih belum merata dan tidak berkelanjutan.

Kesadaran ini sangat penting, karena tanpa partisipasi aktif masyarakat, pengelolaan sampah tidak akan bisa berjalan dengan maksimal. Bahkan, masyarakat masih banyak yang menolak pembangunan fasilitas pengelolaan sampah di sekitar mereka karena takut polusi, bau, atau penurunan nilai lingkungan. Contohnya, kasus TPS yang gagal dibangun di Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah. Ini menjadi hambatan serius bagi realisasi pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah.

5.2 Strategi Dalam Pengelolaan Persampahan di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah

Data yang diperoleh dari hasil survei lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, dapat diidentifikasi sejumlah faktor yang memengaruhi permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat. Faktor-faktor ini dirumuskan berdasarkan pengamatan langsung terhadap kondisi di lapangan serta wawancara dari para narasumber yang memahami kondisi aktual. Adapun faktor-faktor yang dimaksud mencakup :

Tabel IV. 11 Faktor Internal dan Faktor Eksternal

Faktor Internal	
Teknis Operasional	Kerjasama yang baik antara desa di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah dan UPT Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (Gambaran Umum bagian Kondisi Persampahan Kabupaten Bandung Barat subbagian Pengangkutan Sampah, halaman 67; Analisis dan Pembahasan bagian Faktor Internal subbagian Teknis Operasional, halaman 91)
	Sistem pengangkutan sampah belum efektif (Gambaran Umum bagian Aspek Teknis Operasional subbagian Pengangkutan Sampah, halaman 86; Analisis dan Pembahasan bagian Faktor Internal subbagian Teknis Operasional, halaman 91)
	Masih banyak masyarakat yang tidak memilah sampah dari rumah (Gambaran Umum bagian Aspek Teknis Operasional subbagian Pemilahan Sampah, halaman 75; Analisis dan Pembahasan bagian Faktor Internal subbagian Teknis Operasional, halaman 91)
	Dukungan regulasi dan kebijakan Pemerintah yang mendukung pengelolaan sampah dari rumah tangga (Gambaran Umum bagian Gambaran Umum Kebijakan Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah subbagian Gambaran Umum Kebijakan, halaman 71; Analisis dan Pembahasan bagian Faktor Internal subbagian Teknis Operasional, halaman 90)
Infrastruktur	Tersedianya infrastruktur dasar pengelolaan sampah (Gambaran Umum bagian Aspek Teknis Operasional subbagian Pemilahan Sampah-Pemrosesan Akhir Sampah, halaman 75-87; Analisis dan Pembahasan bagian Faktor Internal subbagian Infrastruktur, halaman 93)
	Keterbatasan sarana dan prasarana untuk mengelola sampah (Gambaran Umum bagian Kondisi Persampahan Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah subbagian Aspek Kelembagaan, halaman 87; Analisis dan Pembahasan bagian Faktor Internal subbagian Teknis Operasional, halaman 90)
	Inovasi edukatif dengan melibatkan Satlinmas desa dalam penyuluhan pilah sampah

Sumber Daya Manusia	(Gambaran Umum bagian Kondisi Persampahan Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah subbagian Aspek Kelembagaan halaman 88; Analisis dan Pembahasan bagian Faktor Internal subbagian Sumber Daya Manusia, halaman 93)
	Program edukasi tentang pengelolaan sampah dilakukan secara berkelanjutan (Gambaran Umum bagian Kondisi Persampahan Perkotaan Bandung Barat subbagian Aspek Kelembagaan, halaman 89; Analisis dan Pembahasan bagian Faktor Internal subbagian Teknis Operasional, halaman 90)
	Kurangnya Sumber Daya Manusia yang terlatih (Gambaran Umum bagian Kondisi Persampahan Bandung Barat subbagian Aspek Kelembagaan halaman 88; Analisis dan Pembahasan bagian Faktor Internal subbagian Sumber Daya Manusia, halaman 93)
	Biaya retribusi dari masyarakat tidak sepenuhnya menutupi biaya pengelolaan sampah (Gambaran Umum bagian Kondisi Persampahan Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah subbagian Aspek Kelembagaan, halaman 89; Analisis dan Pembahasan bagian Faktor Internal subbagian Infrastruktur, halaman 93)
Faktor Eksternal	
Kolaborasi	Dukungan CSR Indonesia Power dari swasta (Gambaran umum bagian Kondisi Persampahan Kabupaten Bandung Barat subbagian Aspek Kelembagaan, halaman 70; Analisis dan Pembahasan bagian Faktor Eksternal subbagian Kolaborasi, halaman 96)
	Adanya pegiat maggot skala besar di Bojongkoneng yang siap bekerjasama dengan desa untuk pengolahan sampah (Gambaran Umum bagian Teknis Operasional subbagian Pengolahan Sampah, halaman 83; Analisis dan Pembahasan bagian Faktor Eksternal subbagian Kolaborasi, halaman 96)
	Pertumbuhan perumahan baru tanpa belum terlayani UPT Persampahan (Gambaran Umum bagian Aspek Teknis Operasional subbagian Pengangkutan Sampah, halaman 68; Analisis dan Pembahasan bagian Faktor Eksternal subbagian Timbulan Sampah, halaman 94)
Teknologi dan Inovasi	Inovasi teknologi digital aplikasi Sampah Kita dari provinsi (Gambaran Umum bagian Kondisi Persampahan Kabupaten Bandung Barat subbagian Aspek Kelembagaan, halaman 70; Analisis dan Pembahasan bagian Faktor Eksternal subbagian Teknologi dan Inovasi, halaman 97)
	Overload TPA Sarimukti (Gambaran Umum bagian Kondisi Persampahan Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah subbagian Aspek Kelembagaan, halaman 87; Analisis dan Pembahasan bagian Faktor Eksternal subbagian Timbulan Sampah, halaman 94)
Regulasi	Regulasi berupa Perda tentang sanksi bagi pembuang sampah sembarangan (Gambaran Umum bagian Kondisi Persampahan Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah subbagian Aspek Kelembagaan, halaman 87; Analisis dan Pembahasan bagian Faktor Eksternal subbagian Timbulan Sampah, halaman 94)
	Adanya rencana dan program dari Pemerintah Daerah dan Pusat (Gambaran Umum bagian Kondisi Persampahan Kabupaten Bandung Barat subbagian Aspek Kelembagaan, halaman 71; Analisis dan Pembahasan bagian Faktor Eksternal subbagian Regulasi, halaman 97)
Pembiayaan	Layanan swasta masih belum terjangkau oleh masyarakat karena biaya yang tinggi (Gambaran Umum bagian Kondisi Persampahan Kabupaten Bandung Barat subbagian Aspek Kelembagaan, halaman 70; Analisis dan Pembahasan bagian Faktor Eksternal subbagian Pembiayaan, halaman 98)
Partisipasi Masyarakat	Penolakan masyarakat terhadap pembangunan sarana pengelolaan sampah (Gambaran Umum bagian Kondisi Persampahan Kabupaten Bandung Barat subbagian Aspek Kelembagaan, halaman 71; Analisis dan Pembahasan bagian Faktor Eksternal subbagian Partisipasi Masyarakat, halaman 98)
	Rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam memilah sampah (Gambaran Umum bagian Kondisi Persampahan Kabupaten Bandung Barat subbagian Aspek Kelembagaan, halaman 70; Analisis dan Pembahasan bagian Faktor Eksternal subbagian Partisipasi Masyarakat, halaman 98)

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Selanjutnya, dalam menentukan bobot menggunakan analisis SWOT, matriks IFAS dan matriks EFAS, dilakukan berdasarkan hasil penilaian kepentingan dari tujuh responden, diantaranya terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, Bappelitbangda, Kecamatan Padalarang, dan Kecamatan Ngamprah. Responden menilai kepentingan beberapa kategori faktor-faktor mengenai pengelolaan sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah. Adapun penilaian diberikan dengan skala berikut:

- 1 = Sangat Tidak Penting
- 2 = Tidak Penting
- 3 = Cukup Penting
- 4 = Penting
- 5 = Sangat Penting

Kemudian, total hasil tingkat penilaian responden dirata-ratakan untuk menghasilkan nilai bobot faktor internal dan eksternal di Matriks IFAS dan EFAS dengan cara total penilaian responden dibagi jumlah responden yaitu sebanyak 7 responden meliputi Kantor Kecamatan Ngamprah (1 responden), Kantor Kecamatan Padalarang (1 responden), Dinas Lingkungan Hidup (2 responden), Bappelitbangda (2 responden), UPT Persampahan (1 responden). Berikut contoh cara perhitungan nilai bobot :

$$\frac{\text{Jumlah Penilaian Responden}}{\text{Jumlah Responden}} = \frac{(4 \times 1) + (5 \times 6)}{7} = \frac{4 + 30}{7} = \frac{34}{7} = 4,9 = 5$$

Nilai pembobotan dari hasil kuesioner dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel V. 3 Penilaian Bobot Faktor

No	Pertanyaan	Tingkat Penilaian Responden					N		
		1	2	3	4	5			
Faktor Internal									
1	Teknis Operasional	Seberapa penting menurut Anda kerjasama antara desa dengan UPT Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah?				1	6	4,9	5
		Seberapa penting menurut Anda efektivitas sistem pengangkutan sampah dari rumah ke TPA bagi keberhasilan pengelolaan sampah?				3	4	4,6	5
		Seberapa penting menurut Anda kebiasaan masvarakat dalam memilah sampah sejak				2	5	4,7	5

No	Pertanyaan		Tingkat Penilaian Responden					N		
			1	2	3	4	5			
		dari rumah bagi keberhasilan sistem pengelolaan sampah?								
		Seberapa penting menurut Anda dukungan regulasi seperti Perda No. 1 Tahun 2021 tentang retribusi dan pengelolaan sampah dalam mendukung pengelolaan sampah dari rumah tangga?				2	5	4,7	5	
2	Infrastruktur	Seberapa penting menurut Anda ketersediaan infrastruktur dasar (TPS, alat angkut, tempat pemilahan) dalam pengelolaan sampah?				2	5	4,7	5	
		Seberapa penting menurut Anda penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pengelolaan sampah yang efektif?				1	6	4,9	5	
3	Sumber Daya Manusia	Seberapa penting menurut Anda pelibatan Satlinmas desa dalam edukasi pilah sampah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat?			1	2	4	4,4	4	
		Seberapa penting menurut Anda program edukasi dan sosialisasi tentang pengelolaan sampah yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menciptakan perubahan perilaku masyarakat?				2	5	4,7	5	
		Seberapa penting menurut Anda ketersediaan tenaga kerja (SDM) yang terlatih dan berkompeten dalam pengelolaan sampah?					7	5	5	
		Seberapa penting menurut Anda kemampuan masyarakat untuk iuran agar dapat menggunakan layanan pengelolaan sampah dari pihak swasta yang biayanya relatif tinggi?				4	3	4,4	4	
Faktor Eksternal										
4	Kolaborasi	Seberapa penting menurut Anda dukungan CSR dari perusahaan swasta seperti Indonesia Power dalam menunjang operasional bank sampah dan kegiatan lainnya?					2	5	4,7	5
		Seberapa penting menurut Anda kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pegiat maggot skala besar seperti di Bojongkoneng dalam mengolah sampah organik secara ramah lingkungan?						7	5	5
		Seberapa penting menurut Anda perencanaan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi pada perumahan-perumahan baru di kawasan Anda?				1	6	4,9	5	
5	Teknologi dan Inovasi	Seberapa penting menurut Anda penggunaan aplikasi digital seperti "Sampah Kita" dari provinsi untuk memantau volume dan alur sampah dari tingkat bawah ke DLH?			1	2	4	4,4	4	
		Seberapa penting menurut Anda ketersediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang				2	5	4,7	5	

No	Pertanyaan	Tingkat Penilaian Responden					N	
		1	2	3	4	5		
		memadai dan berfungsi optimal, seperti TPA Sarimukti, dalam mendukung kelancaran pengelolaan sampah?						
6	Regulasi	Seberapa penting menurut Anda keberadaan Perda tentang sanksi bagi pembuang sampah sembarangan dalam menimbulkan efek jera bagi pelanggar?					4,6	5
		Seberapa penting menurut Anda adanya rencana dan program pengelolaan sampah dari Pemerintah Daerah maupun Pusat untuk mendukung solusi jangka panjang?					4,7	5
7	Pembiayaan	Seberapa penting menurut Anda tersedianya layanan pengelolaan sampah oleh pihak swasta dengan biaya yang lebih terjangkau bagi masyarakat dalam mendukung sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan?					4,1	4
8	Partisipasi Masyarakat	Seberapa penting menurut Anda terhadap pembangunan sarana pengelolaan sampah di lingkungan tempat tinggal masyarakat?					4,7	5
		Seberapa penting menurut Anda kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam memilah dan mengelola sampahnya sendiri?					4,7	5

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Sebelum melakukan penilaian terhadap faktor internal dan eksternal dalam matriks IFAS dan EFAS, diperlukan nilai untuk penilaian rating. Penilaian ini untuk memberikan acuan dalam memberikan nilai rating (1–4) pada setiap faktor, yang mencerminkan tingkat pengaruh atau dampak faktor tersebut terhadap keberhasilan pengelolaan sampah dalam mengurangi timbulan sampah di kondisi aktual. Penilaian rating dilakukan berdasarkan hasil penilaian pengaruh dan dampak dari faktor internal dan eksternal yang dirasakan oleh responden. Adapun penilaian diberikan dengan skala berikut:

- 4 = Sangat Berdampak/Sangat Signifikan
- 3 = Berdampak/Signifikan
- 2 = Kurang Berdampak/Kurang Signifikan
- 1 = Tidak Berdampak/Tidak Signifikan

Kemudian, total hasil tingkat penilaian responden dirata-ratakan untuk menghasilkan nilai rating faktor internal dan eksternal di Matriks IFAS dan EFAS dengan cara total penilaian responden dibagi jumlah responden yaitu sebanyak 7

responden meliputi Kantor Kecamatan Ngamprah (1 responden), Kantor Kecamatan Padalarang (1 responden), Dinas Lingkungan Hidup (2 responden), Bappelitbangda (2 responden), UPT Persampahan (1 responden). Berikut contoh cara perhitungan nilai rating :

$$\frac{\text{Jumlah Penilaian Responden}}{\text{Jumlah Responden}} = \frac{(2 \times 3) + (3 \times 3) + (4 \times 1)}{7} = \frac{6 + 9 + 4}{7} = \frac{19}{7} = 2,7 = 3$$

Nilai untuk rating dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel V. 4 Tabel Penilaian Rating Faktor

No		Pertanyaan	Tingkat Penilaian Responden					
			1	2	3	4	N	
Faktor Internal								
1	Teknis Operasional	Sejauh mana kerjasama antara desa dengan UPT Kebersihan DLH sudah berjalan efektif dalam pengelolaan sampah?		3	3	1	2,7	3
		Sejauh mana sistem pengangkutan sampah dari rumah ke TPA berjalan lancar dan efektif?	1	1	5		2,6	3
		Sejauh mana kebiasaan masyarakat memilah sampah dari rumah dalam pengelolaan sampah?	1	1	4	1	2,7	3
		Sejauh mana regulasi seperti Perda No. 1 Tahun 2021 telah diimplementasikan dengan baik dalam mendukung pengelolaan sampah?	1	1	4	1	2,7	3
2	Infrastruktur	Sejauh mana ketersediaan infrastruktur dasar (TPS, alat angkut, tempat pemilahan) mendukung pengelolaan sampah saat ini?	1		3	3	3,4	4
		Sejauh mana sarana dan prasarana yang tersedia saat ini memadai untuk mendukung pengelolaan sampah?	1	1	4	1	2,7	3
3	Sumber Daya Manusia	Sejauh mana pelibatan Satlinmas desa dalam edukasi pilah sampah sudah berjalan dan memberi dampak positif?	2	3	2		2	2
		Sejauh mana edukasi dan sosialisasi tentang pengelolaan sampah dilakukan secara berkelanjutan dan berdampak?	2	2	2	1	2,3	2
		Sejauh mana SDM yang tersedia telah terlatih dan berkompeten dalam mengelola sampah?	1	1	5		2,6	3
		Sejauh mana kemampuan masyarakat untuk iuran layanan pengelolaan sampah dari swasta berdampak pada sistem pengelolaan saat ini?		1	6		2,9	3
Faktor Eksternal								
4	Kolaborasi	Sejauh mana dukungan CSR dari perusahaan seperti Indonesia Power sudah dimanfaatkan dalam pengelolaan sampah?	1		3	3	3,4	3
		Sejauh mana kerjasama dengan berbagai <i>stakeholder</i> seperti pegiat maggot skala besar dimanfaatkan secara optimal?	1		2	4	3,3	3
		Sejauh mana tidak adanya sistem pengelolaan sampah di perumahan baru menjadi ancaman di wilayah Anda?	1	1		5	3,1	3

No		Pertanyaan	Tingkat Penilaian Responden					
			1	2	3	4	N	
5	Teknologi dan Inovasi	Sejauh mana aplikasi digital “Sampah Kita” dari provinsi digunakan secara efektif dalam pengelolaan sampah?	1	1	3	2	2,8	3
		Sejauh mana keterbatasan kapasitas TPA seperti Sarimukti menjadi ancaman dalam pengelolaan sampah di wilayah Anda?	2			5	3,1	3
6	Regulasi	Sejauh mana keberadaan Perda tentang sanksi sudah menimbulkan efek jera terhadap pembuang sampah sembarangan?	2		4	1	2,6	3
		Sejauh mana program dan rencana pengelolaan sampah dari pemerintah daerah/pusat telah membantu menciptakan solusi jangka panjang?	2		3	2	2,7	3
7	Pembiayaan	Sejauh mana biaya layanan pengelolaan sampah dari swasta yang tinggi menjadi hambatan bagi masyarakat?		1	5	1	3	3
8	Partisipasi Masyarakat	Sejauh mana pembangunan sarana pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat masih kurang dan menjadi ancaman keberhasilan pengelolaan?	1	1	2	3	2,8	3
		Sejauh mana rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampahnya sendiri menjadi faktor penghambat sistem pengelolaan saat ini?	2		3	2	2,6	3

Sumber : Hasil Analisis, 2025

5.2.1 Strategi Pengelolaan Sampah dalam Matriks *Internal Factor Analysis Summary* (IFAS)

Dalam merumuskan strategi, hal yang selanjutnya dilakukan yaitu melakukan pembobotan untuk faktor internal dan faktor eksternal yang didapatkan dari hasil pengolahan data. Berikut adalah pembobotan faktor internal menggunakan Matriks *Internal Factor Analysis Summary* (IFAS) :

Tabel V. 5 Matriks *Internal Factor Analysis Summary* (IFAS) Pengelolaan Persampahan Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah

No	KEKUATAN		Bobot	Rating	Score
1	Teknis Operasional	Kerjasama yang baik antara desa di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah dan UPT Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (Gambaran Umum bagian Kondisi Persampahan Kabupaten Bandung Barat subbagian Pengangkutan Sampah, halaman 67; Analisis dan Pembahasan bagian Faktor Internal subbagian Teknis Operasional, halaman 91)	0,09	3	0,26
		Pengelolaan sampah dari rumah tangga arahan dari bupati dan didukung oleh Peraturan Daerah (Gambaran Umum bagian Gambaran Umum Kebijakan Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah subbagian Gambaran Umum Kebijakan, halaman 71; Analisis dan	0,09	3	0,25

		Pembahasan bagian Faktor Internal subbagian Teknis Operasional, halaman 90)			
2	Infrastruktur	Tersedianya infrastruktur dasar pengelolaan sampah (Gambaran Umum bagian Aspek Teknis Operasional subbagian Pemilahan Sampah-Pemrosesan Akhir Sampah, halaman 75-87; Analisis dan Pembahasan bagian Faktor Internal subbagian Infrastruktur, halaman 93)	0,09	3	0,31
3	Sumber Daya Manusia	Melibatkan Satlinmas desa dalam penyuluhan pilah sampah (Gambaran Umum bagian Kondisi Persampahan Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah subbagian Aspek Kelembagaan halaman 88; Analisis dan Pembahasan bagian Faktor Internal subbagian Sumber Daya Manusia, halaman 93)	0,09	2	0,17
		Program edukasi tentang pengelolaan sampah dilakukan secara berkelanjutan (Gambaran Umum bagian Kondisi Persampahan Perkotaan Bandung Barat subbagian Aspek Kelembagaan, halaman 89; Analisis dan Pembahasan bagian Faktor Internal subbagian Teknis Operasional, halaman 90)	0,09	2	0,21
Total					1,19
		KELEMAHAN			
1	Teknis Operasional	Sistem pengangkutan sampah belum efektif (Gambaran Umum bagian Aspek Teknis Operasional subbagian Pengangkutan Sampah, halaman 86; Analisis dan Pembahasan bagian Faktor Internal subbagian Teknis Operasional, halaman 91)	0,09	3	0,23
		Masih banyak masyarakat yang tidak memilah sampah dari rumah (Gambaran Umum bagian Aspek Teknis Operasional subbagian Pemilahan Sampah, halaman 75; Analisis dan Pembahasan bagian Faktor Internal subbagian Teknis Operasional, halaman 91)	0,09	3	0,25
2	Infrastruktur	Keterbatasan sarana dan prasarana untuk mengelola sampah (Gambaran Umum bagian Kondisi Persampahan Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah subbagian Aspek Kelembagaan, halaman 87; Analisis dan Pembahasan bagian Faktor Internal subbagian Teknis Operasional, halaman 90)	0,09	3	0,26
3	Sumber Daya Manusia	Kurangnya Sumber Daya Manusia yang terlatih (Gambaran Umum bagian Kondisi Persampahan Bandung Barat subbagian Aspek Kelembagaan halaman 88; Analisis dan Pembahasan bagian Faktor Internal subbagian Sumber Daya Manusia, halaman 93)	0,10	3	0,25
		Biaya retribusi dari masyarakat tidak sepenuhnya menutupi biaya pengelolaan sampah (Gambaran Umum bagian Kondisi Persampahan Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah subbagian Aspek Kelembagaan, halaman 89; Analisis dan Pembahasan bagian Faktor Internal subbagian Infrastruktur, halaman 93)	0,09	3	0,25
Total			1		1,23
Total Bobot x Score untuk Internal Faktor					2,42

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel matriks IFAS, diperoleh bahwa total nilai skor sebesar **2,42** dan nilai total keseluruhan dari nilai bobot mencapai 1,00. Dari total skor tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah pada

Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah **memiliki posisi internal yang lemah** karena berada dibawah nilai 2,50. Hal ini menunjukkan bahwa struktur, kapasitas, dan operasional internal dalam pengelolaan sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah saat ini belum cukup kuat untuk mendukung upaya pengurangan timbulan sampah secara optimal, dan justru didominasi oleh kendala internal yang harus segera diatasi. Kekuatan utama dari pengelolaan ini yaitu tersedianya infrastruktur dasar pengelolaan sampah dengan skor sebesar 0,31. Infrastruktur pengelolaan seperti bank sampah, maggot, dan TPS3R terbukti sudah terdapat di beberapa desa di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah, walaupun belum tersebar secara merata. Kemudian, diperparah oleh kelemahan utama internal yaitu keterbatasan sarana dan prasarana untuk mengelola sampah dengan skor 0,25. Infrastruktur dasar pengelolaan sampah telah tersedia namun terhambat oleh sarana dan prasarana yang terbatas. Seperti gerobak, cator, dan ember, sehingga menghambat kegiatan pengelolaan sampah dari sumber.

5.2.2 Strategi Pengelolaan Sampah dalam Matriks *Eksternal Factor Analysis Summary* (EFAS)

Berikut adalah pembobotan faktor eksternal menggunakan Matriks *Eksternal Factor Analysis Summary* (EFAS) :

Tabel V. 6 Matriks *Eksternal Factor Analysis Summary* (EFAS) Pengelolaan Persampahan Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah

No	PELUANG		Bobot	Rating	Score
1	Kolaborasi	Dukungan CSR Indonesia Power dari swasta (Gambaran umum bagian Kondisi Persampahan Kabupaten Bandung Barat subbagian Aspek Kelembagaan, halaman 70; Analisis dan Pembahasan bagian Faktor Eksternal subbagian Kolaborasi, halaman 96)	0,10	3	0,34
		Adanya pegiat maggot skala besar di Bojongkoneng yang siap bekerjasama dengan desa untuk pengolahan sampah organik secara lebih ramah lingkungan (Gambaran Umum bagian Teknis Operasional subbagian Pengolahan Sampah, halaman 83; Analisis dan Pembahasan bagian Faktor Eksternal subbagian Kolaborasi, halaman 96)	0,11	3	0,35
2	Teknologi dan Inovasi	Inovasi teknologi digital aplikasi Sampah Kita dari provinsi untuk mendeteksi volume sampah dan memantau alurnya dari tingkat RT/RW hingga ke DLH (Gambaran Umum bagian Kondisi Persampahan Kabupaten Bandung Barat subbagian Aspek Kelembagaan,	0,09	3	0,26

		halaman 70; Analisis dan Pembahasan bagian Faktor Eksternal subbagian Teknologi dan Inovasi, halaman 97)			
3	Regulasi	Regulasi berupa Perda tentang sanksi bagi pembuang sampah sembarangan (Gambaran Umum bagian Kondisi Persampahan Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah subbagian Aspek Kelembagaan, halaman 87; Analisis dan Pembahasan bagian Faktor Eksternal subbagian Timbulan Sampah, halaman 94)	0,10	3	0,26
		Adanya rencana dan program dari Pemerintah Daerah dan Pusat (Gambaran Umum bagian Kondisi Persampahan Kabupaten Bandung Barat subbagian Aspek Kelembagaan, halaman 71; Analisis dan Pembahasan bagian Faktor Eksternal subbagian Regulasi, halaman 97)	0,10	3	0,27
Total					1,49
ANCAMAN					
1	Kolaborasi	Overload TPA Sarimukti dan masalah teknis lelang TPA (Gambaran Umum bagian Kondisi Persampahan Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah subbagian Aspek Kelembagaan, halaman 87; Analisis dan Pembahasan bagian Faktor Eksternal subbagian Timbulan Sampah, halaman 94)	0,10	3	0,31
		Pertumbuhan perumahan baru tanpa sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi (Gambaran Umum bagian Aspek Teknis Operasional subbagian Pengangkutan Sampah, halaman 68; Analisis dan Pembahasan bagian Faktor Eksternal subbagian Timbulan Sampah, halaman 94)	0,11	3	0,33
2	Pembiayaan	Layanan swasta masih belum terjangkau oleh masyarakat karena biaya yang tinggi (Gambaran Umum bagian Kondisi Persampahan Kabupaten Bandung Barat subbagian Aspek Kelembagaan, halaman 70; Analisis dan Pembahasan bagian Faktor Eksternal subbagian Pembiayaan, halaman 98)	0,09	3	0,26
3	Partisipasi Masyarakat	Penolakan masyarakat terhadap pembangunan sarana pengelolaan sampah (Gambaran Umum bagian Kondisi Persampahan Kabupaten Bandung Barat subbagian Aspek Kelembagaan, halaman 71; Analisis dan Pembahasan bagian Faktor Eksternal subbagian Partisipasi Masyarakat, halaman 98)	0,10	3	0,28
		Rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam memilah sampah (Gambaran Umum bagian Kondisi Persampahan Kabupaten Bandung Barat subbagian Aspek Kelembagaan, halaman 70; Analisis dan Pembahasan bagian Faktor Eksternal subbagian Partisipasi Masyarakat, halaman 98)	0,10	3	0,26
Total			1		1,45
Total Bobot x Score untuk Eksternal Faktor					2,94

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel matriks EFAS, diperoleh total nilai skor sebesar **2,94** dan total bobot mencapai 1,00. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah **cukup kuat pada faktor peluang yang dapat meminimalkan ancaman yang ada**. Peluang-peluang seperti kerjasama dengan berbagai *stakeholder* dengan skor 0,35, contohnya pegiat maggot skala besar di Desa Bojongkoneng, Kecamatan

Ngamprah menawarkan untuk bekerjasama dalam pengelolaan sampah organik. Serta peluang berupa dukungan CSR dari swasta dengan skor 0,34 yang memberikan sumber daya penting untuk pengelolaan sampah, terutama dalam pengoperasian bank sampah dan kegiatan pengelolaan lainnya. Terbukti pada bank sampah di Desa Sukamaju, Kecamatan Padalarang mendapatkan penghargaan dari Kementrian, bank sampah dapat berjalan hingga sehebat ini karena *disupport* oleh CSR *Indonesia Power*. Sedangkan ancaman utama dalam pengelolaan sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah adalah pertumbuhan perumahan baru tanpa sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan skor 0,38, dari hasil wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Padalarang mengatakan bahwa banyak permukiman baru dan tidak semuanya masuk layanan UPT Persampahan.

5.2.3 Analisis SWOT

Tahap selanjutnya adalah tahap penggabungan dengan teknik matriks Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman (SWOT). Analisis SWOT ini didasarkan pada informasi yang diturunkan dari tahap input untuk mencocokkan peluang dan ancaman eksternal dengan kekuatan dan kelemahan internal. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan alternatif strategi yang layak secara efektif pada pengelolaan sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah. Dari hasil analisis SWOT diperoleh beberapa alternatif strategi dalam pengelolaan sampah dalam upaya mengurangi timbulan sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah. Secara jelas matriks SWOT tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V. 7 Matriks SWOT Pengelolaan Sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah

Internal	Kekuatan/<i>Strength</i>(S): 1. Kerjasama yang baik antara desa di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah dan UPT Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup 2. Tersedianya infrastruktur dasar pengelolaan sampah 3. Dukungan regulasi dan kebijakan Pemerintah yang mendukung pengelolaan sampah dari rumah	Kelemahan/<i>Weakness</i> (W): 1. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk mengelola sampah 2. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang terlatih 3. Sistem pengangkutan sampah belum efektif 4. Biaya retribusi dari masyarakat tidak
----------	--	--

Eksternal	tangga, yaitu Perda No. 1 Tahun 2021 tentang Retribusi - Inovasi edukatif dengan melibatkan Satlinmas desa dalam penyuluhan pilah sampah - Program edukasi dan sosialisasi tentang pengelolaan sampah dilakukan secara berkelanjutan	sepenuhnya menutupi biaya pengelolaan sampah Masih banyak masyarakat yang tidak memilah sampah dari rumah
Peluang/Opportunities (O): - Dukungan CSR Indonesia Power dari swasta - Adanya pegiat maggot skala besar di Bojongkoneng yang siap bekerjasama dengan desa untuk pengolahan sampah organik secara lebih ramah lingkungan - Inovasi teknologi digital aplikasi Sampah Kita dari provinsi untuk mendeteksi volume sampah dan memantau alurnya dari tingkat RT/RW hingga ke DLH - Regulasi berupa Perda tentang sanksi bagi pembuang sampah sembarangan - Adanya rencana dan program dari Pemerintah Daerah dan Pusat	Strategi S-O: - Mengembangkan kemitraan dengan berbagai <i>stakeholder</i> untuk memperkuat pengelolaan sampah yang kolaboratif. (S1, O1, O2) - Mendorong penerapan kebijakan Perda sanksi denda untuk meningkatkan kesadaran warga. (S3, O4) - Memaksimalkan kerjasama dengan UPT DLH untuk memanfaatkan aplikasi SAMPAH KITA dalam mempercepat koordinasi dan efisiensi pengangkutan. (S4, O3) - Meningkatkan edukasi dan sosialisasi berkelanjutan dengan program Pemda untuk peningkatan kesadaran dan keterlibatan warga secara sistematis. (S5, O5)	Strategi W-O: - Mengatasi keterbatasan sarana prasarana melalui kolaborasi CSR dan pengusulan program pengadaan melalui Musrenbang. (W1, O1, O5) - Meningkatkan pelatihan SDM dan pelibatan warga dengan memanfaatkan budidaya maggot sebagai praktik pengelolaan sampah organik. (W2, O2) - Mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi berbasis regulasi (Perda) dan menjelaskan konsekuensi hukum membuang sampah sembarangan agar lebih taat aturan. (W5, O4) - Mengefisiensikan pembiayaan pengelolaan dengan digitalisasi sistem menggunakan aplikasi Sampah Kita untuk memantau dan mengoptimalkan ritase dan biaya. (W3, W4, O3)
Ancaman/ Threat (T): - Overload TPA Sarimukti dan masalah teknis lelang TPA - Pertumbuhan perumahan baru tanpa sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi - Layanan swasta masih belum terjangkau oleh masyarakat karena biaya yang tinggi - Penolakan masyarakat terhadap pembangunan sarana pengelolaan sampah - Rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam memilah sampah	Strategi S-T: - Mengoptimalkan infrastruktur pengelolaan sampah yang tersedia dengan pemilahan dari sumber untuk mengurangi beban sampah ke TPA Sarimukti yang <i>overload</i>. (S2, T1) - Memperkuat sistem kerjasama antar desa dan UPT dalam penanganan perumahan baru yang belum memiliki sistem pengelolaan sampah, agar tidak menambah titik pembuangan liar. (S1, T2) - Mengintensifkan penyuluhan oleh Satlinmas desa mengenai pentingnya pemilahan sampah di rumah terhadap rendahnya kesadaran masyarakat. (S4, T5)	Strategi W-T: - Meningkatkan edukasi dan kampanye pemilahan sampah dari rumah untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, sebagai langkah pencegahan terhadap <i>overload</i> TPA Sarimukti. (W5, T1, T5) - Mengembangkan sistem pengangkutan sampah yang lebih efektif dan terencana untuk kawasan perumahan baru, guna mencegah terjadinya penumpukan dan pengelolaan sampah yang tidak terkendali. (W3, T2) - Meningkatkan efektivitas pengelolaan dana retribusi dan mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta untuk menyediakan

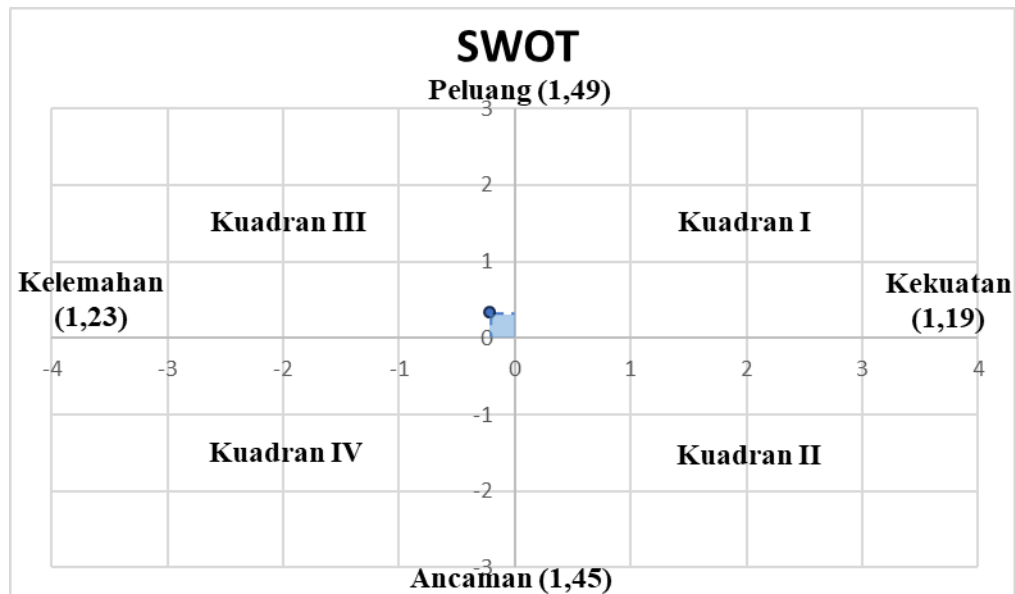
		layanan pengelolaan sampah yang lebih terjangkau bagi masyarakat. (W4, T3) 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui edukasi dan pendekatan sosial sebelum pembangunan sarana pengelolaan, agar keterbatasan prasarana dapat diatasi dengan dukungan publik. (W1, T4)
--	--	--

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Selanjutnya, pemilihan strategi menggunakan kurva SWOT dengan cara menghitung selisih skor faktor internal untuk menghasilkan kuadran sumbu X dan menghitung selisih skor faktor eksternal untuk menghasilkan kuadran sumbu Y. Berikut adalah perhitungan untuk menentukan nilai kuadran sumbu X dan sumbu Y :

- e. Total nilai bobot x *rating* kekuatan - dengan total nilai bobot dan *rating* kelemahan = nilai kuadran sumbu X
 $1,19 - 1,23 = -0,04$
- f. Total nilai bobot x *rating* peluang - dengan total nilai bobot dan *rating* ancaman = nilai kuadran sumbu Y
 $1,49 - 1,45 = 0,04$

Berdasarkan perhitungan penjabaran Nilai IFAS & EFAS maka gambar kuadran SWOT sebagai berikut :



Gambar V. 1 Kuadran SWOT

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan gambar kuadran SWOT di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil plotting nilai IFAS–EFAS berada pada Koordinat $X = -0,04$ dan $Y = 0,04$, yang berarti masuk dalam Kuadran III. Hal ini menunjukkan bahwa Kawasan Perkotaan Padalarang–Ngamprah memiliki kelemahan internal yang cukup dominan dibandingkan kekuatannya, namun masih memiliki peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan pada pengelolaan sampah dalam mengurangi timbulan sampah. Oleh karena itu, strategi yang tepat untuk diterapkan adalah strategi *Weakness–Opportunities* (WO), yaitu strategi yang berfokus pada upaya meminimalkan kelemahan internal guna memaksimalkan pemanfaatan peluang yang ada. Strategi WO yang dapat dilakukan untuk pengelolaan sampah dalam upaya mengurangi timbulan sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang–Ngamprah adalah :

- 1. Mengatasi keterbatasan sarana prasarana melalui kolaborasi CSR dan pengusulan program pengadaan melalui Musrenbang.**

Dari hasil wawancara, mengatakan bahwa sarana prasarana untuk pengelolaan sampah seperti gerobak, cator, hingga alat pencacah plastik masih minim. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, beberapa desa mengusulkan pengadaan alat tersebut melalui mekanisme Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Namun, terdapat kendala karena penentuan penerima bantuan Musrenbang tidak selalu merata, sehingga Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah lebih sering menjadi pihak penerima daripada pengusul. Selain itu, sering terjadi rasionalisasi anggaran di akhir tahun, yang menyebabkan usulan tersebut terhapus dan tidak terealisasi. Di sisi lain, CSR dari perusahaan seperti Indonesia Power telah terbukti membantu bank sampah berkembang. Ini menunjukkan kolaborasi sektor swasta bisa menjadi solusi riil. Mengandalkan Musrenbang dan CSR akan memperkuat perencanaan partisipatif dan memperbesar peluang realisasi anggaran, terutama untuk pengadaan sarana prasarana atau teknologi pengelolaan sampah ramah lingkungan yang harganya terbilang mahal oleh masyarakat. Ini dapat mendukung meningkatkan target penanganan 70%.

Tabel V. 8 Indikator & Parameter Penambahan TPS 3R Skala Kelurahan

Indikator	Parameter	Sumber Regulasi
Jumlah penduduk dan rumah tangga	• 200–400 KK per TPS 3R	SNI 3242-2008, Buku Teknis TPS 3R
Cakupan layanan	• 200–400 KK ($\pm$ 1000–2000 jiwa) per TPS 3R • 1 TPS 3R per kelurahan padat (10.000 jiwa atau 2.000 rumah)	Permen PU No. 3 Tahun 2013

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Tabel V. 9 Kebutuhan TPS 3R di Kecamatan Padalarang Tahun 2025

Desa	Jumlah Penduduk 2025	TPS 3R Yang tersedia (Unit)	Cakupan Layanan (jiwa)	Jumlah TPS 3R Yang Dibutuhkan	Luas (m2)
Laksanamekar	19.347	0	20.000	2	1.000
Cimerang	5.021	0	10.000	1	1.000
Cipeundeuy	14.014	0	10.000	1	1.000
Kertajaya	21.003	0	20.000	2	1.000
Jayamekar	19.875	0	20.000	2	1.000
Padalarang	36.443	0	40.000	4	1.000
Kertamulya	27.933	0	30.000	3	1.000
Ciburuy	21.312	0	20.000	2	1.000
Tagogapu	11.736	1	10.000	1	1.000
Campakamekar	15.315	0	20.000	2	1.000
Kecamatan Padalarang	181.357	1		20	

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan hasil analisis, kebutuhan TPS 3R di Kecamatan Padalarang didapatkan dengan cara membandingkan jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Padalarang dengan standar pelayanan TPS 3R menurut Permen PU No. 3 Tahun 2013, maka diketahui kebutuhan TPS 3R di Kecamatan Padalarang yaitu sebanyak 20 unit untuk skala desa dengan cakupan 1 unit TPS3R yaitu 10.000 jiwa atau 2.000 rumah. Namun, kondisi eksisting saat ini hanya terdapat 1 unit TPS 3R di Desa Tagogapu, sehingga masih terdapat kekurangan yang sangat besar yaitu 19 unit TPS 3R.

Jika ditinjau per desa, kebutuhan TPS 3R di Desa Padalarang yaitu sebanyak 4 unit dan Desa Kertamulya membutuhkan sebanyak 3 unit TPS 3R. Sedangkan Desa Laksanamekar, Kertajaya, Jayamekar, Ciburuy, dan Campakamekar sebanyak 10 unit yaitu 2 unit TPS 3R untuk setiap desa dengan rencana cakupan layanan 10.000 jiwa untuk 1 unit TPS 3R. Serta di Desa Cimerang, Cipeundeuy, dan Tagogapu sebanyak 3 unit yaitu 1 unit TPS 3R untuk setiap desa.

Tabel V. 10 Kebutuhan TPS 3R di Kecamatan Ngamprah Tahun 2025

Desa	Jumlah Penduduk 2025	TPS 3R Yang tersedia (Unit)	Cakupan Layanan (jiwa)	Jumlah TPS 3R Yang Dibutuhkan
Cimareme	10.562	0	10.000	1
Gadobangkong	18.581	0	20.000	2
Tanimulya	39.369	0	40.000	4
Pakuhaji	9.880	0	10.000	1
Cilame	41.479	0	40.000	4
Margajaya	19.611	0	20.000	2
Mekarsari	17.182	1	20.000	2
Ngamprah	8.557	0	10.000	1
Sukatani	8.088	0	10.000	1
Cimanggu	7.736	0	10.000	1
Bojongkoneng	5.956	0	10.000	1
Kecamatan Ngamprah	119.100	1		20

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Sedangkan berdasarkan hasil analisis untuk Kecamatan Ngamprah, dengan cara yang sama yaitu membandingkan jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Padalarang dengan standar pelayanan TPS 3R menurut Permen PU No. 3 Tahun 2013, maka diketahui kebutuhan TPS 3R di Kecamatan

Padalarang yaitu sebanyak 20 unit untuk skala desa dengan cakupan 1 unit TPS3R yaitu 10.000 jiwa atau 2.000 rumah, sehingga kebutuhan TPS 3R di Kecamatan Ngamprah mencapai 20 unit. Kondisi eksisting menunjukkan baru tersedia 1 unit TPS 3R di Desa Mekarsari, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 19 unit.

Jika ditinjau per desa, kebutuhan TPS 3R di Desa Tanimulya dan Desa Cilame sebanyak 8 unit yaitu 4 unit TPS 3R untuk setiap desa dengan rencana cakupan layanan 10.000 jiwa untuk 1 unit TPS 3R. Kemudian, Desa Gadobangkong, Margajaya, dan Mekarsari membutuhkan sebanyak 6 unit TPS 3R yaitu 2 unit TPS 3R untuk setiap desa. Sedangkan Desa Cimoreme, Ngamprah, Sukatani, Cimanggu, dan Bojongkoneng sebanyak 5 unit yaitu 1 unit TPS 3R untuk setiap desa.

Tabel V. 11 Indikator & Parameter Penambahan TPST Skala Kecamatan

Indikator	Parameter	Sumber Regulasi
Jumlah penduduk dan rumah tangga	1 unit TPST melayani ± 120.000 jiwa (skala kecamatan/kota kecil).	SNI 3242-2008 tentang tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman
Timbulan sampah harian	Timbulan rata-rata: 0,5–0,6 kg/org/hari ($\approx 2,5$–3 liter/org/hari).	Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001
Luas lahan	TPST butuh lahan luas (≥ 2–5 ha) untuk fasilitas: unit penerimaan, pemilahan, pengomposan, RDF, bank sampah, area residu, kantor, dan buffer zone.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Cakupan layanan	Minimal 80% penduduk perkotaan harus terlayani oleh sistem persampahan (termasuk TPST, TPS 3R, TPS, TPA).	Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001
Aksesibilitas dan lokasi	TPST ditempatkan strategis di wilayah kecamatan/kota kecil, mudah diakses truk, jauh dari permukiman padat, tersedia akses jalan, drainase, dan utilitas.	SNI 19-2454-2002

Indikator	Parameter	Sumber Regulasi
Standar pelayanan	Output TPST: minimal 10% sampah terdaur ulang/kompos, residu dikirim ke TPA dengan sanitary landfill. Tidak boleh open dumping.	Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Tabel V. 12 Kebutuhan TPST Berdasarkan Jumlah Penduduk, Timbulan Sampah, dan Standar SNI di Kecamatan Ngamprah dan Kecamatan Padalarang Tahun 2025

Kecamatan	Jumlah Penduduk 2025	Jumlah KK dengan asumsi 1 keluarga = 5 orang	Timbulan Sampah $Q = \text{Penduduk} \times 0,5-0,6$ kg/org/hari	TPST Yang tersedia (Unit)	Jumlah TPST Yang Dibutuhkan 1 Kelurahan dengan SNI (120.000 Jiwa)
Padalarang	192.000	38.400	96.000	0	2
Ngamprah	119.100	23.820	59.550	0	1

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kecamatan Padalarang dan Kecamatan Ngamprah pada tahun 2025 sangat tinggi jika dibandingkan dengan ketersediaan eksisting. Jumlah penduduk Kecamatan Padalarang diproyeksikan mencapai 192.000 jiwa dengan timbulan sampah harian sebesar 96 ton. Mengacu pada standar SNI yang menetapkan satu unit TPST dapat melayani sekitar 120.000 jiwa, maka kebutuhan TPST di Padalarang mencapai 2 unit. Namun, kondisi eksisting menunjukkan belum ada satu pun TPST yang tersedia, sehingga terjadi gap sebesar 2 unit.

Sementara itu, jumlah penduduk Kecamatan Ngamprah pada tahun 2025 diproyeksikan sebanyak 119.100 jiwa dengan timbulan sampah harian sebesar 59,5 ton. Dengan asumsi yang sama, kebutuhan TPST di Ngamprah adalah 1 unit. Akan tetapi, kondisi eksisting juga menunjukkan bahwa tidak tersedia satupun TPST, sehingga terjadi gap sebesar 1 unit.

Dari kedua kecamatan tersebut, Padalarang memiliki kebutuhan lebih mendesak karena jumlah penduduk lebih besar serta menghasilkan timbulan sampah hampir dua kali lipat dibandingkan Ngamprah. Oleh sebab itu, pembangunan TPST di Padalarang harus menjadi prioritas pertama, dengan

target minimal 1 unit TPST baru dalam jangka pendek dan penambahan unit berikutnya secara bertahap. Setelah itu, pembangunan TPST di Ngamprah dapat menjadi prioritas kedua, mengingat walaupun kebutuhannya hanya 1 unit, fasilitas tersebut tetap sangat penting agar pelayanan persampahan di kecamatan ini dapat berjalan terpadu.

Secara keseluruhan, terdapat kekurangan 3 unit TPST di kedua kecamatan ini. Dengan memperhatikan gap kebutuhan dan kondisi eksisting, strategi pembangunan TPST perlu diarahkan secara bertahap dengan mendahulukan wilayah berpenduduk padat dan bertimbulan sampah tinggi. Hal ini akan mendukung pencapaian target pelayanan persampahan minimal 80% penduduk terlayani, sekaligus memperkuat sistem pengelolaan sampah berkelanjutan di Kabupaten Bandung Barat.

Tabel V. 13 Indikator dan Parameter Penambahan Bank Sampah di Kelurahan

Indikator	Parameter	Sumber Regulasi
Jumlah penduduk / KK	1 Bank Sampah idealnya melayani $\pm$ 500–1.000 KK atau 2.500–5.000 jiwa	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, SNI 3242-2008
Timbulan sampah harian	0,5–0,6 kg/orang/hari	SNI 19-2454-2002
Potensi sampah anorganik (plastik, kertas, logam)	$\pm$ 20–30% dari total timbulan	SNI 19-2454-2002
Cakupan layanan	1 kelurahan minimal memiliki 1 unit Bank Sampah	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Ketersediaan lahan/lokasi	Minimal ruang $\pm$ 50–100 m²	Buku Teknis TPS 3R
Partisipasi masyarakat	Jumlah kelompok/RT/RW yang bersedia bergabung	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam

Indikator	Parameter	Sumber Regulasi
		Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Minimal 80% penduduk perkotaan terlayani sistem persampahan	Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Tabel V. 14 Kebutuhan Bank Sampah Berdasarkan Jumlah Penduduk, Timbulan Sampah, dan Standar SNI di Kecamatan Padalarang Tahun 2025

Desa	Jumlah Penduduk 2025	Jumlah KK dengan asumsi 1 keluarga = 5 orang	Timbulan Sampah $Q = \text{Penduduk} \times 0,5-0,6 \text{ kg/org/hari}$	Bank Sampah Yang tersedia (Unit)	Jumlah Bank Sampah Yang Dibutuhkan 1 Kelurahan dengan SNI (1000 KK)
Laksanamekar	19.347	3.869	9.674	0	4
Cimerang	5.021	1.004	2.511	0	1
Cipeundeuy	14.014	2.803	7.007	0	3
Kertajaya	21.003	4.201	10.502	0	4
Jayamekar	19.875	3.975	9.937	0	4
Padalarang	36.443	7.289	18.222	0	7
Kertamulya	27.933	5.587	13.967	0	6
Ciburuy	21.312	4.262	10.656	0	4
Tagogapu	11.736	2.347	5.868	0	2
Campakamekar	15.315	3.063	7.657	0	3
Kecamatan Padalarang	181.357	38.400	96.000	0	38

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk Kecamatan Padalarang pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai 181.357 jiwa atau setara dengan 38.400 KK, dengan timbulan sampah harian sekitar 96 ton (0,5–0,6 kg/orang/hari). Berdasarkan standar SNI, satu unit Bank Sampah idealnya melayani sekitar 1.000 KK, sehingga kebutuhan total Bank Sampah di Kecamatan Padalarang adalah 38 unit. Namun, kondisi eksisting menunjukkan bahwa belum ada satupun Bank Sampah yang tersedia, sehingga terdapat gap sebesar 38 unit yang harus segera dipenuhi.

Jika ditinjau per desa, prioritas pertama pembangunan Bank Sampah ditujukan kepada desa dengan jumlah kebutuhan tertinggi, yaitu Padalarang (7 unit, penduduk 36.443 jiwa, 7.289 KK, timbulan 18,2 ton/hari) dan

Kertamulya (6 unit, penduduk 27.933 jiwa, 5.587 KK, timbulan 13,9 ton/hari). Kedua desa ini menyumbang timbulan sampah harian terbesar dan memiliki gap kebutuhan yang paling tinggi.

Prioritas kedua mencakup desa dengan kebutuhan menengah yaitu Kertajaya (4 unit), Jayamekar (4 unit), Ciburuy (4 unit), dan Laksanamekar (4 unit). Masing-masing desa ini memiliki jumlah penduduk sekitar 19.000–21.000 jiwa dan menghasilkan timbulan sampah harian antara 9–10 ton. Dengan kondisi eksisting nihil, maka seluruh kebutuhan tersebut menjadi gap yang harus dipenuhi.

Prioritas ketiga meliputi desa dengan kebutuhan lebih rendah tetapi tetap signifikan, seperti Cipeundeuy (3 unit), Campakamulya (3 unit), serta Tagogapu (2 unit). Walaupun jumlah kebutuhan unit lebih sedikit, penyediaan Bank Sampah di desa-desa ini penting untuk mendukung pemerataan layanan. Adapun Cimerang hanya membutuhkan 1 unit Bank Sampah (penduduk 5.021 jiwa, 1.004 KK, timbulan 2,5 ton/hari), sehingga menjadi prioritas terakhir. Walaupun jumlah kebutuhannya kecil, keberadaan Bank Sampah di desa ini tetap penting agar tidak ada wilayah yang terlewat dari sistem pengelolaan berbasis 3R.

Secara keseluruhan, Kecamatan Padalarang mengalami defisit 38 unit Bank Sampah. Pembangunan harus dilakukan secara bertahap dengan mendahulukan desa berpenduduk padat dan timbulan sampah tinggi seperti Padalarang dan Kertamulya, kemudian diikuti oleh desa dengan kebutuhan menengah dan kecil. Dengan strategi prioritas ini, diharapkan pelayanan persampahan berbasis Bank Sampah dapat lebih merata, berkelanjutan, dan mendukung pencapaian target pengurangan sampah di sumber sesuai amanat kebijakan nasional.

Tabel V. 15 Kebutuhan Bank Sampah Berdasarkan Jumlah Penduduk, Timbulan Sampah, dan Standar SNI di Kecamatan Ngamprah Tahun 2025

Desa	Jumlah Penduduk 2025	Jumlah KK dengan asumsi 1 keluarga = 5 orang	Timbulan Sampah $Q = \text{Penduduk} \times 0,5 - 0,6 \text{ kg/org/hari}$	Bank Sampah Yang tersedia (Unit)	Jumlah Bank Sampah Yang Dibutuhkan 1 Kelurahan dengan SNI (1000 KK)
Cimareme	10.562	2.112	5.281	0	2
Gadobangkong	18.581	3.716	9.291	0	4
Tanimulya	39.369	7.874	19.684	0	8
Pakuhaji	9.880	1.976	4.940	0	2
Cilame	41.479	8.296	20.739	0	8
Margajaya	19.611	3.922	9.805	0	4
Mekarsari	17.182	3.436	8.591	0	3
Ngamprah	8.557	1.711	4.279	0	2
Sukatani	8.088	1.618	4.044	0	2
Cimanggu	7.736	1.547	3.868	0	2
Bojongkoneng	5.956	1.191	2.978	0	1
Kecamatan Ngamprah	119.100	23.820	59.550	0	24

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan Tabel V.18, jumlah penduduk Kecamatan Ngamprah tahun 2025 diproyeksikan mencapai 119.100 jiwa atau setara dengan 23.820 KK, dengan timbulan sampah harian sekitar 297,7 ton (0,5–0,6 kg/orang/hari). Mengacu pada standar SNI bahwa satu Bank Sampah ideal melayani 1.000 KK, maka kebutuhan Bank Sampah di Kecamatan Ngamprah adalah 24 unit. Namun, kondisi eksisting menunjukkan bahwa belum ada satupun Bank Sampah yang tersedia, sehingga terdapat gap sebesar 24 unit yang harus segera dipenuhi.

Jika ditinjau lebih rinci, prioritas pertama pembangunan Bank Sampah adalah desa dengan kebutuhan unit terbanyak dan timbulan sampah besar, yakni Cilame (8 unit, penduduk 41.479 jiwa, timbulan 103,7 ton/hari), Tanimulya (8 unit, penduduk 39.369 jiwa, timbulan 98,4 ton/hari), serta Margajaya (4 unit, penduduk 19.611 jiwa, timbulan 49 ton/hari). Ketiga desa ini menjadi penghasil sampah terbesar sehingga sangat mendesak untuk segera dibangun Bank Sampah.

Prioritas kedua adalah desa dengan kebutuhan sedang, yaitu Gadobangkong (4 unit, timbulan 46,5 ton/hari), Mekarsari (3 unit, timbulan 42,9 ton/hari), serta Cimerame (2 unit, timbulan 26,4 ton/hari). Meskipun jumlah kebutuhan Bank Sampah lebih rendah dibandingkan desa prioritas pertama, volume sampah di desa-desa ini tetap signifikan sehingga perlu segera ditangani.

Prioritas ketiga adalah desa dengan kebutuhan relatif kecil, yaitu Ngamprah (2 unit), Sukatani (2 unit), Cimanggu (2 unit), Paku Haji (2 unit), serta Bojongkoneng (1 unit). Walaupun kebutuhan unit Bank Sampah lebih sedikit, penyediaannya tetap penting agar pengelolaan sampah berbasis 3R dapat merata ke seluruh desa.

Secara keseluruhan, Kecamatan Ngamprah menghadapi defisit 24 unit Bank Sampah dari kebutuhan total, dengan kondisi eksisting nol unit. Pembangunan harus dilakukan secara bertahap, diawali di desa-desa dengan jumlah penduduk besar dan timbulan sampah tinggi, kemudian dilanjutkan ke desa dengan kebutuhan menengah, dan terakhir desa dengan kebutuhan rendah. Dengan strategi prioritas ini, diharapkan Bank Sampah dapat menjadi instrumen penting dalam mengurangi timbulan sampah di sumber dan memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kecamatan Ngamprah.

Tabel V. 16 Kondisi Eksisting Fasilitas Pengelolaan Persampahan di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah

PADALARANG	UPT	BANK SAMPAH	TPS3R	PEGIAT MAGGOT
Laksanamekar	V	V		
Cimerang	V			
Cipeundeuy	V			
Kertajaya	V			
Jayamekar	V	V		V
Padalarang	V	V		V
Kertamulya	V	V		
Ciburuy	V			
Tagogapu			V	
Campakamekar		V		
NGAMPRAH	UPT	BANK SAMPAH	TPS3R	PEGIAT MAGGOT
Cimareme	V			
Gadobangkong	V			V

Tanimulya	V	V		V
Pakuhaji	V			V
Cilame	V			
Margajaya	V			V
Mekarsari	V		V	
Ngamprah				V
Sukatani	V			V
Cimanggu				V
Bojongkoneng	V	V		V

Sumber: Hasil analisis, 2025

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Padalarang memerlukan pembangunan Pegiat Maggot sebanyak 4 unit meliputi Desa Cimerang, Cipeundeuy, Kertajaya dan Ciburuy dikarenakan belum terdapatnya fasilitas yang mendukung pengolahan dan pengurangan sampah dari sumber. Sehingga dengan dibangunkannya Pegiat Maggot di desa-desa tersebut diharapkan dapat mengurangi timbunan sampah dari sumber.

Sedangkan di Kecamatan Ngamprah memerlukan pembangunan Pegiat Maggot pada Desa Cimoreme dan Cilame sebanyak 2 unit yaitu 1 unit di setiap desa. Dikarenakan kedua desa tersebut belum memiliki fasilitas persampahan yang mendukung pengolahan dan pengurangan dari sumber.

Dalam rangka mengimplementasikan strategi pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan luasan lahan untuk pembangunan berbagai fasilitas pengelolaan sampah, seperti TPS 3R, TPST, Bank Sampah, dan Pegiat Maggot. Ketersediaan luasan lahan yang sesuai dengan regulasi dan karakteristik tiap wilayah sangat penting untuk memastikan keberlanjutan operasional fasilitas pengelolaan sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah. Berikut adalah standar luasan lahan yang diperlukan untuk masing-masing fasilitas pengelolaan sampah berdasarkan regulasi yang berlaku:

Tabel V. 17 Kebutuhan Luasan Lahan

Jenis Fasilitas	Luasan Lahan yang Dibutuhkan	Keterangan
TPS 3R	1.000 m ²	Sesuai dengan SNI 3242-2008
TPST	2-5 Ha	Sesuai dengan Peraturan Menteri PU No. 03/PRT/M/2013
Bank Sampah	50–100 m ²	Sesuai dengan SNI 3242-2008

Jenis Fasilitas	Luasan Lahan yang Dibutuhkan	Keterangan
Pegiat Maggot	100-200 m ²	Sesuai dengan praktik budidaya maggot

Sumber: Hasil analisis, 2025

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Kecamatan Padalarang dan Kecamatan Ngamprah memerlukan alokasi luasan lahan yang cukup besar untuk mendukung berbagai fasilitas pengelolaan sampah, termasuk TPS 3R, TPST, Bank Sampah, dan Pegiat Maggot. Kecamatan Padalarang memiliki kebutuhan yang mendesak untuk penambahan TPS 3R, yang memerlukan 1.000 m² per unit, serta Bank Sampah dan Pegiat Maggot. Kecamatan Ngamprah juga menghadapi kebutuhan serupa, meskipun dalam skala yang sedikit lebih kecil.

Untuk memastikan implementasi fasilitas-fasilitas tersebut, pengecekan kebutuhan lahan di setiap desa atau kelurahan perlu dilakukan secara mendalam. Jika terdapat keterbatasan lahan di beberapa desa, alternatif solusi seperti penggunaan lahan bersama atau pemanfaatan lahan yang belum terpakai dapat dipertimbangkan.

Berdasarkan tabel kebutuhan luasan lahan untuk fasilitas pengelolaan sampah, pertama-tama perlu dilakukan pemetaan lahan di setiap desa atau kelurahan untuk memastikan adanya lahan yang cukup untuk pembangunan TPS 3R, TPST, Bank Sampah, dan Pegiat Maggot. Pengecekan luasan lahan yang tersedia di wilayah-wilayah yang telah diidentifikasi akan membantu pemerintah daerah dalam memutuskan apakah fasilitas yang diperlukan dapat dibangun sesuai dengan standar regulasi atau perlu dilakukan penyesuaian lokasi. Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan antara lain:

- **Penggunaan Lahan Bersama:** Jika beberapa desa tidak memiliki cukup lahan untuk fasilitas pengelolaan sampah, konsep lahan bersama dapat diterapkan, di mana beberapa desa dapat berbagi fasilitas yang sama, terutama untuk fasilitas TPST yang memerlukan lahan lebih besar.
- **Pemanfaatan Lahan yang Belum Terpakai:** Pemanfaatan lahan tidur atau lahan yang belum dimanfaatkan secara maksimal di sekitar kawasan

padat penduduk dapat menjadi alternatif yang efektif untuk mendirikan TPS 3R dan Bank Sampah.

Untuk memastikan keberhasilan implementasi strategi ini, perlu diperhatikan kebutuhan luasan lahan yang cukup untuk pembangunan berbagai fasilitas pengelolaan sampah, seperti TPS 3R, TPST, Bank Sampah, dan Pegiat Maggot. Berdasarkan tabel kebutuhan luasan lahan yang telah disusun, masing-masing fasilitas memerlukan area tertentu yang harus disesuaikan dengan kondisi eksisting di setiap desa dan kecamatan. Misalnya, TPS 3R memerlukan luasan 1.000 m² per unit, sementara TPST membutuhkan 2–5 hektar untuk dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan standar regulasi yang ada. Bank Sampah dan Pegiat Maggot juga membutuhkan lahan dengan ukuran yang bervariasi, namun tetap perlu dipastikan bahwa lokasi yang tersedia memenuhi kebutuhan fasilitas ini.

Untuk mewujudkan implementasi strategi ini, langkah pertama adalah memastikan kecukupan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas tersebut. Pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan lahan yang ada, dengan mempertimbangkan kondisi topografi, aksesibilitas, dan kepadatan penduduk yang ada di wilayah tersebut. Jika ada keterbatasan lahan di desa tertentu, alternatif solusi seperti penggunaan lahan bersama atau pemanfaatan lahan kosong dapat dipertimbangkan.

Dengan demikian, implementasi hasil strategi ini tidak hanya bergantung pada anggaran dan teknologi, tetapi juga pada ketersediaan lahan yang sesuai dengan kebutuhan setiap fasilitas pengelolaan sampah. Pengecekan terhadap kebutuhan luasan lahan ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas dapat dibangun dengan optimal dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2. Meningkatkan pelatihan SDM dan pelibatan warga dengan memanfaatkan budidaya maggot sebagai praktik pengelolaan sampah organik

Kecamatan Padalarang menyebut pegiat maggot di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah sudah cukup besar dan siap

bekerjasama untuk menerima limbah organik, namun terkendala pada kesiapan sarana prasarana di warga dan minimnya pelatihan langsung. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa tenaga ahli sudah ada, tapi pelaksanaan teknis di lapangan masih lemah, ini adalah celah yang perlu diisi dengan pelatihan. Budidaya maggot tidak hanya mengurangi sampah organik, tapi juga memberi nilai ekonomi yang dimana maggot nantinya dipasarkan ke peternakan ayam, ini dapat menarik partisipasi warga dan karang taruna. Ini dapat mendukung meningkatkan target pengurangan 30%.

3. Mengedukasi masyarakat melalui kampanye berbasis regulasi (Perda) dan menjelaskan konsekuensi hukum membuang sampah sembarangan agar lebih taat aturan

Narasumber menyampaikan bahwa kesadaran masyarakat rendah, dan sanksi Perda belum berjalan efektif. Hasil wawancara menyebut bahwa sanksi sosial tidak cukup membuat masyarakat jera. Diperlukan regulasi yang tegas, termasuk sanksi denda, dan didukung bukti nyata seperti CCTV, seperti yang sudah dilakukan beberapa desa. Ada juga praktik inovatif seperti Satlinmas keliling dengan speaker dari Satpol PP Provinsi yang efektif dalam menyampaikan pesan ke masyarakat. Kepatuhan masyarakat terhadap regulasi sanksi dan inovasi menjadi pendorong perilaku dan mengubah kebiasaan membuang sembarangan menjadi memilah dari sumber. Ini mendukung meningkatkan baik target pengurangan 30% maupun penanganan 70%.

4. Mengefisiensikan pembiayaan pengelolaan dengan digitalisasi sistem menggunakan aplikasi Sampah Kita untuk memantau dan mengoptimalkan ritase dan biaya

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa Pemerintah Provinsi telah menyediakan aplikasi “Sampah Kita” yang bertujuan untuk mendeteksi jumlah muatan sampah di tiap desa. Idealnya, data sampah yang telah dipilah diinput terlebih dahulu oleh pihak RT dan RW ke dalam aplikasi. Data tersebut kemudian diteruskan ke tingkat desa, lalu ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH), yang selanjutnya akan mengeluarkan surat jalan bagi armada pengangkut

sampah. Sayangnya, implementasi sistem ini masih terkendala. Salah satu hambatan utama adalah belum lengkapnya sarana dan prasarana pemilahan dan pengangkutan sampah di tingkat RT dan RW. Selain itu, pendataan jumlah ritase sampah pun masih belum berjalan secara optimal, karena tidak adanya sosialisasi atau pelatihan. Padahal, berdasarkan keterangan dari DLH, ritase pengangkutan sering terganggu ketika TPA mengalami *overload*, dan belum ada sistem digital yang mampu memantau hal ini secara *real-time* di tingkat bawah. Di sisi lain, efisiensi biaya menjadi sangat penting karena retribusi dari warga saat ini hanya mampu menutup sekitar 20–25% dari total biaya pengelolaan. Oleh karena itu, optimalisasi penggunaan aplikasi “Sampah Kita” diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi pemborosan ritase dan menekan beban biaya tambahan. Ini mendukung meningkatkan target penanganan 70%.

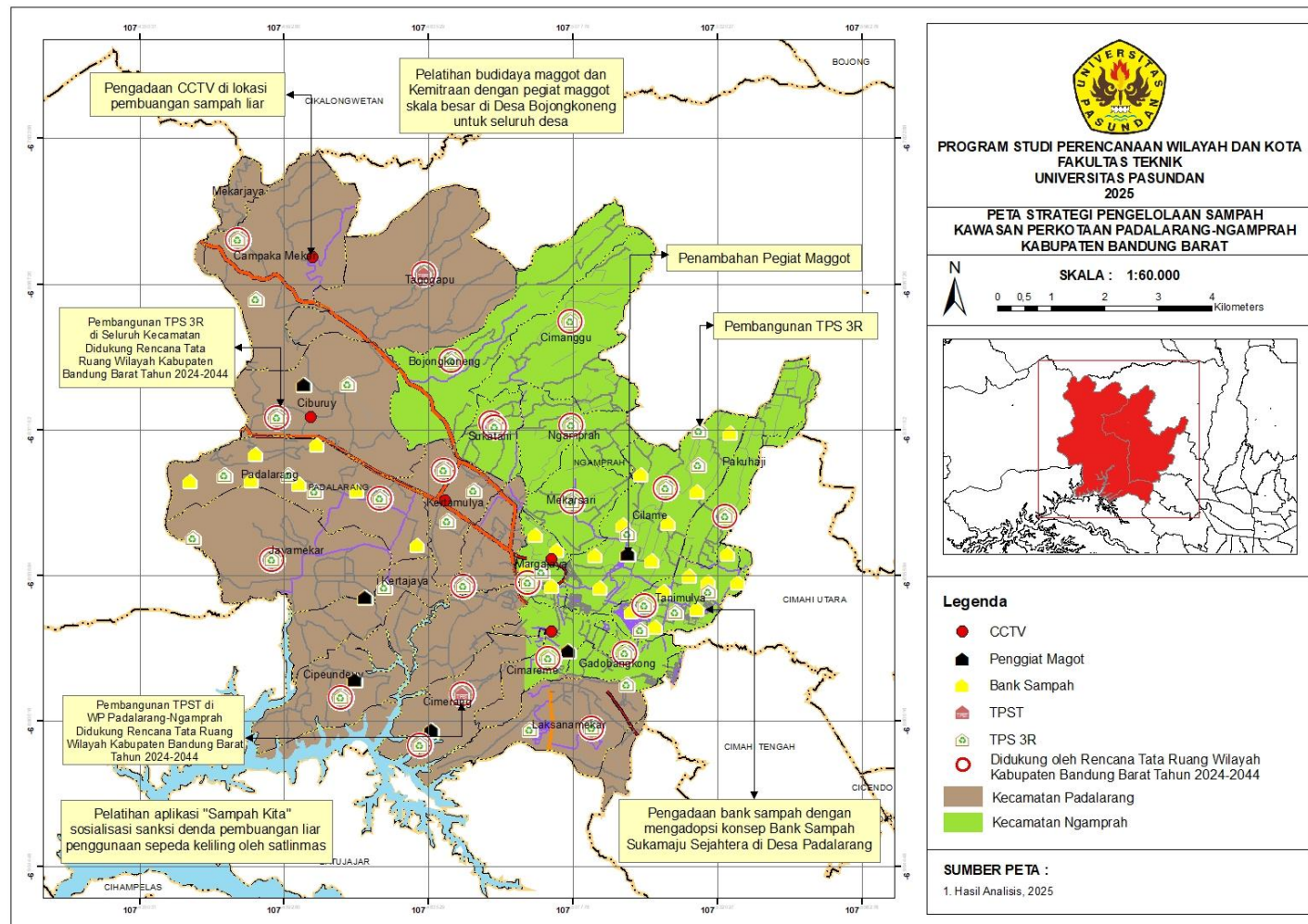
Keempat strategi yang dihasilkan dari analisis SWOT menunjukkan kontribusi yang saling melengkapi dalam upaya mengurangi timbulan sampah sesuai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 30% pengurangan dan 70% penanganan pada tahun 2025. Strategi pertama dan keempat mendukung optimalisasi sistem penanganan sampah melalui pengadaan sarana dan penerapan teknologi digital. Strategi kedua dan ketiga berfokus pada aspek sumber (hulu), yaitu pengurangan sampah melalui perubahan perilaku, edukasi, dan pengolahan organik melalui budidaya maggot. Sinergi antar strategi ini diyakini dapat mempersempit kesenjangan antara capaian aktual (pengurangan 13,34% dan penanganan 18,13%) dengan target yang telah ditetapkan, serta menciptakan pengelolaan sampah yang lebih partisipatif, berkelanjutan, dan terintegrasi di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah.

**Tabel V. 18 Strategi Pengelolaan Sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang-
Ngamprah**

No	Strategi	Program/Kegiatan	Kawasan Perkotaan Padalarang- Ngamprah		Stakeholder
			Kecamatan Ngamprah	Kecamatan Padalarang	
1	Mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana melalui dukungan CSR dan Musrenbang	Penambahan TPS3R (38 unit)	Desa Tanimulya dan Cilame 8 unit; Desa Gadobangkong dan Margajaya 4 unit; Desa Cimoreme, Pakuhaji, Mekarsari, Ngamprah, Sukatani, Cimanggu, dan Bojongkoneng 5 unit	Desa Padalarang 4 unit; Desa Kertamulya 3 unit; Desa Cimerang dan Cipeundeuy 2 unit; Desa Laksanamekar, Kertajaya, Jayamekar, Ciburuy, dan Campakamekar 10 unit	DLH, Desa/Kelurahan, Bappelitbangda, CSR, Karang Taruna, Masyarakat
		Penambahan TPST (3 unit)	1 unit Kecamatan Ngamprah	2 unit Kecamatan Padalarang	
		Penambahan Bank Sampah (33 unit) dengan skala prioritas pertama berdasarkan gap kondisi eksisting dan kebutuhan	Desa Cilame 8 unit, Desa Tanimulya 8 unit dan Desa Margajaya 4 unit	Desa Padalarang 7 unit dan Desa Kertamulya 6 unit	
		Penambahan Pegiat Maggot (6 unit)	Desa Cimerang, Cipeundeuy, Kertajaya dan Ciburuy	Desa Cimoreme dan Cilame	
2	Meningkatkan pelatihan dan keterlibatan warga dalam pengelolaan sampah	• Pelatihan budidaya maggot • Kemitraan dengan pegiat maggot skala besar di Desa Bojongkoneng	Seluruh desa	Seluruh desa	DLH, Karang Taruna, Pegiat Maggot, Masyarakat
		Pelatihan bank sampah mengadopsi konsep pengelolaan sampah berbasis masyarakat, Bank Sampah Sukamaju Sejahtera di Desa Padalarang	Seluruh desa	Seluruh desa	DLH, Desa/Kelurahan, Masyarakat
3	Meningkatkan edukasi dan penegakan regulasi	Pemasangan CCTV di lokasi pembuangan sampah liar	Desa Margajaya, Desa Cimoreme	Desa Campakamekar, Desa Ciburuy, Desa Kertamulya	DLH, Satpol PP, Kecamatan, Satlinmas, RT/RW, Masyarakat

No	Strategi	Program/Kegiatan	Kawasan Perkotaan Padalarang- Ngamprah		Stakeholder
			Kecamatan Ngamprah	Kecamatan Padalarang	
	melalui Perda	• Sosialisasi sanksi denda pembuangan liar • Penggunaan sepeda keliling (speaker peringatan pilah sampah) oleh Satlinmas	Seluruh desa	Seluruh desa	
4	Efisiensi pembiayaan dan pendataan melalui digitalisasi pengelolaan sampah	Pelatihan aplikasi "Sampah Kita" untuk penghitungan ritase dan laporan pengangkutan	Seluruh desa	Seluruh desa	DLH, RT/RW, Kecamatan

Sumber : Hasil Analisis, 2025



Gambar V. 2 Strategi Pengelolaan Sampah Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Faktor-faktor internal dan eksternal pengelolaan persampahan di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah menunjukkan bahwa kelemahan internal masih menjadi hambatan dominan, khususnya dalam hal keterbatasan sarana prasarana dan kapasitas kelembagaan. Meskipun beberapa desa telah memiliki infrastruktur dasar seperti bank sampah, TPS3R, dan budidaya maggot, namun belum tersebar secara merata dan fungsionalitasnya belum optimal. Sementara dari sisi eksternal, terdapat peluang signifikan seperti potensi kolaborasi dengan pelaku swasta, dukungan CSR, serta keterlibatan masyarakat dalam skema pengelolaan berbasis komunitas. Ancaman terbesar justru datang dari perkembangan permukiman yang belum terintegrasi dalam sistem layanan persampahan, yang bila tidak diantisipasi, akan memperburuk volume timbunan sampah yang tidak tertangani.

Berdasarkan posisi pada kuadran III SWOT, strategi yang paling tepat diterapkan adalah pendekatan *Weakness–Opportunities* (WO), yaitu strategi yang memanfaatkan peluang eksternal untuk menutupi dan mengatasi kelemahan internal. Strategi ini secara langsung mengarah pada penguatan sistem kelembagaan dan operasional melalui kolaborasi pendanaan dan penyediaan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan pendekatan edukatif berbasis regulasi. Dengan memanfaatkan kekuatan peluang yang ada, pengelolaan persampahan di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah dapat diarahkan menuju sistem yang lebih berdaya, partisipatif, dan berkelanjutan agar dapat memenuhi target pengelolaan sampah yang telah ditetapkan.

Selain itu, peran lokus terhadap pengurangan sampah di Kabupaten Bandung Barat (KBB) sangat penting, terutama dalam perspektif tata ruang dan ekonomi sirkular. Tata ruang yang terencana dengan baik dapat memfasilitasi pembangunan fasilitas pengelolaan sampah seperti TPS3R, TPST, dan Bank Sampah yang terintegrasi dengan permukiman. Pengembangan area perkotaan

yang memprioritaskan ruang terbuka hijau dan fasilitas pengelolaan sampah berbasis sirkular dapat mengurangi beban sampah yang masuk ke TPA. Selain itu, implementasi ekonomi sirkular di tingkat lokal, seperti daur ulang sampah organik melalui budidaya maggot atau pemanfaatan kembali bahan-bahan daur ulang, dapat membantu mengurangi timbulan sampah, meningkatkan nilai ekonomi lokal, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pendekatan ini tidak hanya akan mendukung pengurangan sampah, tetapi juga menciptakan ekosistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, menghasilkan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mendukung upaya pengurangan timbulan sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah, antara lain:

1. Penambahan TPST, TPS3R, bank sampah dan pegiat maggot, terutama di wilayah yang tidak dilayani UPT Persampahan dan sama sekali tidak memiliki infrastruktur dasar pengelolaan persampahan.
2. Pelatihan rutin kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah organik berbasis budidaya maggot.
3. Pemanfaatan aplikasi Sampah Kita secara optimal di tingkat desa untuk memantau timbulan, pemilahan, ritase sampah dan pelaporan pengangkutan.
4. Pemasangan CCTV di titik rawan pembuangan sampah sembarangan dapat memperkuat pengawasan dan meningkatkan kepatuhan masyarakat. Dengan bukti visual yang sah, pelanggaran dapat diidentifikasi dengan lebih mudah, mendukung penegakan hukum yang lebih efektif, dan mengedukasi masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya.

6.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian, antara lain :

- A. Saran Bagi Obyek Penelitian

1. Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dalam penerapan strategi *Weakness–Opportunities* (WO). Pemerintah harus memanfaatkan peluang kolaborasi dengan sektor swasta, serta mengoptimalkan dukungan CSR untuk pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah.
2. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan pemerintah desa disarankan untuk lebih aktif mengadakan pelatihan terkait pengelolaan sampah berbasis komunitas, termasuk pelatihan penggunaan aplikasi digital "Sampah Kita" dalam penginputan data dan pengelolaan timbulan sampah.
3. Pengawasan terhadap penerapan regulasi pengelolaan sampah harus diperkuat melalui peningkatan peran teknologi dan penggunaan sistem digital untuk memantau pelanggaran serta memperkuat sanksi hukum yang ada, dengan melibatkan Satpol PP, DLH, dan masyarakat sebagai pengawas aktif.

B. Saran Bagi Penelitian Selanjutnya

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk fokus pada analisis lebih dalam mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Penelitian ini dapat menggali faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran dan perilaku warga dalam melakukan pemilahan sampah secara mandiri, serta mencari cara untuk meningkatkan keterlibatan mereka.
2. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi skema pembiayaan yang lebih berkelanjutan dan kemitraan antara desa, sektor swasta, dan pemerintah dalam pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah di desa yang masih kurang fasilitasnya. Hal ini dapat melibatkan sektor swasta untuk membantu pendanaan, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis sirkular ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, F. (2011). Aspek Kelembagaan pada Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional. *Jurnal Permukiman*, 6(2), 78. <https://doi.org/10.31815/jp.2011.6.78-84>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat. (2024). Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2024. *Badan Pusat Statistik*, XV, 1–410.
- Badan Standardisasi Nasional. (2002). *Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-2454-2002 tentang Pengelolaan Sampah*. Jakarta: BSN.
- Bank Sampah Jakarta. (2013). Konsep Pengelolaan Sampah. Diakses dari : www.banksampahjakarta.blogspot.com.
- Bastiaans, M. J. (1984). New Class of Uncertainty Relations for Partially Coherent Light. *13th Congress of the International Commission for Optics, Optics in Modern Science and Technology, Conference Digest*, 638–639. <https://doi.org/10.1364/josaa.1.000711>
- Ervani, M. N., Indrawati, D., & Purwaningrum, P. (2021). Perencanaan Teknis Operasional Pengelolaan Sampah Di Permukiman Padat Penduduk (Kelurahan Kota Bambu Selatan). *Jurnal Bhuwana*, 1(1), 118–129. <https://doi.org/10.25105/bhuwana.v1i1.9289>
- Fitra, M., Awaluddin, A., & Desman, A. (2023). Analisis Timbulan Sampah dan Pengelolaannya di Kelurahan Tabing Banda Gadang Kota Padang. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Mandiri*, 2(1), 17–25. <https://doi.org/10.33761/jklm.v2i2.1299>
- Haerani, D., & Sasongko, S. (2019). Pengelolaan Sampah Di Kota Tasikmalaya Waste Management In Tasikmalaya City. *Proceeding Biology Education Conference*, 16(1), 266–274.
- Hamna. (2024). Metode Penelitian. *Jurnal Ragam Pengabdian*, Vo.1, No.(1), 07–14.
- Kassawe, A., & Getahun, E. (2025). Solid Waste Generation Rate, Composition Analysis, and Proposed Management Plan: A Case Study of Main Market Centers of Bahir Dar City. *Scientific World Journal*, 2025(1). <https://doi.org/10.1155/tswj/8504268>

- Oktaviani, D., Sakti, I. W., Sari, O. Y., Suhardi, A. R., Astuti, N. C., & Darajat, Z. (2024). Orientasi Upaya Mengurangi Sampah Rumah Tangga Melalui Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Limbah Organik dan Anorganik Dengan Metode Reduce, Reuse, dan Recycle. *Jurnal PkM (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 7(3), 384. <https://doi.org/10.30998/jurnalpkm.v7i3.22450>
- Pemerintah Indonesia. (2017). Republic of Indonesia Presidential Regulation no. 97 of 2017 concerning National Policy and Strategic (Jakstranas) Management of Household Waste and Household-Similar Waste. *Republik Indonesia Government*, 1–79.
- Rachman, W. O. N. N., & Safira, E. (2020). Factors Related to an Increase in Waste Landfill at Lemo Vllage in Kulisusu Sub Distrik in North Buton Regency. *MIRACLE Journal of Public Health*, 3(1), 39–47.
- Ranno Marlany Rachman, D. (2024). Optimalisasi sitem pengelolaan sampah perkotaan “ Strategi dan Implementasi.” In *Tohar Media*.
- Saha, E., Rosdiana, R., & Sakay, R. (2023). Perencanaan Teknis Operasional Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Kawasan Perumahan BTN Rajawali Residence Kota Kendari). *Jurnal Teluk*, 3(2), 37–043.
- Sari, D. (2023). *DAN ANORGANIK* (Issue December 2022).
- Sekarsari, R. W., Halifah, N., Rahman, T. H., Farida, A. J., Asmara Kandi, M. I., Nurfadilla, E. A., Anwar, M. M., Almu, F. F., Arroji, S. A., Arifaldi, D. F., & Fuadah, Z. (2020). Pemanfaatan Sampah Organik Untuk Pengolahan Kompos. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 1(3), 200. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v1i3.6510>
- Sujatini, S., Dewi, E. P., Ridwan W, M., & Permadi, H. (2024). Tata Ruang Berkelanjutan untuk Budidaya Maggot: Pendekatan Lingkungan dan Arsitektural. *IKRA-ITH Teknologi Jurnal Sains Dan Teknologi*, 9(1), 47–58. <https://doi.org/10.37817/ikraith-teknologi.v9i1.4173>

LAMPIRAN

LAMPIRAN A SK PEMBIMBING

	UNIVERSITAS PASUNDAN <i>Fakultas Teknik</i>	<table border="0"><tr><td>Teknologi Pangan</td><td>022 - 2019339</td></tr><tr><td>Teknik dan Manajemen Industri</td><td>022 - 2019335</td></tr><tr><td>Teknik Mesin</td><td>022 - 2019352</td></tr><tr><td>Teknik Informatika</td><td>022 - 2019371</td></tr><tr><td>Teknik Lingkungan</td><td>022 - 2009574</td></tr><tr><td>Teknik Planologi</td><td>022 - 2006466</td></tr></table>	Teknologi Pangan	022 - 2019339	Teknik dan Manajemen Industri	022 - 2019335	Teknik Mesin	022 - 2019352	Teknik Informatika	022 - 2019371	Teknik Lingkungan	022 - 2009574	Teknik Planologi	022 - 2006466
Teknologi Pangan	022 - 2019339													
Teknik dan Manajemen Industri	022 - 2019335													
Teknik Mesin	022 - 2019352													
Teknik Informatika	022 - 2019371													
Teknik Lingkungan	022 - 2009574													
Teknik Planologi	022 - 2006466													
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PASUNDAN														
Nomor: 075/Unpas-FT.D/Q/II/2025														
Tentang														
Pengangkatan Pembimbing Tugas Akhir														
Dekan Fakultas Teknik Universitas Pasundan														
Menimbang	: 1. Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa Fakultas Teknik yang melakukan penelitian, perlu ditunjuk Pembimbing Utama dan atau Pembimbing Pendamping;													
Mengingat	: 1. Undang-Undang No.02 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah No.04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Mendikbud nomor: 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi; 5. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan No.21/YPTP/A/2023 tentang Statuta Universitas Pasundan; 6. Surat Keputusan Rektor Universitas Pasundan No.315/Unpas.R/SK/XII/2023 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Para Dekan di Lingkungan Universitas Pasundan Masa Bakti 2023-2028.													
Memperhatikan	: 1. Keputusan Ketua Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota; 2. Keputusan Pimpinan Fakultas Teknik.													
Menetapkan :	Memutuskan :													
Pertama:	Terhitung mulai tanggal 17-02-2025 pada semester GENAP tahun akademik 2024/2025 mengangkat saudara, sebagai berikut : 1. Nama : DR. IR. H. BUDI HERI PIRNGADI. MT NUPTK : 9254744645130050 Pangkat/Jabatan : (kosong) Sebagai : Pembimbing Utama 2. Nama : MEYLIANA LISANTI, ST., M.Si. NUPTK : - Pangkat/Jabatan : (kosong) Sebagai : Pembimbing Pendamping Diberi tugas sebagai Pembimbing Tugas Akhir, di Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung, untuk mahasiswa sebagai berikut : NPM : 213060013 Nama : DINDA NUR FAUZIYYAH Judul : Strategi Pengelolaan Sampah Dalam Upaya Mengurangi Timbulan Sampah di Kabupaten Bandung Barat													
Kedua:	Menugaskan kepada dosen tersebut di atas untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku;													
Ketiga:	Kepada Pembimbing tersebut di atas diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas Teknik;													
Keempat:	Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tugas Akhir mahasiswa ybs, dan semua ketentuan yang bertentangan dengan surat keputusan ini dianggap tidak berlaku, dengan ketentuan bilamana didalamnya terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.													
ditetapkan di Bandung pada tanggal: 17-02-2025 Dekan Fakultas Teknik,														
 (Prof. Dr. Ir. Yusman Taufik, M.P.) NUPTK: 4144748649131143														
Tembusan kepada : 1. Ketua Prodi teknik Perencanaan Wilayah dan Kota 2. Yang Bersangkutan 3. Peringgal														

LAMPIRAN B1 FORM PEMBIMBING



UNIVERSITAS PASUNDAN
Fakultas Teknik

Teknik Industri ☐ 022 - 2019135
 Teknologi Pangan ☐ 022 - 2019139
 Teknik Mesin ☐ 022 - 2019152
 Teknik Informatika ☐ 022 - 2019171
 Teknik Lingkungan ☐ 022 - 2009574
 Teknik Planologi ☐ 022 - 2006466

FORMULIR BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Form : TA-2

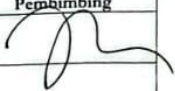
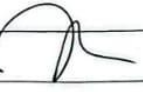
Nama/Nrp. : Dinda Nur Fauziyyah / 213060013

Judul TA : Strategi Pengelolaan Sampah dalam Upaya Mengurangi Timbunan Sampah di Kawasan Perkotaan Bandung Barat

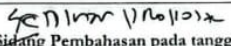
Pembimbing Utama : Dr. Ir. H. Budi Hery Pringadi, M.T.

Co-Pembimbing : Maylana Lisanti, S.T., M.S.

Uraian Bimbingan TA :

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	19/2/2025	lingkup = kawasan perkotaan materi = dikerucutkan (data yg mnd diperoleh)	
2.	21/2/2025	penulisan sumber & kata singkatan, peta lingkup digabungkan, updating & crosscheck rtrw baru	
3.		perambahan studi terdahulu, pendetilan matrik variabel dan tabel data yg diperlukan	
4.	5/3/2025	cantumkan data timbulan sampah dari sisprn, teori kebijakan = perpu 3 2013, perpres jak-	
5.		stranas jt 2017, perbup 16 2019, perda 2 2024.	
6.	6/3/2025	perambahan paragraf mengenai target pengelolaan sampah (perpres, perbup)	
7.		sumber variabel (kebijakan atau rujukan jurnal)	
8.		detail poin observasi, detail metode analisis faktor eksternal & internal, detail matriks analisis	
9.		harasi target perpres & perbup sebelum analisis step menghasilkan potensipeltang & tanda sambung pada kerangka analisis	
10.	19/3/2025	data sampah terkelola sisprn, data sekunder terlebih dahulu, pedoman tabel studi terdahulu	

Disetujui untuk melaksanakan Sidang Pembahasan pada tanggal : 18/03



Pembimbing Utama,

Co-Pembimbing,

(.....)

(.....)

Pembayaran Biaya Bimbingan :

Semester Th akd. /	Semester Th akd. /	Semester Th akd. /	Semester Th akd. /

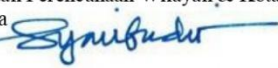
Keterangan : Bimbingan dilayani bila telah memenuhi persyaratan administrasi

Jl. Setiabudi No. 193 Bandung - 40153 DEKANAT W 022- 2019435 (HUTING) 2019433 2019407 Fax 022 - 2019329

CS Scanned with CamScanner

LAMPIRAN B2 FORM PEMBIMBING

LAMPIRAN C SURAT PENGANTAR SURVEY

	UNIVERSITAS PASUNDAN Fakultas Teknik	<table border="0"><tr><td>Teknologi Pangan</td><td>022 - 2019339</td></tr><tr><td>Teknik dan Manajemen Industri</td><td>022 - 2019335</td></tr><tr><td>Teknik Mesin</td><td>022 - 2019352</td></tr><tr><td>Teknik Informatika</td><td>022 - 2019371</td></tr><tr><td>Teknik Lingkungan</td><td>022 - 2009574</td></tr><tr><td>Teknik Planologi</td><td>022 - 2006466</td></tr></table>	Teknologi Pangan	022 - 2019339	Teknik dan Manajemen Industri	022 - 2019335	Teknik Mesin	022 - 2019352	Teknik Informatika	022 - 2019371	Teknik Lingkungan	022 - 2009574	Teknik Planologi	022 - 2006466
Teknologi Pangan	022 - 2019339													
Teknik dan Manajemen Industri	022 - 2019335													
Teknik Mesin	022 - 2019352													
Teknik Informatika	022 - 2019371													
Teknik Lingkungan	022 - 2009574													
Teknik Planologi	022 - 2006466													
		Bandung, 20 Mei 2025												
No. : 077/Unpas-FT.PWK/K.3/V/2025 Lamp. : - Hal. : Permohonan Surat Pengantar Ijin Penelitian														
Kepada Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kabupaten Bandung Barat di Tempat <i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i> Sehubungan dengan kegiatan pengumpulan data & penelitian dengan judul "<i>Strategi Pengelolaan Sampah Dalam Upaya Mengurangi Timbulan Sampah di Kawasan Perkotaan Bandung Barat</i>" yang akan digunakan sebagai bahan input data dalam melengkapi Mata Kuliah Tugas Akhir di Jurusan Perencanaan Wilayah & Kota Universitas Pasundan, maka dengan ini kami memohon agar dibuatkan surat pengantar ijin bagi kegiatan tersebut yang ditujukan pada : 1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat. 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung Barat. 3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bandung Barat. 4. Kantor Kecamatan Ngamprah. 5. Kantor Kecamatan Padalarang Adapun mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut adalah : <table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">Nama</td><td style="width: 50%;">Nrp.</td></tr><tr><td>1. Dinda Nur Fauziyyah.</td><td>213060013</td></tr></table> demikianlah surat ini kami sampaikan. Atas perhatian & kerjasamanya kami sampaikan terimakasih. <i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i> Mengetahui, Fakultas Teknik – UNPAS Jurusan Perencanaan Wilayah & Kota Ketua  (Deden Syarifudin, ST., MT.) 			Nama	Nrp.	1. Dinda Nur Fauziyyah.	213060013								
Nama	Nrp.													
1. Dinda Nur Fauziyyah.	213060013													
Jl. Setiabudi No 193 Bandung - 40153 DEKANAT (Tlp) 022- 2019435 (HUTING) 2019433, 2019407 Fax. 022 - 2019329														



UNIVERSITAS PASUNDAN
Fakultas Teknik

Teknologi Pangan	022 - 2019339
Teknik dan Manajemen Industri	022 - 2019335
Teknik Mesin	022 - 2019352
Teknik Informatika	022 - 2019371
Teknik Lingkungan	022 - 2009574
Teknik Planologi	022 - 2006466

Bandung, 19 Mei 2025

No. : 094/Unpas-FT.PWK/K.3/V/2025
Lamp. : -
Hal. : Izin Survey

Kepada Yth.
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan kegiatan pengumpulan data & penelitian dengan judul "*Strategi Pengelolaan Sampah Dalam Upaya Mengurangi Timbulan Sampah di Kawasan Perkotaan Bandung Barat*" yang akan digunakan sebagai bahan input data dalam melengkapi Mata Kuliah Tugas Akhir di Jurusan Perencanaan Wilayah & Kota Universitas Pasundan, maka dengan ini kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan dapat dibantu dalam melakukan wawancara untuk keperluan Penelitian Tugas Akhir.

Adapun mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut adalah :

Nama	Nrp.
1. Dinda Nur Fauziyyah	213060013

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang diberikan kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,
Fakultas Teknik – UNPAS
Jurusan Perencanaan Wilayah & Kota
Ketua,



Deden Syarifudin
(Deden Syarifudin, ST.,MT.)



UNIVERSITAS PASUNDAN
Fakultas Teknik

Teknologi Pangan	022 - 2019339
Teknik dan Manajemen Industri	022 - 2019335
Teknik Mesin	022 - 2019352
Teknik Informatika	022 - 2019371
Teknik Lingkungan	022 - 2009574
Teknik Planologi	022 - 2006466

Bandung, 19 Mei 2025

No. : 094/Unpas-FT.PWK/K.3/V/2025
Lamp. : -
Hal. : Izin Survey

Kepada Yth.
**Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian, dan Pengembangan Daerah
(Bappelitbangda)**
Kabupaten Bandung Barat
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan kegiatan pengumpulan data & penelitian dengan judul "*Strategi Pengelolaan Sampah Dalam Upaya Mengurangi Timbulan Sampah di Kawasan Perkotaan Bandung Barat*" yang akan digunakan sebagai bahan input data dalam melengkapi Mata Kuliah Tugas Akhir di Jurusan Perencanaan Wilayah & Kota Universitas Pasundan, maka dengan ini kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan dapat dibantu dalam melakukan wawancara untuk keperluan Penelitian Tugas Akhir.

Adapun mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut adalah :

Nama	Nrp.
1. Dinda Nur Fauziyyah	213060013

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,
Fakultas Teknik – UNPAS
Jurusan Perencanaan Wilayah & Kota
Ketua,



Syarifudin
(Deden Syarifudin, ST.,MT.)



UNIVERSITAS PASUNDAN
Fakultas Teknik

Teknologi Pangan	022 - 2019339
Teknik dan Manajemen Industri	022 - 2019335
Teknik Mesin	022 - 2019352
Teknik Informatika	022 - 2019371
Teknik Lingkungan	022 - 2009574
Teknik Planologi	022 - 2006466

Bandung, 19 Mei 2025

No. : 094/Unpas-FT.PWK/K.3/V/2025
Lamp. : -
Hal. : Izin Survey

Kepada Yth.
Kantor Kecamatan Ngamprah
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan kegiatan pengumpulan data & penelitian dengan judul "*Strategi Pengelolaan Sampah Dalam Upaya Mengurangi Timbulan Sampah di Kawasan Perkotaan Bandung Barat*" yang akan digunakan sebagai bahan input data dalam melengkapi Mata Kuliah Tugas Akhir di Jurusan Perencanaan Wilayah & Kota Universitas Pasundan, maka dengan ini kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan dapat dibantu dalam melakukan wawancara untuk keperluan Penelitian Tugas Akhir.

Adapun mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut adalah :

Nama	Nrp.
1. Dinda Nur Fauziyyah	213060013

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,
Fakultas Teknik – UNPAS
Jurusan Perencanaan Wilayah & Kota
Ketua,



Syaubudin
(Deden Syarifudin, ST.,MT.)



UNIVERSITAS PASUNDAN
Fakultas Teknik

Teknologi Pangan	022 - 2019339
Teknik dan Manajemen Industri	022 - 2019335
Teknik Mesin	022 - 2019352
Teknik Informatika	022 - 2019371
Teknik Lingkungan	022 - 2009574
Teknik Planologi	022 - 2006466

Bandung, 19 Mei 2025

No. : 094/Unpas-FT.PWK/K.3/V/2025
Lamp. : -
Hal. : Izin Survey

Kepada Yth.
Kantor Kecamatan Padalarang
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan kegiatan pengumpulan data & penelitian dengan judul "*Strategi Pengelolaan Sampah Dalam Upaya Mengurangi Timbulan Sampah di Kawasan Perkotaan Bandung Barat*" yang akan digunakan sebagai bahan input data dalam melengkapi Mata Kuliah Tugas Akhir di Jurusan Perencanaan Wilayah & Kota Universitas Pasundan, maka dengan ini kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan dapat dibantu dalam melakukan wawancara untuk keperluan Penelitian Tugas Akhir.

Adapun mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut adalah :

Nama	Nrp.
1. Dinda Nur Fauziyyah	213060013

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,
Fakultas Teknik – UNPAS
Jurusan Perencanaan Wilayah & Kota
Ketua,



Syaubudin
(Deden Syarifudin, ST.,MT.)

LAMPIRAN D DESAIN SURVEY

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah survey biasanya dirancukan dengan istilah observasi dalam pengertian sehari-hari. Menurut kamus Webster, pengertian survey adalah suatu kondisi tertentu yang menghendaki kepastian informasi, terutama bagi orang-orang yang bertanggung jawab atau yang tertarik. Dari definisi tentang survey tersebut dapat di simpulkan bahwa survey merupakan suatu aktivitas atau kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan suatu kepastian informasi (seperti: jumlah orang, persepsi atau pesan-pesan tertentu). Walaupun metodologi survei mencakup dari tahap perencanaan sampai dengan diseminasi hasil survei, di sini hanya akan dibahas mengenai metode analisis data survei yang telah terkumpul (Harlan, 2018).

Menurut Mc. Millan dalam Ibnu Hadjar (1999:102), Desain Survey adalah rencana dan struktural penelitian yang digunakan untuk memperoleh bukti-bukti dalam menjawab pertanyaan penelitian. Desain survey digunakan untuk memberikan pegangan tentang cara pelaksanaan penelitian, menentukan batas-batas penelitian dan memberi gambaran tentang apa yang akan dilakukan serta kesulitan yang akan dihadapi. Selain itu juga terdapat rencana mekanisme kerja dalam pengumpulan data-data yang digunakan sebagai acuan perumusan agar dapat memudahkan dalam penyusunan suatu laporan, mencakup kebutuhan peralatan yang digunakan untuk mendukung kegiatan survey, dan terdapat juga sistematika pelaksanaan survey, serta rencana kerja survey untuk memandu kegiatan survey yang akan dilakukan.

Penelitian ini membahas mengenai strategi pengelolaan sampah dalam upaya mengurangi timbulan sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah. Oleh karena itu, untuk mendukung berjalannya penelitian ini, perlu disusun desain survey dengan harapan mampu memecahkan persoalan kebutuhan data-data yang relevan. Dengan demikian, identifikasi, analisis, serta penggalian informasi terkait strategi pengelolaan sampah dapat dilakukan secara komprehensif. Hal ini

bertujuan agar faktor-faktor internal maupun eksternal berdasarkan aspek teknis operasional dan kelembagaan yang memengaruhi dalam pengelolaan sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah dapat dikaji dengan baik, sehingga dapat mempermudah keberlangsungan penelitian ini.

1.2 Tujuan dan Sasaran

1.2.1 Tujuan

Tujuan dari penyusunan desain survey ini adalah untuk memudahkan dalam melaksanakan kegiatan survey lapangan terutama dalam mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Dengan demikian, penelitian tugas akhir ini dapat lebih terarah dalam mengetahui ‘Strategi Pengelolaan Sampah Dalam Upaya Mengurangi Timbulan Sampah di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah.’

1.2.2 Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan survey lapangan ini yaitu :

1. Tersusunnya metodologi survey yang akan digunakan meliputi metode kegiatan pengumpulan data primer dan data sekunder.
2. Tersusunnya mekanisme kegiatan survey, yang meliputi: tahapan kegiatan dan instrument/alat-alat survey yang digunakan dalam melakukan survey lapangan.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian meliputi ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Ruang lingkup wilayah menjelaskan terkait lokasi kajian dalam penelitian dan ruang lingkup materi menjelaskan terkait batasan lingkup materi dalam penelitian.

1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah Eksternal

Kabupaten Bandung Barat terletak pada 06° 41' - 07° 19' Lintang Selatan dan 107° 22' - 108° 05' Bujur Timur dan memiliki luas sebesar 130.577,40 Ha. Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 16 kecamatan yaitu: Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua, Cikalongwetan, Cipeundeuy, Ngamprah, Cipatat, Padalarang, Batujajar, Cihampelas, Cililin, Cipongkor, Rongga, Sindangkerta, Gununghalu, dan Saguling dengan jumlah desa sebanyak 165 desa.

Secara administratif Kabupaten Bandung Barat mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Kabupaten Cianjur.
- Sebelah Utara : Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.
- Sebelah Timur : Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.

1.3.2 Ruang Lingkup Wilayah Penelitian

Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PKL menurut PERDA Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 ini berada di Kecamatan Ngamprah dan Kecamatan Padalarang. Selain itu, dua kecamatan ini termasuk ke dalam KSK Perkotaan Padalarang yaitu kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi

Kecamatan Ngamprah dan Kecamatan Padalarang merupakan kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia. Kecamatan Ngamprah adalah ibu kota Kabupaten Bandung Barat yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Bandung Barat. Wilayahnya terbagi menjadi 11 desa. Sedangkan Kecamatan Padalarang terbagi menjadi 10 desa dan pusat pemerintahannya berada di Desa Jayamekar. Kecamatan ini berjarak sekitar 7,3 kilometer dari ibu kota kabupaten Bandung Barat ke arah barat.

Dengan luas wilayah mencapai 87,28 km² dari 1287,41 km² total luas Kabupaten Bandung Barat, wilayah kajian ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

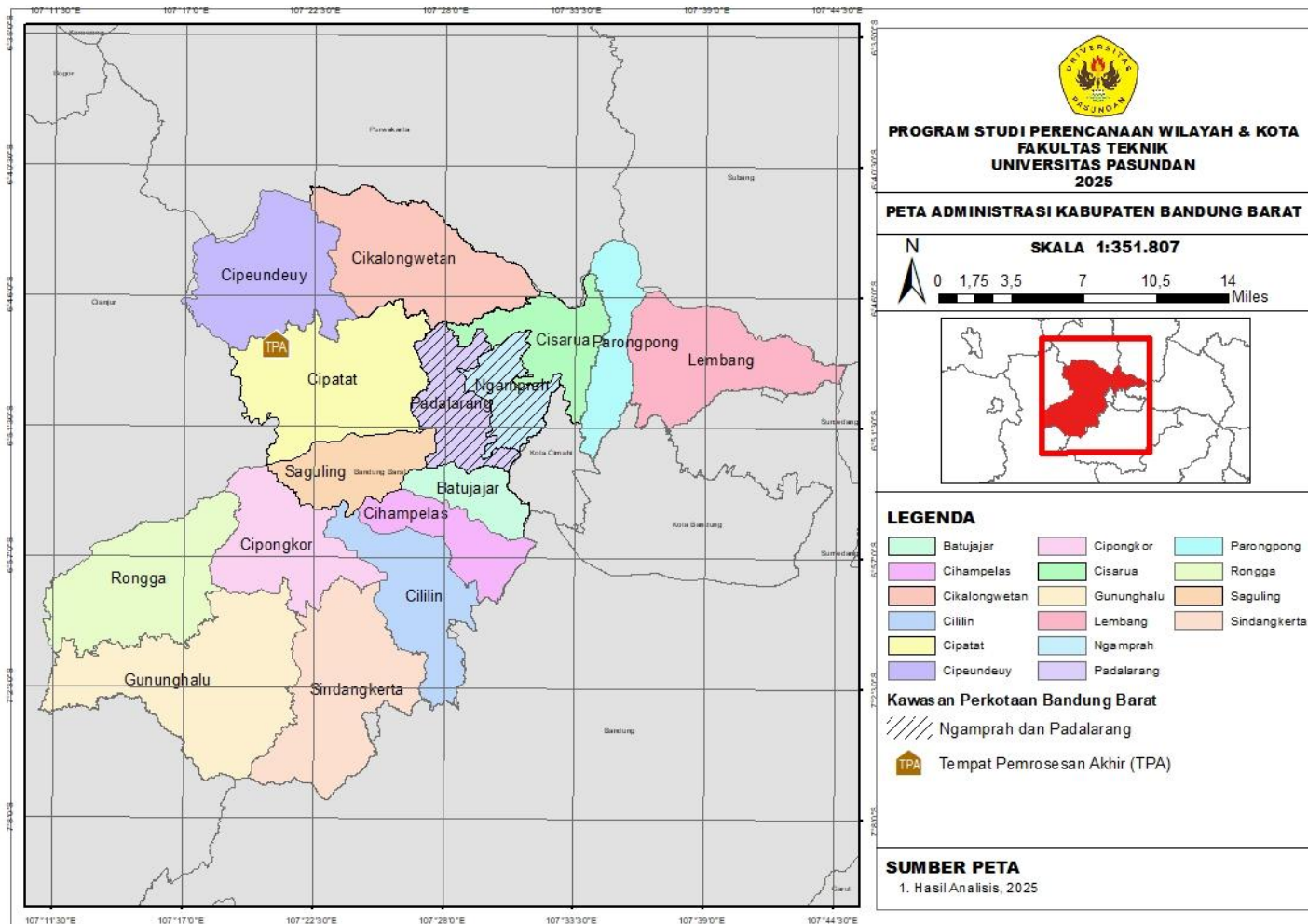
- Sebelah Utara : Kecamatan Cikalongwetan
- Sebelah Timur : Kecamatan Cisarua dan Kota Cimahi
- Sebelah Selatan : Kecamatan Batujajar
- Sebelah Barat : Kecamatan Cipatat dan Kecamatan Saguling

Tabel I. 4 Luas Ruang Lingkup Wilayah Penelitian

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah Per Kecamatan (Kg/Hari)
1	Padalarang	51,63	181.357	72.543

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah Per Kecamatan (Kg/Hari)
2	Ngamprah	35,65	177.687	71.075
Total		87,28	359.044	143.618

Sumber : Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2024



Gambar I. 3 Peta Administrasi Kabupaten Bandung Barat

BAB II METODOLOGI SURVEY

2.1 Metode Pengumpulan Data

Jenis dan sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data diantaranya :

A. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer menggunakan data yang diperoleh berdasarkan observasi lapangan dan wawancara untuk kebutuhan analisis.

1. Observasi Lapangan

Observasi lapangan adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati keadaan kondisi eksisting lokasi yang dikaji secara langsung. Dimana terdapat point observasi yang meliputi observasi mengenai kondisi pengelolaan persampahan yang diteliti dengan metode visualisasi yaitu menggunakan teknik dokumentasi foto.

Pada identifikasi ini observasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Bandung Barat, serta untuk mengevaluasi pengelolaan persampahan berdasarkan aspek menurut Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yaitu aspek teknik operasional, aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek hukum dan aspek peran serta masyarakat.

Tabel II. 4 Observasi Lapangan

Poin Observasi		Teknik Observasi
Kegiatan		
Pemilahan Sampah	Kegiatan pengelompokan sampah paling sedikit lima jenis (Sampah B3, Sampah Organik, Sampah Non-organik, Sampah Reuse, Sampah Recycle)	Dokumentasi foto
Pengumpulan Sampah	Metode pengumpulan baik komunal maupun individual	Dokumentasi foto
Pengangkutan Sampah	Pengangkutan harus memaksimalkan kapasitas kendaraan angkut yang digunakan	Dokumentasi foto

Poin Observasi		Teknik Observasi
Pengolahan Sampah	Kegiatan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, daur ulang energi	Dokumentasi foto
Fasilitas pengolahan sampah di wilayah permukiman	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Dokumentasi foto
	Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (TPS 3R)	Dokumentasi foto
	Stasiun peralihan antara	Dokumentasi foto
	Bank Sampah	Dokumentasi foto
	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	Dokumentasi foto
	Fasilitas truk pengangkut sampah	Dokumentasi foto
Teknologi dan inovasi terbaru untuk mengolah sampah rumah tangga		Dokumentasi foto
Ketersediaan tenaga ahli atau petugas untuk mengelola sampah		Dokumentasi foto
Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah		Dokumentasi foto

Sumber : Hasil Identifikasi, 2024

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei berupa pemberian pertanyaan secara lisan kepada responden atau pihak terkait. Teknik wawancara dilakukan ketika memerlukan informasi yang berhubungan dengan responden terkait masalah yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini yang akan menjadi responden adalah Dinas Lingkungan Hidup, BAPPELITBANGDA (Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah), dan Kantor Kecamatan.

Dalam hal ini proses wawancara ditentukan oleh beberapa faktor, seperti pewawancara, narasumber, topik dan fokus terhadap daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Berikut merupakan topik yang akan diambil pada saat wawancara dilakukan :

Tabel II. 5 Topik Wawancara

No	Narasumber	Kriteria Narasumber	Topik Wawancara
1	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Bidang terkait atau yang mewakili dan mengetahui kondisi persampahan di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah	• Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah • Mekanisme pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir

No	Narasumber	Kriteria Narasumber	Topik Wawancara
			• Kerjasama dengan pihak pemerintah daerah dalam mengelola sampah
			• Teknologi dan inovasi terbaru untuk mengolah sampah rumah tangga
			• Tenaga ahli atau petugas yang terlatih untuk mengelola sampah
			• Sumber pembiayaan dan alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah
			• Kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan sampah
			• Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
2	BAPPELITBANGDA (Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah)	Kepala Bidang terkait atau yang mewakili dan mengetahui kondisi persampahan di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah	• Teknologi dan inovasi terbaru untuk mengolah sampah rumah tangga
			• Sumber pembiayaan dan alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah
3	Kepala Camat	Kepala Bidang terkait atau yang mewakili dan mengetahui kondisi persampahan di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah	• Kondisi persampahan dan pola pengumpulan sampah di kecamatan
			• Program yang melibatkan masyarakat di tingkat kecamatan
			• Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah

Sumber : Hasil Identifikasi, 2024

3. Kuesioner

Pengumpulan data melalui kuesioner dilakukan untuk memperoleh penilaian terhadap tingkat kepentingan serta pengaruh kondisi aktual dari berbagai faktor internal dan eksternal yang telah dianalisis sebelumnya. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan bobot dan rating pada matriks IFAS dan EFAS, yang menjadi dasar dalam penyusunan strategi pengelolaan sampah di wilayah perkotaan Kabupaten Bandung Barat. Pemilihan responden ini dilakukan secara *purposive*, dengan mempertimbangkan kriteria dimana dinilai memiliki pemahaman yang mendalam terhadap kondisi lapangan. Total responden berjumlah 7 dan berasal dari instansi Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Bappelitbangda, serta Kantor Kecamatan Ngamprah dan Kantor Kecamatan Padalarang. Adapun indikator untuk faktor internal dan eksternal yaitu faktor internal

ini mencakup aspek-aspek seperti teknik operasional, infrastruktur persampahan dan sumber daya manusia. Sedangkan, faktor eksternal ini mencakup indikator seperti kolaborasi, teknologi dan inovasi, regulasi, pembiayaan, dan partisipasi masyarakat.

B. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder merupakan kegiatan kunjungan ke instansi-instansi terkait pada daerah yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Kajian dalam penelitian ini, dimana wilayah kajiannya adalah Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah, meliputi Kecamatan Ngamprah dan Kecamatan Padalarang. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan memperoleh data-data berupa dokumen tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen-dokumen tersebut dapat diperoleh dari dinas maupun instansi-instansi yang terkait. Pengumpulan data sekunder bertujuan untuk mengumpulkan data sebagai data pendukung dan analisis, dengan memperoleh data yang benar-benar akurat sekurang-kurangnya data lima tahun terakhir. Berikut ini adalah tabel kebutuhan data sekunder sebagai berikut :

Tabel II. 6 Kebutuhan Data Sekunder

No	Narasumber	Kriteria Narasumber	Topik Wawancara	
1	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Bidang terkait atau yang mewakili dan mengetahui kondisi persampahan di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah	Aspek Teknis Operasional	• Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
				• Mekanisme pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir
			Aspek Kelembagaan	• Kerjasama dengan pihak pemerintah daerah dalam mengelola sampah
				• Teknologi dan inovasi terbaru untuk mengolah sampah rumah tangga
				• Tenaga ahli atau petugas yang terlatih untuk mengelola sampah
				• Sumber pembiayaan dan alokasi anggaran

No	Narasumber	Kriteria Narasumber	Topik Wawancara	
				untuk pengelolaan sampah
				• Kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan sampah
				• Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
2	BAPPELITBANGDA (Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah)	Kepala Bidang terkait atau yang mewakili dan mengetahui kondisi persampahan di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah	Aspek Kelembagaan	• Teknologi dan inovasi terbaru untuk mengolah sampah rumah tangga
				• Sumber pembiayaan dan alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah
3	Camat	Kepala Bidang terkait atau yang mewakili dan mengetahui kondisi persampahan di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah	Aspek Teknis Operasional	• Kondisi persampahan dan pola pengumpulan sampah di kecamatan
			Aspek Kelembagaan	• Program yang melibatkan masyarakat di tingkat kecamatan
				• Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah

Sumber : Hasil Identifikasi, 2024

2.2 Kebutuhan Alat Survey

Kebutuhan alat survey meliputi:

1. Peneliti

Peneliti secara langsung mengamati objek yang berhubungan dengan fokus penelitian, sehingga diperoleh jawaban terhadap permasalahan yang dikaji, yang kemudian digunakan sebagai bahan dalam analisis.

2. Alat Tulis dan Perekam

Alat tulis dan perekam digunakan untuk menulis dan merekam hasil wawancara yang dilakukan surveyor kepada narasumber serta mendokumentasikan objek penelitian yang dibutuhkan, serta sebagai bukti dan keperluan arsip data.

3. Checklist Data

Checklist data digunakan untuk mempermudah surveyor mendapatkan kebutuhan data dan kelengkapan data.

4. Form Wawancara

Form Wawancara digunakan untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada responden dari dinas atau instansi yang berhubungan dengan masalah yang dibutuhkan seputar pengelolaan persampahan di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah berdasarkan kriteria yang telah ditentukan peneliti.

5. Kuesioner

Kuesioner digunakan untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada responden dari dinas atau instansi seputar pengelolaan persampahan di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah untuk penilaian bobot dan rating.

6. GPS

GPS digunakan untuk membantu peneliti sebelum melakukan survey untuk mengetahui letak instansi yang akan dikunjungi.

7. Surat Keterangan Kegiatan Survey

Surat keterangan kegiatan survey sebagai bukti resmi penelitian dilaksanakan untuk kepentingan akademik sebagai syarat perizinan.

2.3 Manual Guide/Rencana Survey

Manual guide atau Rencana survei merupakan teknik pengumpulan data atau informasi menggunakan daftar kegiatan yang akan dilakukan selama survey ditempat kajian dan telah tersusun. Berikut tahapan yang perlu dilakukan dalam melakukan survey :

1. Tahapan Persiapan

Dalam tahapan persiapan, peneliti menyusun metodologi pendekatan, kemudian merancang kegiatan survei untuk memperoleh data dan informasi guna mendukung penyusunan rencana serta menentukan sasaran dan tujuan.

2. Tahapan Survey

Dalam tahapan survey, yang pertama harus dilakukan adalah pembuatan proposal yang rapih dan berisikan Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 berisi Tinjauan Teori, dan Bab 3 berisi metodologi, selanjutnya pembuatan desain survey yang bertujuan untuk membuat rencana dan struktural penelitian. Dalam pengumpulan data sangat perlu dilakukan survey data sekunder dan juga primer dengan cara mengumpulkan berbagai informasi baik dari lapangan, maupun dinas atau kantor pemerintahan setempat.

Tabel II. 7 Tahapan Survey

No	Kegiatan	Tahapan Survey
1	Primer	a. Observasi Lapangan Mengamati, mencatat dan mendokumentasikan kondisi eksisting pengelolaan persampahan di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah (meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah), berdasarkan aspek teknis operasional dan aspek kelembagaan dilihat dari fasilitas persampahan yang tersedia sebagai alat pengelolaan persampahan, kerjasama dengan pihak pemerintah daerah, teknologi dan inovasi mengolah sampah, tercukupinya sumber daya manusia, tercukupinya sdan untuk pengelolaan sampah, kebijakan dan regulasi, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah (sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah). b. Wawancara Melakukan wawancara dengan narasumber dari instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, BAPPELITBANGDA, dan Kantor Kecamatan yang dapat memenuhi kebutuhan data sesuai dengan topik wawancara yang telah dibuat oleh peneliti.
2	Sekunder	Survey instansi dengan mengunjungi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, Bappelitbangda, Kepala Camat untuk memenuhi kebutuhan data dalam penelitian sesuai dengan <i>checklist</i> data penelitian.

Sumber : Hasil Identifikasi, 2024

LAMPIRAN E DOKUMENTASI

Poin Observasi	Dokumentasi		
Pemilahan Sampah			
Pengumpulan Sampah			
Pengangkutan Sampah			
Pengolahan Sampah			
Fasilitas pengolahan sampah di wilayah permukiman (TPS, TPS3R, Bank Sampah, Pegiat Maggot)			
			

Poin Observasi	Dokumentasi
	 
Teknologi dan inovasi terbaru untuk mengolah sampah rumah tangga	

Sumber : Hasil Analisis, 2025

LAMPIRAN F WAWANCARA

A. Hasil Wawancara Kecamatan Ngamprah

Identitas Pribadi

Nama : Pak Cuncun

Usia : 56 tahun.

Jenis Kelamin : ☒ Laki-laki ☐ Perempuan

Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	Topik Wawancara Kegiatan	Eksisting
1	Bagaimana kondisi persampahan di kecamatan ini saat ini?	Secara umum, 10 desa bekerjasama dengan DLH sedangkan 1 desa mandiri. Permasalahan sampah yang biasanya terjadi yaitu belum terpilahnya organik dan anorganik, masih ada masyarakat yang tidak membuang sampah pada tempatnya, kemampuan dinas untuk menarik permasalahan tersebut belum optimal
2	Apa saja pola pengumpulan sampah yang diterapkan di wilayah ini? Apakah sudah ada	1. Ada dari rumah diambil sama petugas ditarik menggunakan roda dan dikumpulkan di TPS

NO	Topik Wawancara Kegiatan	Eksisting
	sistem pemilahan sampah di tingkat rumah tangga?	2. Ada yang dipilah ada yang tidak kemudian ditarik menggunakan truk 3. Ada yang dibakar. Infrastruktur persampahan masih jauh dari kata lengkap kalau di kecamatan, TPS adanya di tingkat kabupaten. Kalau TPS sementara ada di tiap desa dan rw namun tidak merata
3	Apa saja teknologi dan inovasi terbaru yang saat ini digunakan dalam pengolahan sampah rumah tangga?	Inserenator atau alat pembakar sampah, ada yang mandiri dibuat oleh warga dan ada yang membeli dari anggaran desa
4	Apakah terdapat keterlibatan masyarakat dalam pengurangan dan penanganan sampah?	Masyarakat secara umum belum disiplin, kemudian ada petugas-petugas sampah dari petugas lingkungan (rt, rw, karangtaruna)
5	Bagaimana ketersediaan tenaga ahli atau petugas dalam pengelolaan sampah di wilayah ini? Apakah mencukupi?	Tenaga ahli banyak namun yang susah adalah prakteknya. Pembinaan dan pelatihan sering dilakukan, namun pada pelaksanaannya itu kurang
6	Bagaimana sumber pembiayaan dan alokasi anggaran yang digunakan dalam pengelolaan sampah? Apakah mencukupi?	Dari iuran warga dan dari desa. Belum mencukupi, buktinya tidak semua petugas sampah mendapatkan penghasilan yang layak
7	Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di kecamatan ini? Dan apa langkah-langkah untuk mengatasi tantangan tersebut?	Kembali ke permasalahan di awal dikarenakan sampah tidak dipisah organik anorganik, setelah jadi banyak semakin berat lagi untuk mengelolanya. Dari eksternal, kapasitas untuk penarikan sampah semakin berkurang
8	Apa harapan Anda terkait dengan pengelolaan sampah di kecamatan ini di masa depan?	Harapannya semua pihak memiliki satu kesadaran, dari masyarakatnya, intelektualnya, pengusaha dan tokoh-tokoh yang lain, termasuk yang difasilitasi oleh pemerintah

Sumber : Hasil Wawancara, 2025

B. Hasil Wawancara Kecamatan Padalarang

Identitas Pribadi

Nama : Ibu Anisa Zulhikmah

Usia : 43 tahun

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☒ Perempuan

Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	Topik Wawancara Kegiatan	Eksisting
1	Bagaimana kondisi persampahan di kecamatan ini saat ini?	Kondisi persampahan di Kecamatan Padalarang saat ini cukup memprihatinkan, ditandai dengan penumpukan sampah akibat TPA Sarimukti yang overload dan terbatasnya ritase pengangkutan. Pengelolaan sampah masih terkendala sarana prasarana, kurangnya kapasitas bank sampah, serta belum meratanya layanan pengangkutan. Sosialisasi pemilahan

NO	Topik Wawancara Kegiatan	Eksisting
		sampah sudah dilakukan, namun belum didukung sistem pengangkutan yang memadai. Regulasi dan sanksi pun belum berjalan optimal, sehingga penanganan sampah belum terintegrasi secara menyeluruh.
2	Apa saja pola pengumpulan sampah yang diterapkan di wilayah ini? Apakah sudah ada sistem pemilahan sampah di tingkat rumah tangga?	Pola pengumpulan sampah dilakukan melalui beberapa skema, yaitu oleh UPT Persampahan Dinas Lingkungan Hidup untuk kawasan perkotaan, serta pengangkutan mandiri oleh desa atau masyarakat, seperti membakar sampah sendiri atau bekerja sama dengan pegiat lingkungan. Selain itu, terdapat bank sampah yang mengakomodir pengumpulan sampah organik dari tingkat RT, terutama dengan melibatkan karang taruna.
3	Apa saja teknologi dan inovasi terbaru yang saat ini digunakan dalam pengolahan sampah rumah tangga?	Mesin MOTAH (Mobil Tempur Sampah), teknologi pembakaran sampah bantuan militer yang ramah lingkungan dan tidak menghasilkan asap. Aplikasi “Sampah Kita”, sistem digital dari Provinsi Jawa Barat untuk mencatat dan memantau jumlah serta jenis sampah di tingkat RT, RW, desa. Bank Sampah, sistem pengelolaan sampah berbasis tabungan yang sudah aktif di beberapa desa, didukung CSR seperti dari <i>Indonesia Power</i>. Pegiat Maggot, solusi pengolahan sampah organik dengan bekerja sama dengan pegiat maggot besar di Bojongkoneng, Ngamprah. Inovasi Satlinmas Penyuluh Sampah, program dari Satpol PP Provinsi yang melibatkan satlinmas desa untuk sosialisasi pilah sampah menggunakan sepeda dan speaker rekaman suara keliling desa. TPS3R, seperti yang terdapat di Tagog Apu.
4	Apakah terdapat keterlibatan masyarakat dalam pengurangan dan penanganan sampah?	Keterlibatan ini belum optimal karena masih terbatasnya sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum adanya sistem pengangkutan sampah terpilah yang terjadwal dengan baik.
5	Bagaimana ketersediaan tenaga ahli atau petugas dalam pengelolaan sampah di wilayah ini? Apakah mencukupi?	Ketersediaan tenaga ahli atau petugas dalam pengelolaan sampah di wilayah Padalarang belum mencukupi. Petugas pengangkut sampah masih terbatas dan tidak semua desa mendapatkan layanan dari UPT Persampahan. Sebagian besar pengelolaan masih bergantung pada masyarakat, seperti karang taruna atau pegiat lingkungan.
6	Bagaimana sumber pembiayaan dan alokasi anggaran yang digunakan dalam pengelolaan sampah? Apakah mencukupi?	Sumber pembiayaan pengelolaan sampah di Kecamatan Padalarang berasal dari beberapa pihak, antara lain anggaran kecamatan dan desa (melalui APBDes). Namun, alokasi anggaran yang tersedia dinilai belum mencukupi.
7	Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di kecamatan ini? Dan apa langkah-langkah untuk mengatasi tantangan tersebut?	Tantangan utama yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, <i>overload</i> -nya TPA Sarimukti yang sempat gagal diperluas pada tahun 2024, belum optimalnya sistem pengangkutan dari DLH, serta minimnya koordinasi antara desa, kecamatan, dan dinas dalam pelaksanaan teknis di lapangan, kapasitas bank sampah tidak sebanding dengan volume sampah yang dihasilkan, serta rendahnya partisipasi masyarakat, sanksi terhadap pembuang sampah sembarangan juga masih lemah dari sisi implementasi dan penegakannya.

NO	Topik Wawancara Kegiatan	Eksisting
		Yang dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut antara lain mengembangkan kolaborasi dengan pegiat lingkungan seperti peternak maggot dan bank sampah aktif, mengusulkan kebutuhan sarpras melalui musrenbang dan APBDes, melakukan sosialisasi pilah sampah, serta memanfaatkan aplikasi <i>Sampah Kita</i> untuk pencatatan data timbulan sampah, beberapa desa juga mulai memanfaatkan teknologi seperti CCTV untuk pengawasan.
8	Apa harapan Anda terkait dengan pengelolaan sampah di kecamatan ini di masa depan?	Diharapkan pengelolaan sampah di Kecamatan Padalarang ke depan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi, dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai hingga ke tingkat RT/RW, termasuk alat angkut dan fasilitas pemilahan sampah. Diperlukan juga regulasi yang jelas dan tegas, termasuk mekanisme sanksi bagi pembuang sampah sembarangan, serta melibatkan masyarakat secara aktif melalui edukasi dan sosialisasi.

Sumber : Hasil Wawancara, 2025

C. Hasil Wawancara Dinas Lingkungan Hidup

Identitas Pribadi

Nama : Pak Agus

Usia : 58 tahun.

Jenis Kelamin : ☒ Laki-laki ☐ Perempuan

Jabatan : Kasi Bidang Pengelolaan Persampahan

NO	Topik Wawancara Kegiatan	Eksisting
1	Bagaimana kegiatan pemilahan sampah sesuai jenisnya?	Kegiatan pemilahan sampah dilakukan sejak dari sumbernya, yaitu di tingkat rumah tangga, dengan memisahkan antara sampah organik dan anorganik. Strategi ini sesuai dengan instruksi dari pemerintah daerah dan gubernur yang mendorong pemilahan sampah di sumber. Pemilahan juga dilakukan di fasilitas pengolahan seperti TPS3R yang berfungsi untuk memilah dan mengolah sampah sebelum residunya dibuang ke TPA. Selain itu, pemilahan didukung oleh keberadaan bank sampah dan pegiat maggot yang membantu mengelola sampah terpilah. Namun, pelaksanaan pemilahan belum merata karena masih terkendala oleh kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana.
2	Bagaimana kegiatan pengumpulan sampah?	Kegiatan pengumpulan sampah di Kecamatan Padalarang dan Ngamprah sebagian besar dilakukan melalui kerja sama dengan UPT Kebersihan DLH. Mekanismenya meliputi sistem kumpul-angkut-buang, di mana sampah dikumpulkan dari sumber (rumah tangga atau RW), lalu diangkut menggunakan armada dump truck milik UPT untuk dibuang ke TPA Sarimukti.
3	Bagaimana kegiatan pengangkutan sampah?	Kegiatan pengangkutan sampah di Kecamatan Padalarang dan Ngamprah sebagian besar, sekitar 98%, dilakukan melalui kerja sama dengan UPT Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Proses pengangkutan dilakukan dengan sistem kumpul-angkut-buang, di mana sampah dikumpulkan dari sumber, kemudian

NO	Topik Wawancara Kegiatan	Eksisting
		diangkut menggunakan armada dump truck milik UPT, dan dibawa langsung ke TPA Sarimukti. Namun, sebelum ke TPA, sebagian sampah terlebih dahulu dibawa ke TPS3R untuk dilakukan pemilahan atau pengolahan, sehingga hanya residu yang dibuang ke TPA.
4	Bagaimana kegiatan pengolahan sampah?	Kegiatan pengolahan sampah di Kecamatan Padalarang dan Ngamprah dilakukan melalui beberapa metode, seperti pengelolaan oleh TPS3R, bank sampah, dan budidaya maggot.
5	Bagaimana kegiatan pemrosesan akhir sampah?	Kegiatan pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh UPT Kebersihan DLH dengan sistem kumpul-angkut-buang, di mana sampah dari masyarakat diangkut menggunakan armada dump truck dan dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir Sarimukti.
7	Apakah terdapat sarana pemilahan Sampah Organik (mudah terurai)? Apakah berfungsi secara optimal?	Ya, terdapat sarana pemilahan sampah organik di Kecamatan Padalarang dan Ngamprah, seperti TPS3R, bank sampah, serta pemanfaatan maggot. Sarana ini ditujukan untuk memilah dan mengolah sampah sebelum residunya dibuang ke TPA Sarimukti. Namun, fungsinya belum optimal karena masih terbatasnya SDM, sarana prasarana, dan belum semua rumah tangga melakukan pemilahan dari sumber secara konsisten.
11	Apakah terdapat sarana pengolahan sampah Tempat Penampungan Sementara (TPS)?	Terdapat 1 TPS di masing-masing Kecamatan Padalarang dan Kecamatan Ngamprah
12	Apakah terdapat sarana pengolahan sampah Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (TPS 3R)?	Terdapat sarana pengolahan sampah berupa Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) di Kecamatan Padalarang dan Ngamprah.
14	Apakah terdapat sarana pengolahan sampah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)?	Terdapat sarana pengolahan sampah berupa Tempat Pemrosesan Akhir yaitu TPA Sarimukti.
15	Apakah terdapat sarana pengolahan sampah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)?	Belum ada, sudah ada rencana namun tidak jadi dibangun dikarenakan penolakan oleh warga sekitar
16	Apakah terdapat fasilitas truk pengangkut sampah?	Terdapat fasilitas truk pengangkut sampah. Hampir 98% kegiatan pengangkutan sampah di Kecamatan Padalarang dan Ngamprah dilakukan melalui kerja sama dengan UPT Kebersihan DLH, yang menyediakan armada berupa dump truck. Truk-truk ini bertugas mengangkut sampah dari sumber untuk kemudian dibawa langsung ke TPA Sarimukti.
17	Bagaimana bentuk kerja sama yang dilakukan dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah?	Kolaborasi antara desa atau RW dengan UPT Kebersihan DLH. Hampir 98% kegiatan pengangkutan sampah dilakukan oleh UPT Kebersihan, yang bertugas mengangkut sampah dari sumber menggunakan armada truk menuju TPA Sarimukti. Kerja sama ini diatur dalam Perda No. 1 Tahun 2021 tentang retribusi, di mana masyarakat membayar iuran bulanan, biasanya sebesar Rp10.000, berdasarkan kesepakatan pengurus RW dengan warga.

NO	Topik Wawancara Kegiatan	Eksisting
18	Apa saja teknologi dan inovasi terbaru yang saat ini digunakan dalam pengolahan sampah rumah tangga?	Penggunaan mesin pencacah plastik, mesin pengurai, dan mesin pelebur plastik. Teknologi ini memungkinkan plastik dilelehkan dan dicetak kembali menjadi barang yang bernilai guna. Selain itu, telah diterapkan metode pengolahan organik dengan budidaya maggot, pendirian bank sampah sebagai pusat daur ulang sampah anorganik, serta pembangunan TPS3R. Inovasi juga dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi pemilahan sampah dari sumber.
19	Bagaimana ketersediaan tenaga ahli atau petugas dalam pengelolaan sampah di wilayah ini? Apakah mencukupi?	Ketersediaan tenaga ahli atau petugas dinilai masih kurang, keterbatasan SDM, baik dari segi jumlah maupun kapasitas. Meskipun sudah ada upaya pelibatan masyarakat seperti karang taruna dan pengurus RW dalam pengelolaan sampah, serta keterlibatan UPT Kebersihan untuk kegiatan pengangkutan, namun jumlah petugas yang tersedia belum mampu mengimbangi volume sampah yang dihasilkan.
20	Bagaimana sumber pembiayaan dan alokasi anggaran yang digunakan dalam pengelolaan sampah? Apakah mencukupi?	Sumber pembiayaan dalam pengelolaan sampah berasal dari iuran masyarakat dan retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Retribusi. Iuran masyarakat biasanya ditentukan melalui kesepakatan antara pengurus wilayah seperti RW denganarganya, misalnya sebesar Rp10.000 per bulan dengan pengangkutan seminggu sekali. Sementara itu, untuk wilayah yang bekerja sama langsung dengan UPT Kebersihan DLH, pembiayaan dilakukan melalui sistem retribusi resmi. Selain itu, pengadaan sarana dan prasarana seperti TPS3R, bank sampah, dan alat pengolahan sampah sebagian besar diperoleh dari bantuan atau hibah pemerintah. Namun, alokasi anggaran yang tersedia dinilai masih belum mencukupi, terutama dalam hal kebutuhan SDM dan peralatan pendukung teknologi pengolahan sampah.
22	Apakah terdapat keterlibatan masyarakat dalam pengurangan dan penanganan sampah?	Ada keterlibatan masyarakat namun secara umum belum optimal dan menyeluruh karena masih minimnya kesadaran dan kepedulian lebih dari masyarakat terhadap sampah.

Sumber : Hasil Wawancara, 2025

C. Hasil Wawancara Bappelitbangda

Identitas Pribadi

Nama : Pak Cecep

Usia : 56 tahun

Jenis Kelamin : ☒ Laki-laki ☐ Perempuan

Jabatan : Kasi Bidang Penelitian dan Pengembangan

NO	Topik Wawancara Kegiatan	Eksisting
1	Apa peran Bappelitbangda dalam perencanaan dan pengawasan pengelolaan sampah di KBB, khususnya di Kecamatan Padalarang dan Ngamprah?	Berperan sebagai lembaga yang menyusun kebijakan penganggaran untuk seluruh SKPD, termasuk DLH. Bappelitbangda bertanggung jawab mengalokasikan anggaran berdasarkan perencanaan yang disusun oleh DLH, yang mencakup target pengumpulan, pengangkutan, pengurangan, dan pengolahan sampah. Dengan demikian,

NO	Topik Wawancara	Eksisting
	Kegiatan	
		Bappelitbangda berperan penting dalam memastikan ketersediaan anggaran dan mengawasi ketercapaian target pengelolaan sampah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.
2	Apakah sudah ada dokumen perencanaan atau kebijakan khusus terkait pengurangan timbulan sampah di kedua kecamatan tersebut?	Sudah ada dokumen perencanaan yang memuat kebijakan khusus terkait pengurangan timbulan sampah di kedua kecamatan tersebut. Dokumen tersebut mencantumkan target-target tahunan yang jelas, meliputi pengumpulan, pengangkutan, pengurangan, dan pengolahan sampah. Dokumen ini menjadi dasar pelaksanaan manajemen pengelolaan sampah dan menjadi acuan kinerja DLH serta UPT di bawahnya.
3	Menurut Bappelitbangda, apa saja kekuatan kelembagaan yang saat ini dimiliki KBB dalam mendukung pengelolaan sampah di Padalarang dan Ngamprah?	Telah terbentuknya struktur kelembagaan yang jelas, yaitu DLH yang membawahi UPT Kebersihan sebagai pelaksana operasional, serta adanya bidang khusus di DLH yang menangani perencanaan pengelolaan sampah. Pengelolaan anggaran secara menyeluruh berada di bawah DLH, dengan kebijakan anggaran ditentukan oleh Bappelitbangda sebagai koordinator anggaran seluruh SKPD. Selain itu, pengelolaan sampah juga melibatkan kolaborasi lintas dinas seperti Dinas Permukiman, Dinas PUTR, dan Dinas LH, serta dukungan dari camat dan kepala desa berdasarkan instruksi dari tingkat gubernur dan bupati.
4	Apakah ada dukungan anggaran khusus yang secara konsisten dialokasikan untuk program pengurangan sampah di kedua kecamatan?	Anggaran pengelolaan sampah secara keseluruhan telah dialokasikan oleh DLH dan tercantum dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk target-target pengurangan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah. Namun, anggaran yang tersedia masih belum mencukupi kebutuhan ideal pengelolaan sampah. Retribusi yang dipungut dari masyarakat hanya mampu menutupi sekitar 20–25% dari total biaya pengelolaan, sehingga sisanya disubsidi oleh pemerintah daerah.
5	Apakah ada kolaborasi kelembagaan (dengan DLH, kecamatan, atau pihak swasta) yang berjalan efektif selama ini?	Terdapat kolaborasi kelembagaan yang berjalan, meskipun belum sepenuhnya efektif. DLH sebagai lembaga utama bekerja sama dengan UPT Kebersihan dalam pelaksanaan teknis, serta berkoordinasi dengan Bappelitbangda untuk penganggaran. Selain itu, dinas lain seperti Dinas Permukiman, Dinas PUTR, dan seluruh camat serta kepala desa juga dilibatkan dalam manajemen pengelolaan sampah, berdasarkan instruksi dari tingkat gubernur dan bupati.
6	Apa saja kendala yang dihadapi dari sisi perencanaan dan penganggaran dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dalam upaya mengurangi timbulan sampah di dua kecamatan tersebut?	Anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk pengelolaan sampah masih belum mencukupi kebutuhan operasional, di mana retribusi dari masyarakat hanya mampu menutupi sekitar 20–25% dari total biaya, sehingga diperlukan subsidi dari pemerintah daerah. Kedua, kendala teknis turut menghambat, seperti terbatasnya pemahaman pejabat yang menangani urusan persampahan terhadap manajemen pengelolaan sampah. Ketiga, partisipasi dan kesadaran masyarakat yang masih rendah, bahkan menolak pembangunan fasilitas pengelolaan sampah di wilayahnya, turut menghambat perencanaan yang telah disusun.

NO	Topik Wawancara	Eksisting
	Kegiatan	
7	Apakah ada tantangan dalam koordinasi antar perangkat daerah atau lembaga lain terkait pengurangan timbulan sampah?	Pejabat yang mengampu jabatan urusan persampahan itu tidak sepenuhnya menguasai tentang manajemen persampahan, anggaran yang sangat terbatas, dan yang paling penting yaitu keterlibatan dan kesadaran masyarakat yang sangat rendah tentang sampah.
10	Apakah ada rencana atau program baru dalam waktu dekat yang akan mendukung upaya pengurangan timbulan sampah di tingkat kecamatan?	Sebentar lagi akan dipasang sekitar 10 mesin disenerator di sebar di seluruh wilayah.
11	Apa saja ancaman dari eksternal yang dapat menghambat keberhasilan strategi pengurangan timbulan sampah di dua kecamatan ini?	Tidak ada ancaman eksternal, yang ada internal kita mampu mengoptimalkan tata kelola manajemen persampahan.
12	Bagaimana Bappelitbangda mengevaluasi efektivitas program pengelolaan sampah saat ini di Padalarang dan Ngamprah?	Sudah ada di dokumen perencanaan, target tahun ini dan tahun depan bagaimana, target pengumpulan, pengangkutan, pengurangan, pengolahan ada semua dalam dokumen perencanaan. Jika target-target tersebut dapat tercapai berarti manajemen pengelolaan berjalan dengan baik.
13	Apa harapan Bappelitbangda terhadap peran dari semua pihak dalam mendukung strategi pengurangan timbulan sampah ke depannya?	Harapannya peran semua pihak harus terlibat, seluruh stakeholder harus konsisten, kalau tidak konsisten dan tidak terlibat tidak akan tercapai. Keterlibatan masyarakat adalah yang paling utama, bukan keterlibatan peran fungsi pemerintah daerahnya, karena jika masyarakat jauh lebih peduli ini akan lebih cepat tercapai, jika tidak peduli maka berat pemerintah daerah untuk melakukan manajemen sampah dengan baik dan benar.

Sumber : Hasil Wawancara, 2025

LAMPIRAN G KUESIONER

Nama		Pertanyaan (Bobot)																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Annisa Zulhikmah	Kecamatan Padalarang	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5
Cuncun Usman	Kecamatan Ngamprah	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Agus	Dinas Lingkungan Hidup	4	4	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4
Maulana		5	5	5	3	5	4	5	5	4	5	5	5	3	5	5	5	5	4	5	5
Sahrul Mauludin		5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	4	5	5	4	4	5	4
Cecep Suhendar	Bappelitbangda	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	3	5	5
Mulyawan		5	4	4	5	4	5	5	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	5

Tabel Lanjutan...

Pertanyaan (Rating)																			
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3
2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
2	4	1	1	1	2	3	2	3	3	3	3	2	1	1	1	2	3	2	1
3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3
3	4	3	3	2	4	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	3
4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
2	3	3	2	2	3	2	3	3	2	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4

Sumber : Hasil Kuesioner, 2025

Keterangan :

BOBOT : TINGKAT KEPENTINGAN FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL		NILAI		NILAI	
		Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
1	Tidak penting	1	1	1	1
2	Kurang penting	2	2	2	2
3	Cukup penting	3	3	3	3
4	Penting	4	4	4	4
5	Sangat Penting	5	5	5	5
RATING : DAMPAK FAKTOR DI KONDISI FAKTUAL		NILAI		NILAI	
		Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
1	Tidak Berdampak/Tidak Signifikan	1	4	1	4
2	Kurang Berdampak/Kurang Signifikan	2	3	2	3
3	Berdampak/Signifikan	3	2	3	2
4	Sangat Berdampak/Sangat Signifikan	4	1	4	1